Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN

Tahun Anggaran

2022

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja disusun sesuai amanat: i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; iv) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

Laporan Kinerja dapat berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ucapan terimakasih

disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi sarana untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sudiro Roi Santoso

NIP. 196904162001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi 3
D. Isu Strategis 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. Uraian Singkat Renstra 9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis 9
C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 11
D. Perjanjian Kinerja 11
E. Metode Pengukuran 18
F. Target Tahun 2022 Menurut Renstra 18

BAB III KAPASITAS ORGANISASI 23
A. Sumber Daya Manusia 23
B. Sarana dan Prasarana 35
C. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA.2022 45

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 48
A. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 48
B. Perbandingan Kinerja Organisasi 60
C. Realisasi Anggaran 62
D. Kinerja Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 66
E. Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 89
F. Efektifitas dan Efisiensi 91

G. Prestasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 105

BAB V PENUTUP 110

A. Permasalahan 110

B. Tindak Lanjut 112

DAFTAR TABEL

Tabel Target Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 ix

Tabel 2.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Menurut Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 19

Tabel 3.1 Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 23

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pendidikan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 24

Tabel 3.3 Rekapitulasi Gender Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 25

Tabel 3.4 Rekapitulasi Usia Pegawai Berdasarkan Pendidikan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 26

Tabel 3.5 Rekapitulasi Gender PNS Berdasarkan Golongan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Tahun 2022 27

Tabel 3.6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 28

Tabel 3.7 Rekapitulasi Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 29

Tabel 3.8 Koordinator/ Subkoordinator Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 29

Tabel 3.9 Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 30

Tabel 3.10 Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 32

Tabel 3.11 Daftar Konsultan Individual Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 34

Tabel 3.12 Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 1 36

Tabel 3.13 Rekap Daftar Barang Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing 1 37

Tabel 3.14 Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 2 37

Tabel 3.15 Rekap Daftar Barang Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2 39

Tabel 3.16 Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 3 40

Tabel 3.17 Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 41

Tabel 3.18 Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3 42

Tabel 3.19 Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 3 Lantai 2 Wing 3 43

Tabel 3.20 Rekap Daftar Barang Ruang Atrium, Mushola dan Laktasi 43

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 Sesuai Cascading Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukturn Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020-2024 50

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukturn Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 56

Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.... 64

Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Per-Komponen Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 65

Tabel 4.5 Pernyataan dan Kategori Risiko 68

Tabel 4.6 Nilai Risiko 68

Tabel 4.7 Prosentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Jumlah Rekomendasi 72

Tabel 4.8 Prosentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Nominal Temuan 73

Tabel 4.9 Prosebtase Penyelesaian Laporan Hasil Audit Berdasarkan Jumlah Rekomendasi 73

Tabel 4.10 Prosentase Penyelesaian Laporan Hasil Audit Berdasarkan Nominal Temuan 73

Tabel 4.11 Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 76

Tabel 4.12 Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 89

Tabel 4.13 Produk Hukum Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 94

Tabel 4.14 Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 95

Tabel 4.15 Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Melalui Email 97

Tabel 4.16 Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Melalui Media Sosial Instagram 98

Tabel 4.17 Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Melalui SPAN Lapor 99

Tabel 4.18 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 April 2022 101

Tabel 4.19 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 Oktober 2022 101

Tabel 4.20 Output Formasi Kebutuhan Pegawai Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 Oktober 2022 103

Tabel 4.21 Output Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 Oktober 2022 103

Tabel 4.22 Output Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 Oktober 2022 104

Tabel 4.23 Output Identifikasi Judul SOP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 Oktober 2022 104

Tabel 4.24 Output Kegiatan Uji Beban Terkait Jafung API Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 Per 1 Oktober 2022 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 5

Gambar 2.1 *Cascading* Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2024..... 10

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 Awal Tahun 2022..... 12

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 Revisi ke-1 14

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 Revisi ke-2 15

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 Revisi ke-3 17

Gambar 3.1 Grafik Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 24

Gambar 3.2 Grafik Rekapitulasi Pendidikan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 25

Gambar 3.3 Grafik Rekapitulasi Gender Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 25

Gambar 3.4 Grafik Rekapitulasi Gender Berdasarkan Golongan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 27

Gambar 3.5 Grafik Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 29

Gambar 3.6 Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik serta Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Lantai 2 Wing 1 36

Gambar 3.7 Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lantai 2 Wing 1..... 37

Gambar 3.8 Ruang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2..... 38

Gambar 3.9 Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lantai 2 Wing 2 39

Gambar 3.10 Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum, Lantai 2 Wing 3..... 41

Gambar 3.11 Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3 42

Gambar 3.12 Ruang Rapat 2, Lantai 2 Wing 3 42

Gambar 3.13 Ruang Rapat 3, Lantai 2 Wing 3 43

Gambar 3.14 Mushola, Atrium dan Laktasi Lanta2 Gedung A1 44
Gambar 3.15 Alur Revisi Daftar isian Pelalaksanaan Anggaran Tahun 2022 45
Gambar 4.1 Grafik Kurva S Realisasi Keuangan 63
Gambar 4.2 Grafik Kurva S Realisasi Fisik 63
Gambar 4.3 Grafik Peta Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 69
Gambar 4.4 Grafik *Gap Funding* Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 74
Gambar 4.5 Juara 1 Lomba Ketangkasan Bela Negara Lempika dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR 105
Gambar 4.6 Juara 1 Lomba Bulu Tangkis 3 On 3 dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR 106
Gambar 4.7 Juara Umum ke-3 PUPR, Juara 2 Beregu dan Juara 3 Tunggal Putra Lomba Bulu Tangkis dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR 106
Gambar 4.8 Juara 3 Lomba Tennis Meja Beregu dalam Rangka Hari Bhakti PU ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR..... 107
Gambar 4.9 Juara 1 Tunggal Putra Tennis Meja dalam Rangka Hari Bhakti PU ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR..... 107
Gambar 4.10 Juara 2 Tunggal Putra Tennis Meja dalam Rangka Hari Bhakti PU ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR..... 108
Gambar 4.11 Juara 3 Lomba Pamong Cerdas Cermat dalam Rangka Hari Bhakti PU ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR 108
Gambar 4.12 Juara 3 kejuaraan antar Kementerian, Smash On Drugs BNN dalam Rangka Hari Bhakti PU ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR.... 108

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun atas target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dimana secara keseluruhan terdapat 6 (enam) indikator kinerja kegiatan dan 21 (duapuluh satu) Output Kegiatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan PK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 sebagai pernyataan kesepakatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang tahun 2022. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun Anggaran 2022

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	71,54	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
SK. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	75,00	84,4
IKK.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,90
IKK Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	17,5
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR sebesar 71,54% serta mendukung Sasaran Kegiatan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target sebesar 75% yang terbagi dalam 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dimana realisasi mencapai 84,4% karena adanya penambahan sebanyak 4 paket kegiatan pada IKK 1 dan 3 paket kegiatan pada IKK 4

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan pencapaian target 2022 yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran serta kegiatan secara cermat dan tepat sesuai kebutuhan pada setiap paket kegiatan yang akan dilaksanakan;
   - Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan cara diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan Ruang Rapat yang ada di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Balai Diklat Kementerian PUPR;
   - Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala agar dapat memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Melaksanaan renovasi ruang kerja yang nyaman dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan dengan mengacu pada Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan beberapa langkah sebagai berikut:
   - Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk melakukan audit bangunan untuk untuk menetukan langkah selanjutnya;
   - Melakukan pengaturan *lay out* (tata ruang) yang tepat serta melaksanakan renovasi tempat kerja secara bertahap dalam waktu 3 tahun;
   - Menyiapkan *co-working space*.
3. Melaksanakan revitalisasi infrastruktur jaringan serta mendorong Sekretariat Jenderal untuk menambah pagu anggaran terkait peningkatan kualitas layanan internet Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Prumahan disebabkan oleh layanan internet yang tidak stabil karena peralatan sudah masuk masa *end of life* sehingga rentan mengalami kerusakan.

4. Melakukan percepatan penyelesaian temuan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tahun 2011 – 2022 dimana progres penyelesaian baru mencapai 70,3% atau sebanyak 142 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 202 dengan nilai nominal yang telah diselesaikan yaitu sebanyak Rp205.922.719.271,68 dari total temuan sebanyak Rp212.339.836.279,87. Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:

   - Melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan Satker BA 033.16 (Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Satker BA 999.07.987252 (Satker Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan);
   - Menyusun pedoman dan tata alur menggunakan aplikasi LHP;
   - Menyusun timeline penyelesaian LHP;
   - Dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal (jika diperlukan)

5. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM baik ASN dan Non ASN dengan cara melakukan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang akurat sesuai dengan beban kerja nyata yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar bisa berjalan dengan optimal;

6. Menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan cara mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkomitmen untuk menyelenggarakan Manajemen Risiko secara sistematis, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian dari tujuan organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel;

7. Meningkatkan pelayanan informasi terhadap pengaduan masyarakat dan mitra kerja terkait kebijakan maupun program bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada publik antara lain berupa: status aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, Program KPR FLPP, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan permohonan informasi terkait kuota bantuan subsidi;

8. Meningkatkan pelayanan dalam pendampingan penyusunan produk hukum Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan cara melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan dalam menyusun kebijakan terkait pembiayaan infastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara lebih baik;

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awal tahun 2022 yang terbit pada tanggal 17 November 2022, total anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp83.802.133.000,00 *(delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)* dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)*

Selama Tahun Anggaran 2022 terdapat 3 (tiga) kali perubahan dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 8 tanggal 6 Desember 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp74.031.280.000,00 *(tujuh puluh empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),* Revisi DIPA tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan pagu Rincian Output (RO) Layanan Perkantoran pada paket pekerjaan pembayaran gaji dan tunjangan.

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bulan Desember 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja T.A. 2022 adalah 84.40% dari target yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra TA. 2020-2024 yaitu sebesar 75% untuk Tahun Anggaran 2022. Adapun Capaian Realisasi Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp67.939.194.000,00 *(enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)* dari pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp68.781.137.000,00 00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)* atau dengan progres keuangan sebesar 98,78% dan progress fisik sebesar 99,06% (status ie-Monitoring Online pada tanggal 17 Januari 2023).

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis DJPI, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) melaksanakan tugas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang integratif, transparan dan akuntabel, serta melaksanakan peningkatan layanan administrasi yang prima dan penyediaan informasi yang akurat dan andal melalui peningkatan kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada DJPI atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan penyampaian gambaran permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi masukan dalam melakukan evaluasi untuk menajdi masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. Tugas Dan Fungsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bagian Ketiga yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Pasal 528 tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

"Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal"

Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 529 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 528 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan

k. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat,

pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memerlukan manajemen struktur organisasi yang kuat dan saling mendukung sehingga pendistribusian tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;

Tugas: melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagian Kepegawaian dan Umum;

Tugas: melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pembiayaan, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum dan Perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

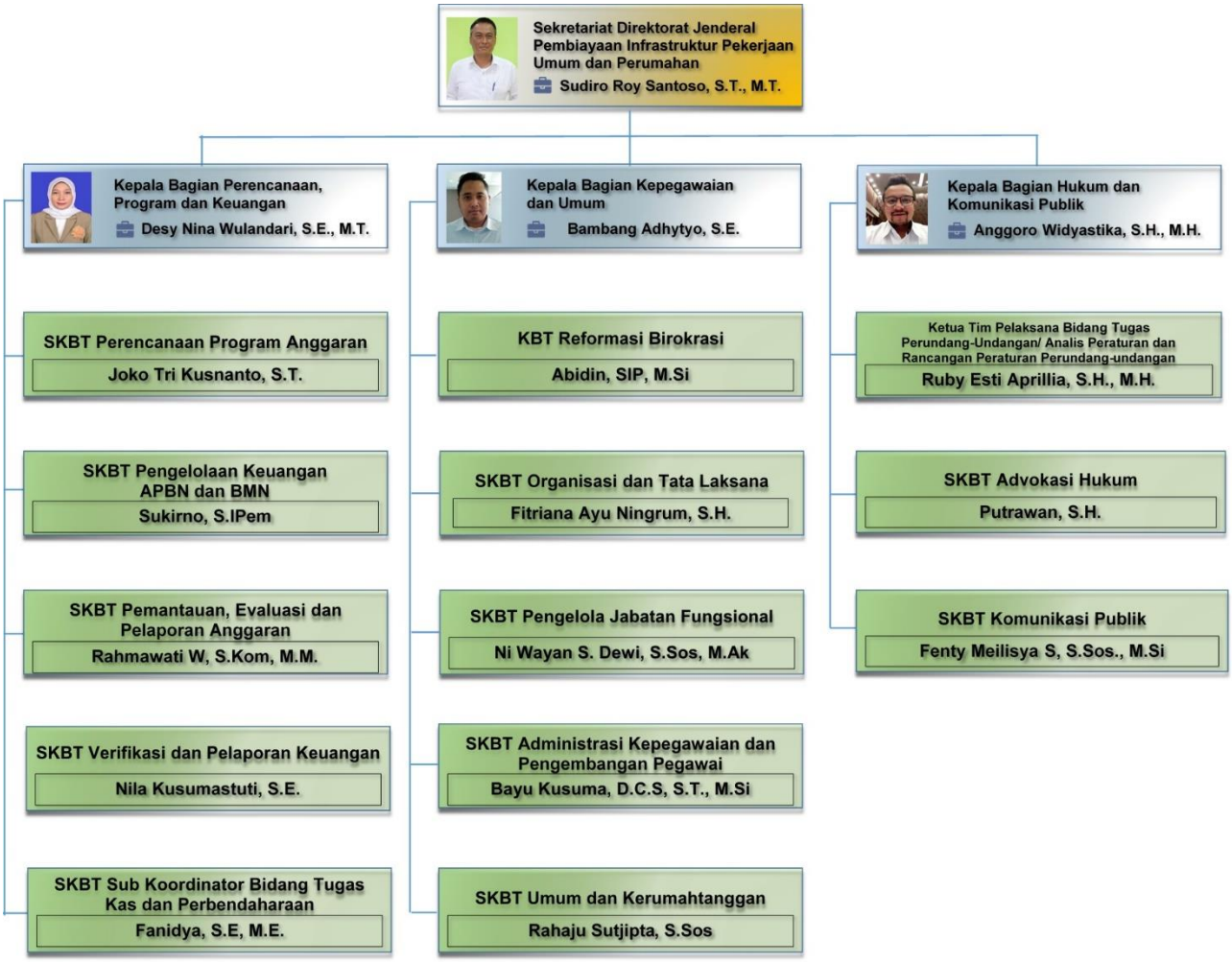

D. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun 2022 dengan mengingat isu strategis yang ada, dimana isu tersebut menjadi tantangan yang harus dapat diatasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik, berhasil dan berdaya guna. Adapun isu strategis di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kali perubahan pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang Tahun Anggaran 2022, dimana revisi terakhir terjadi pada Revisi DIPA ke-8 yang terbit pada tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp68,781,137,000.00 yang berkurang dari pagu sebelum nya yaitu sebesar Rp70,799,902,000.00. Berubahnya pagu Anggaran ini disebabkan oleh adanya pengurangan pagu RO Layanan Perkantoran (4194.EBA.994) pada paket pekerjaan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan dari Rp36,224,185,000.00 menjadi Rp34,205,420,000.00;
2. Terdapat beberapa paket kegiatan baru di Tahun Anggaran 2022 pada:
   - DIPA Awal Tahun 2022 yang terbit tanggal 17 November 2021 yaitu: Penyusunan Laporan Manajemen Risiko;
   - DIPA Revisi ke-5: Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP, Penataan Arsip PPDPP, Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP, Pelaksanaan Renovasi, Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP serta Fasilitasi Audit dan Riviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP;
   - DIPA Revisi ke-6: Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (*Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF)) : Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan.
3. Pengelolaan prasarana dan sarana bangunan beserta pengadaan kelengkapannya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna sebagai berikut:
   - Renovasi dan pengadaan meubelair ruang rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan perumahan dan ruang rapat umum;
   - Renovasi dan pengadaan meubelair toilet, ruang laktasi dan mushola;
   - Dilakukan audit bangunan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam usaha perawatan bangunan Gedung A1 dan A2.
4. Terdapat temuan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dari tahun 2011 – 2022 dimana progres penyelesaian baru mencapai 70,3% atau sebanyak 142 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 202 dengan nilai nominal yang telah diselesaikan yaitu sebanyak Rp205.922.719.271,68 dari total temuan sebanyak Rp212.339.836.279,87;

5. Tindak lanjut penyelesaian Likuidasi BLU PPDPP dimana terdapat penambahan beberapa paket kegiatan baru di pertengahan tahun untuk mengakomodir Likuidasi BLU PPDPP yaitu:
   - Penataan Arsip dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP;
   - Penatausahaan serta pelaksanaan terkait hak dan kewajiban antara lain berupa: penyelesaian terkait temuan LHA pada Satker BLU PPDPP, penyetoran saldo ke kas negara, serta penyelesaian Laporan Keuangan;
   - Penyelesaian Laporan Keuangan Likuidasi BA 033.16.631021 Satker BLU PPDPP lainnya;
   - Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP.
6. Kebutuhan revitalisasi infrastruktur jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan internet Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Prumahan yang disebabkan oleh layanan internet yang tidak stabil karena peralatan telah masuk masa *end of life* sehingga rentan mengalami kerusakan;
7. Pelaksanaan dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan masih menemui beberapa kendala diantaranya: Profil Risiko belum seluruhnya menggambarkan risiko strategis, pemahaman Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum merata sehingga terdapat kesulitan pada proses penyusunan profil risiko.
8. Sumber Daya Manusia:
   - Melakukan pendataan dan *updating* berkala mengenai data pegawai Non ASN Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Pelaksanaan evaluasi kepegawaian dan penyiapan usulan rekomendasi pejabat perbendaharaan;
   - Melaksanakan Internalisasi terkait Jafung Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setelah diterbitkannya Permen PAN RB No. 44 Tahun 2022 tentang Jafung Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dimana diperlukan sosialisasi dan langkah-langkah selanjutnya agar kompetensi para pemangku Jabatan Jafung Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat lebih berkembang;
   - Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan output berupa dokumen analisis jabatan yang mencakup 40 dari 52 Jabatan Fungsional Teknik dan 13 dari 18 Jabatan Pelaksana serta analisis beban kerja yang mencakup 46 dari 52 Jabatan Fungsional Teknik dan 13 dari

18 Jabatan Pelaksana di-*input* dalam Aplikasi e-Formasi KemenPAN-RB melalui link : https://formasi.menpan.go.id/ .

9. Pelaksanaan reviu SOP Struktural yang telah disusun, dan juga SOP yang terkait dengan tugas Satker, serta dilakukan sosialisasi dan evaluasi untuk perbaikan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Uraian Singkat Renstra

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu Unit Eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjabarkan kebijakan dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan Kementerian PUPR, sehingga Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Adapun Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Kerja Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR yang kelima (SS5), yaitu: “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”.

Sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” kemudian dijabarkan kedalam “Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” dan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) pada Tahun 2020-2024 akan mengampu 2 program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen (Koordinator: Sekretariat Jenderal); dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator: Ditjen Cipta Karya). Dua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-*breakdown* menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

1) Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja Program terdiri dari dua indikator yaitu:

a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI, BLU PPDPP dan Direktorat di lingkungan DJPI;

b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yag efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan.

2) Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman.

Indikator Kinerja Program tersebut mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Gambar 2.1

Cascading Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2024

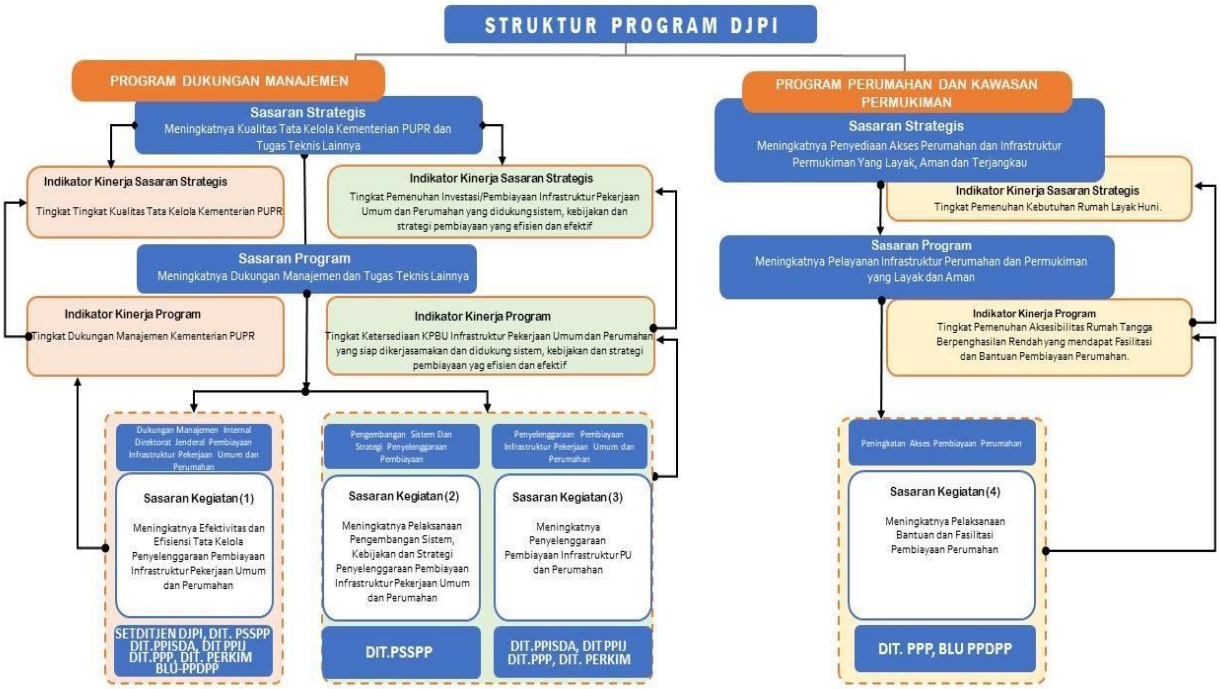

C. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri dan berkepribadian, maka berdasarkan hal tersebut kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembiayaan Perumahan melalui:
   a. Penataan regulasi dan kebijakan;
   b. Pelayanan bantuan hukum;
   c. Peningkatan dukungan, tata laksana dan koordinasi kelembagaan;
   d. Peningkatan pengelolaan anggaran;
   e. Peningkatan kapasitas SDM serta pemberdayaan pemangku kepentingan;
   f. Pengembangan pengelolaan aset (property management).

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, untuk menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki strategi mengimplementasikan reformasi birokrasi perencanaan dan penganggaran serta reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

D. Perjanjian Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 sebagai berikut:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama tahun 2021 menyusun perjanjian kinerja (PK) sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pertama**, PK awal yang terbit pada bulan Januari 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun berdasarkan DIPA awal tanggal 17 November 2021 dengan pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp83.802.133.000,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)* Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
Awal Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

SUDIRO ROI SANTOSO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp78.802.133.000,00

JAKARTA, JANUARI 2022

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

SUDIRO ROI SANTOSO

2. **Kedua**, PK revisi pertama yang terbit pada bulan Oktober 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya penambahan anggaran pada beberapa paket kegiatan yaitu: Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP, Penataan Arsip PPDPP, Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum, Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP, serta Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP pada Revisi DIPA 5 tanggal 5 September 2022 dengan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp84.382.722.000,00 (delapan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp79.312.882.000,00 *(tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).* Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi yang Pertama yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
Revisi 1

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp79.312.882.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

3. **Ketiga**, PK revisi kedua yang terbit pada bulan November 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya penambahan anggaran pada beberapa paket kegiatan yaitu: adanya penambahan anggaran untuk memfasilitasi paket kegiatan baru yaitu Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *(Creative Infrastructure Financing (CreatIFF)*: Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan serta adanya pergeseran anggaran antar KRO dan Pergeseran *Automatic Adjustment* Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PI pada DIPA Revisi 6 tanggal 31 Oktober 2022. Adapun total pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp75.971.943.000,00 *(tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp70.799.902.000,00 *(tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah).* Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi yang Pertama yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
Revisi 2

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua | Pihak Pertama

HERRY TRISAPUTRA ZUNA | **SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN
Rp70.799.902.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

SUDIRO ROI SANTOSO

4. **Keempat**, PK revisi ketiga pada bulan Desember 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya pengurangan pagu RO Layanan Perkantoran (4194.EBA.994) pada paket pekerjaan pembayaran gaji dan tunjangan serta pergeseran anggaran antar KRO. Adapun total pagu untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp74.031.280.000,00 *(tujuh puluh empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)..* Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi yang Pertama yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
Revisi 3

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN
Rp68.781.137.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

E. Metode Pengukuran

Pengukuran yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 di Tahun Anggaran 2022, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik

F. Target Tahun 2022 Menurut Renstra

1. Target Kinerja

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mendukung program-program yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan dilaksanakan Kegiatan Dukungan Managemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Output Kegiatan (Rincian Output) sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;

2) Manajemen Transformasi Organisasi;
3) Pengelolaan Pegawai ;
4) Tata Kelola TNDE;
5) Kerumah-tanggaan;
6) Advokasi Hukum;
7) MOU dengan APH dan Instansi lain terkait;
8) Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
9) Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I;
10) Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I;
11) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
12) Strategi Komunikasi;
13) Publikasi;
14) Laporan Keuangan Unit Eselon I;
15) Laporan Keuangan Unit Eselon II;
16) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI;
17) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI;
18) Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan;
19) Gaji dan Tunjangan;
20) Opersionalisasi Kantor DJPI; dan
21) Operasionalisasi Kantor masing-masing Direktorat di Lingkungan DJPI.

2. Kerangka Pendanaan

Sesuai Rencana Strategis DJPI TA. 2020-2024 terdapat total anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada awal tahun yaitu sebesar Rp71.859.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah:

Tabel 2.1
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Menurut Renstra DJPI TA.2020-2024
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun Anggaran 2022

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			%	100	118,325
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :					
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	15	
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			15	
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	10	
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	10	
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	15	
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik		%	10	
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan					
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan					71.859
	OUTPUT KEGIATAN :				
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I		Layanan	1	318
	1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	318
2	Manajemen Transformasi Organisasi		Layanan	2	1.273
	1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	1.273
3	Pengelolaan Pegawai		Orang	260	1.592
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	1.592
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip		Layanan	1	531
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	531
5	Kerumahtanggaan		Layanan	2	1.061
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	2	1.061

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
6	Advokasi Hukum		Layanan	2	849
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	849
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait		Layanan	1	424
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	424
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		Layanan	3	1.592
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	1.592
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		Layanan	1	944
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	944
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		Layanan	2	1.448
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	2	1.448
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	590
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	590
12	Strategi Komunikasi		Layanan	2	1.379
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	1.379
13	Publikasi		Layanan	2	1.061
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	2	1.061
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I		Laporan	1	955
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	955
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II		Laporan	1	318
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	318
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI		Laporan	1	1.061
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	1.061
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI		Unit	1	531
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	531
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI		Unit	1	531

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	531
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	1	435
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	435
20	Gaji dan Tunjangan DJPI		Layanan	1	27.896
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	27.896
21	Opersionalisasi Kantor DJPI		Layanan	1	20.071
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	22.071

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

BAB III
KAPASITAS ORGANISASI

A. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami Restrukturisasi Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk mencapai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai target yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Data Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 secara lengkap dijabarkan dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

No	Golongan	Pendidikan									Jumlah
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IV/d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	IV/c	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	IV/b	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
5	IV/a	0	6	1	0	0	0	0	0	0	7
6	III/d	0	6	6	0	0	0	0	0	0	12
7	III/c	0	1	11	**0**	0	0	0	0	0	12
8	III/b	0	3	2	0	0	0	2	0	0	7
9	III/a	0	0	9	0	0	0	1	0	0	10
10	II/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II/c	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4
12	II/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II/a	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
14	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	19	29	3	0	1	5	0	0	58

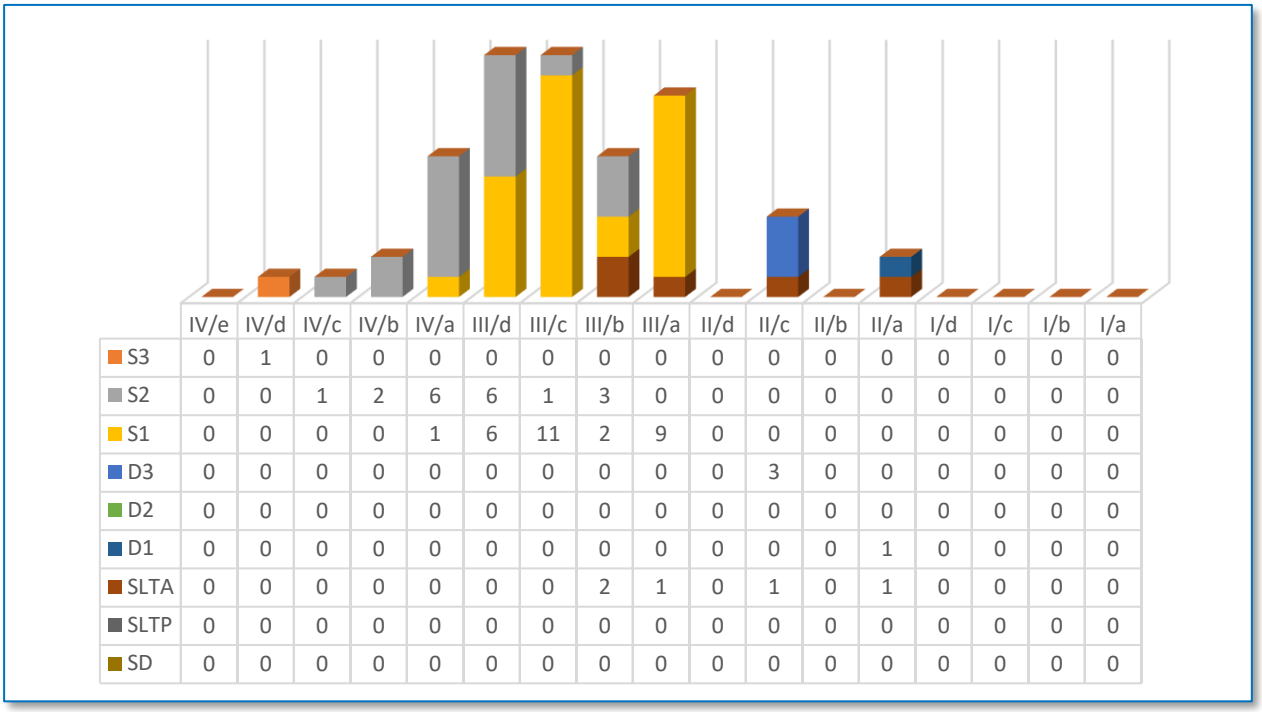

Gambar 3.1
Grafik Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pendidikan Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

NO.	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS		TOTAL
			PNPNS	KI	
1	S3	1	0	0	1
2	S2	19	2	2	23
3	S1	29	17	16	62
4	D3	3	7	0	10
5	D2	0	0	0	0
6	D1	1	0	0	1
7	SLTA	5	21	2	28
8	SLTP	0	8	0	8
9	SD	0	0	0	0
10	BELUM TERDATA	0	0	0	0
TOTAL		58	55	20	133

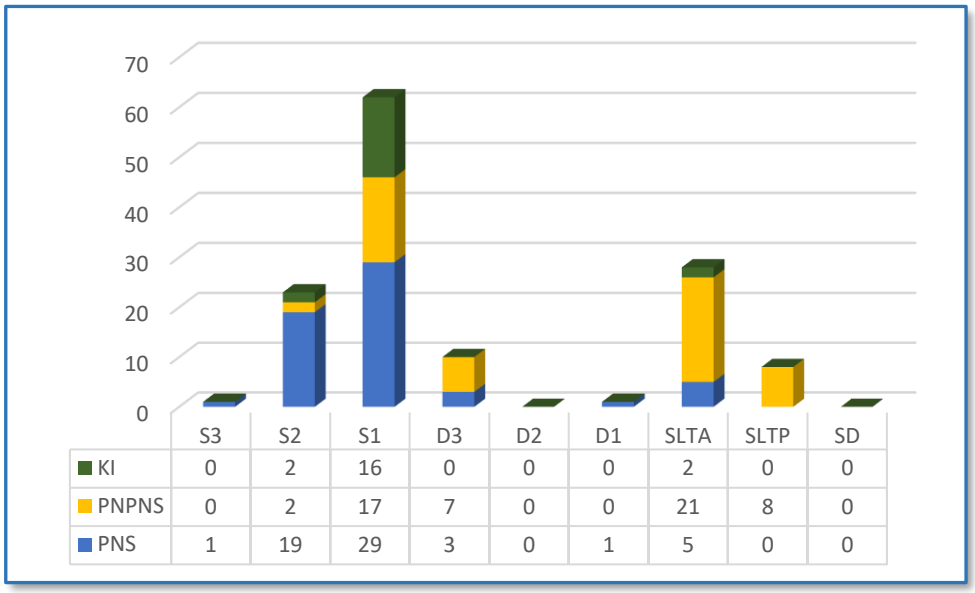

Gambar 3.2
Grafik Rekapitulasi Pendidikan Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

Tabel 3.3

Rekapitulasi Gender Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

NO	Gender	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	92	69,17
2	Perempuan	41	30,83
Total		133	100

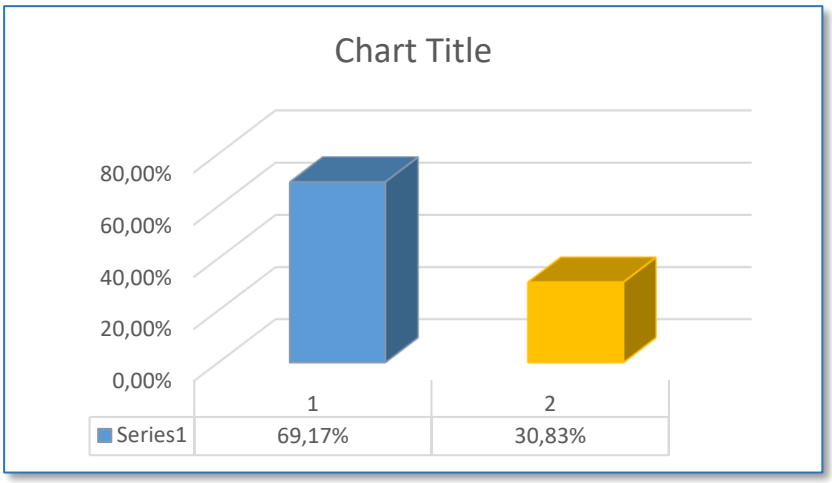

Gambar 3.3

Grafik Gender Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

Tabel 3.4

Rekapitulasi Usia Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

No	UMUR	S3		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SLTP		SD		TOTAL
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	
1	DI BAWAH 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20-25	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
3	26-30	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	20
4	31-35	0	0	1	1	7	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	23
5	36-40	0	0	1	5	0	8	1	3	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	24
6	41-45	0	0	3	3	3	7	0	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	23
7	46-50	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	13
8	51-55	1	0	2	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	15
9	56-60	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7
10	DI ATAS 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		1	0	8	13	21	45	1	10	0	0	0	1	3	22	0	8	0	0	133

Tabel 3.5
Rekapitulasi Gender Berdasarkan Golongan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Tahun 2022

No	Golongan	Gender				Total	
		LakI	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	IV/e	0	100	0	0	0	100
2	IV/d	1	0	0	0	1	0
3	IV/c	1	0	0	0	1	0
4	IV/b	2	100	0	0	2	100
5	IV/a	3	33,33	4	66,67	7	100
6	III/d	5	66,67	7	33,33	12	100
7	III/c	7	63,64	5	36,36	12	100
8	III/b	6	85,71	1	14,29	7	100
9	III/a	6	60	4	40	10	100
10	II/d	0	0	0	0	0	0
11	II/c	3	75	1	25	4	100
12	II/b	0	0	0	0	0	0
13	II/a	1	66,67	1	33,33	2	100
14	I/d	0	0	0	0	0	0
15	I/c	0	0	0	0	0	0
16	I/b	0	0	0	0	0	0
17	I/a	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		35	651,02	23	248,98	58	100

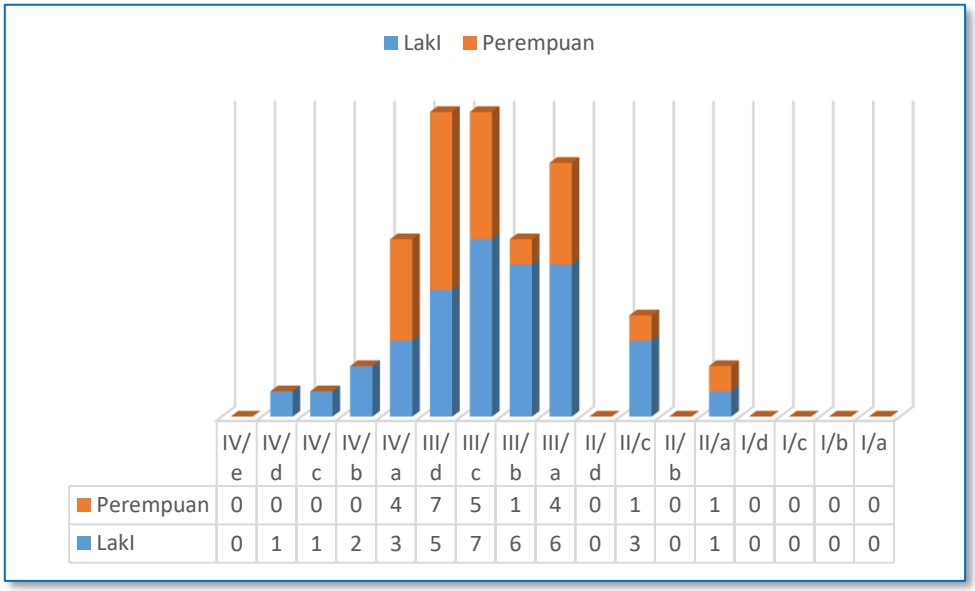

Gambar 3.4
Grafik Rekapitulasi Gender Berdasarkan Golongan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Tahun 2022

Tabel 3.6
Rekapitulasi PNS Berdasrkan Jabatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

NO	Menurut Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	1
3	Eselon III	3
4	Jabatan Fungsional Tertentu	32
5	Jabatan Fungsional Umum	9
Jumlah		46

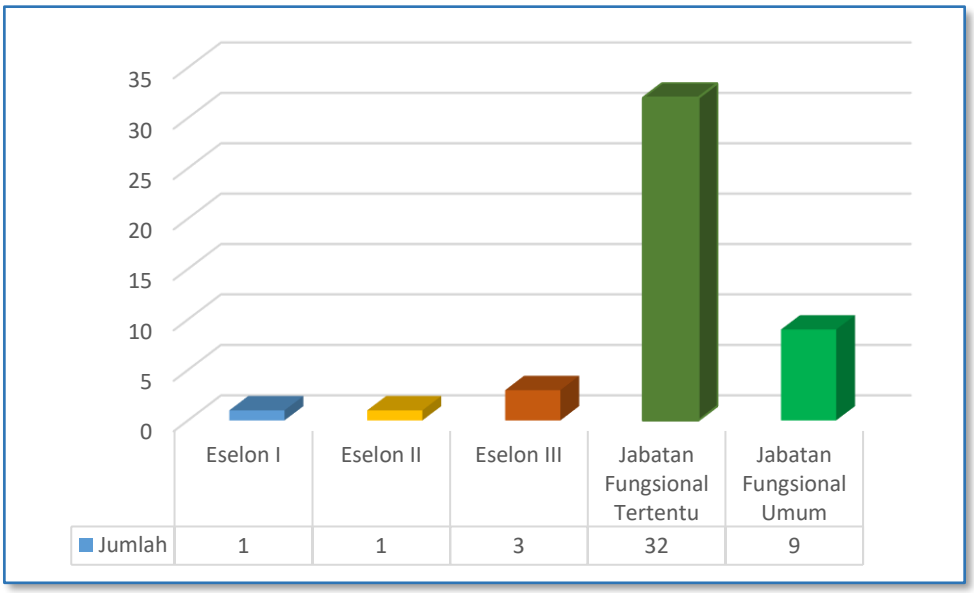

Gambar 3.5
Grafik Rekapitulasi PNS Berdasrkan Jabatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

Tabel 3.7
Rekapitulasi Jabatan Fungsional
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

No.	Jabatan Fungsional	Total
1	Utama	0
	Aktif	0
	Non Aktif	0
2	Madya	2
	Aktif	1
	Non Aktif	1
3	Muda	17
	Aktif	16
	Non Aktif	1
4	Pratama	13
	Aktif	11
	Non Aktif	2
TOTAL		32

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Para Kepala Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh Koordinator dan beberapa Subkoordinator serta Jabatan Fungsional. Data mengenai Koordinator, Subkoordinator dan Jabatan Fungsional seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Koordinator/ Subkoordinator
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

No	NAMA	Koordinator/ Subkoordinator
Bagian Kepegawaian dan Umum		
1	Abidin, SIP, M. Si	Koordinator Bidang Tugas Refomasi Birokrasi
2	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos., M.Ak.	Sub Koordinator Bidang Tugas Pengelola Jabatan Fungsional
3	Bayu Kusuma Dwi Chandra Sarie S.T., M.Si.	Sub Koordinator Bidang Tugas Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Pegawai
4	Fitriana Ayu Ningrum S.H.	Sub Koordinator Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana
5	Rahaju Sutjipta, S.Sos	Sub Koordinator Bidang Tugas Umum dan Kerumahtanggaan
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
5	Putrawan S.H.	Sub Koordinator Bidang Tugas Advokasi Hukum

No	NAMA	Koordinator/ Subkoordinator
6	-	Sub Koordinator Bidang Tugas Perundang-undangan
7	Fenty Meilisya Syafril, S.Sos., M.Si.	Sub Koordinator Bidang Tugas Komunikasi Publik
Bagian Perencanaan Program dan Keuangan		
8	Joko Tri Kusnanto, S.T.	Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Program Anggaran
9	Sukimo, S.Ipem	Sub Koordinator Bidang Tugas Pengelolaan Keuangan APBN dan Barang Milik Negara
10	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran
11	Fanidya, S.E., M.E.	Sub Koordinator Bidang Tugas Kas dan Perbendaharaan
12	Nila Kusumastuti, S.E.	Sub Koordinator Bidang Tugas Verifikasi dan Pelaporan Keuangan

Tabel 3.9

Jabatan Fungsional

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN
Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan		
1	Nila Kusumastuti, SE	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
2	Fanidya, SE, ME	Analis Anggaran Ahli Muda
3	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom, MM	Analis Anggaran Ahli Muda
4	Joko Tri Kusnanto, ST	Analis Anggaran Ahli Muda
5	Sukirno, S.Ipem	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
6	Puteri Rizqi Amelia, ST	Perencana Ahli Pertama
7	Rindy Roosmala Prameswari, S.ST	Analis Kebijakan Ahli Pertama
8	Wirawan Widiyanto ST	Peneliti Ahli Pertama
9	Fikri Nuru Jaman, SE	Analis Kebijakan Ahli Pertama
10	Lucky Astri Fitriana SE	Analis Kebijakan Ahli Pertama
11	Sumardi, SE	JFU
12	Gede Yoga Mahendra, SE	JFU
13	Diana Suryana Putra, S.AP	JFU

NO.	NAMA	JABATAN
14	Lutfia Herawati, S.E.	JFU
15	Faisal Bagus Prakoso, A.Md.Ak	JFU
16	Muhammad Hammami, A.Md.Ak	JFU
17	Denia Khaerunissa, A.Md.Ak	JFU
18	Catur Budi Satriawan, S.E.	JFU
19	Tri Wahyuni, S. Kom	JFU
20	Eka Nisfiasari, S.E.	JFU
21	Ni Puthu Intan Ade Liana, A.P.Kb.N	JFU
22	Sardi	JFU
Bagian Kepegawaian dan Umum		
23	Abidin, SIP, M. Si	Analis Kepegawaian Ahli Madya.
24	Aisah Dewi Setiawaty S.T., M.Si.	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Madya
25	Jaffri, S.Kom, M.Si	Analis Kepegawaian Ahli Muda
26	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos, M. Ak	Analis Kepegawaian Ahli Muda
27	Bayu Kusuma Dwi C.S., ST, M.Si	Analis Kepegawaian Ahli Muda
28	Mendung Sunarno, S. AP	Analis Kepegawaian Ahli Muda
29	Fitriana Ayu Ningrum, SH	Analis Kepegawaian Ahli Muda
30	Rahaju Sutjipta, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda
31	Iin Imania, SE	Arsiparis Ahli Muda
32	Ahmad Muhajir S.E., S.T.	Arsiparis Ahli Muda
33	Tatang Rasydin, S.AP	Arsiparis Ahli Muda
34	Arif Harsa Pradipta, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
35	Adi Pratomo S.A.P.	Analis Kebijakan Ahli Pertama
36	Andreas Syahputra Sinurat S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
37	Zalfa Fadilla Anjani S.T.	Perencana Ahli Pertama
38	Rio Febrianto Moroisa, S. Kom	JFU
39	Tri Pudji Astuti, S. Sos, M.Si	JFU
40	Devy Loviardi, S.T, M.Si	JFU

NO.	NAMA	JABATAN
41	Romlih	JFU
42	Kasno	JFU
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
43	Putrawan, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
44	Fenty Meilisya Syafril S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda
45	Siska Purnianti S.H., M.Hum.	Analis Hukum Ahli Muda
46	Yudhistira Adi Nugroho, SH	Analis Hukum Ahli Pertama
47	Ruby Esti Aprillia, SH, MH	Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan perundang-udangan/ Ketua Tim Pelaksana Bidang Tugas Perundang-undangan
48	Mifta Fadya S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
41	Antonius Simbolon S.E., M.Si.	Analis Kebijakan Ahli Pertama
42	Si Rahmi Purnamasari, S.Ikom	JFU

Keterangan:

2 (dua) orang pegawai ditugaskan ke BP Tapera:

- Siska Purnianti, S.H, M.Hum selama 5 tahun sejak 1 April 2022;
- Aisyah Dewi Setyawaty, S.T, M.Si selama 2 tahun sejak 1 Juli 2022.

Selain Koordinator, Subkoordinator dan staf dengan Jabatan Fungsional, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Kepala Bagian juga dibantu oleh Pegawai Non PNS Pendukung dan Konsultan Individual yang direkrut untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada seluruh unsur di Direktorat Jenderal. Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Yudhantoro, S.Pt, M.Pd	Penelaah BMN
2	Erwin, SP	Penyusun Program dan Rencana Anggaran
3	Haerul Anwar, SAP	Penyusun Monev dan Pelaporan

NO	NAMA	JABATAN
4	Haqqi Harisina, S.Kom	Penelaah BMN
5	Patria Trian Setiadi, S.Pd	Penelaah Keuangan
6	Muhammad Jaya AW, SE	Penelaah Keuangan
7	Indriati, A.Md	Penata Keuangan
8	Nurmawati	Pengadministrasi Umum
9	Denny Darmawan	Pengadministrasi Umum
10	Endang Rusmaya	Pengadministrasi Umum
11	Gilang Bayu Perdana, S.Kom, M.M.S.I	Perencana Jaringan Utilitas
12	Sartini, SE	Penelaah Keuangan
13	Suryanah, S.Pd.	Penelaah Tata Naskah Dinas
14	Edi Prastiyo, S.Kom	Penelaah Tata Naskah Dinas
15	Ruri Rumita Maizar, S.Psi	Penelaah Tata Naskah Dinas
16	Khoirul Anwar, S.Sos.I	Penelaah Keuangan
17	Sofian Yusuf Widodo, S.Psi	Analis Karir dan Kompetensi
18	Budianto, SE	Penelaah Keuangan
19	Haryunta Rizky Pratama, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
20	Muhamad Muklis, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
21	Rahmatullah, A.Md	Penata Keuangan
22	Isam Purbaya, A.Md	Penata Urusan Keprotokolan
23	Tatang	Petugas Teknik
24	Suroto	Petugas Teknik
25	Hari Roberto	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
26	Sobirin	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
27	Riki Salman Mubaroq	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
28	Jumadi	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
29	Halimahtus Sadiah	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP

NO	NAMA	JABATAN
30	Putri Asiah	Pengadministrasi Umum
31	Marlinah	Pengadministrasi Umum
32	Shara Vadya, S.I.Kom	Penelaah Pelayanan Informasi Publik
33	Dony Triastomo, SE	Penelaah Advokasi Hukum
34	Insan Hermawanto, SAP	Penelaah Publikasi
35	Andi	Pengadministrasi Umum
36	Dwi Cristianto	Pengadministrasi Umum
37	Komarudin	Pengadministrasi Umum
38	Michael Adha	Pengadministrasi Umum

Tabel 3.11
Daftar Konsultan Individual
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

NO	NAMA	Bidang Pekerjaan
1	Joko Pitono, ST	Konsultan Individual Bidang Monev Kinerja Anggaran
2	Diane Khatrin Tri Asih, SE	Konsultan Individual Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Kurtubi, ST	Konsultan Individual Bidang Penyusunan Dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran
4	Mohamad Iqbal, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Penyusunan Dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran
5	Didik Pramono, S.PD	Konsultan Individual Bidang Monev Kinerja Anggaran
6	Singgih Zatomi, SH	Konsultan Individual Bidang Pengelolaan Administrasi Anggaran
7	Arfan Haras, Spi, MM	Konsultan Individual Bidang Manajemen Aset
8	Disa Tafira Raimalda, SH	Konsultan Individual Bidang Hukum
9	Iva Parikhah, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Komunikasi
10	Stephanes M. Anugrah. R, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Fotografi

NO	NAMA	Bidang Pekerjaan
11	Sopan Sopian, S.Sn	Konsultan Individual Bidang Fotografi
12	Fahmi Nurhuda, S.Ds	Konsultan Individual Bidang Desain Grafis
13	Adzra Vabiant Purwanti, S.Ikom	Konsultan Individual Bidang Komunikasi
14	Sri Andriyani, SH, M.Si	Konsultan Individual Bidang Reformasi Birokrasi
15	Gema Milda Hidayati, S.Pd	Konsultan Individual Bidang Pembinaan SDM
16	Zahrah Fadhilah Nindita, ST	Konsultan Individual Bidang Kelembagaan
17	Khoirul Mu'minin, S.Tr.T	Konsultan Individual Bidang Kepegawaian
18	Sunardi	Konsultan Individual Bidang Terampil Kelistrikan
19	Afandi	Konsultan Individual BidangTerampil Teknisi/ Mekanik
20	Maisara Humaira Yandari , ST	Konsultan Individual Bidang Pengelolaan Administrasi Anggaran

B. Sarana dan Prasarana

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menempati ruang kerja yang terletak di Lantai 2, Ruangan Wing 1, Wing 2 dan Wing 3, Gedung A Jalan Raden patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja, baik berupa barang fisik (*hardware*) maupun non fisik *(software)*. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya.

Rekap Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2022 yaitu tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Rekap Daftar Barang Ruangan
Lantai 2 Wing 1
(Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Perencanaan Program dan Keuangan)

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	AC Sentral-Cassette	5
2	AC Split	5
3	Air Cleaner	1
4	Camera Digital	3
5	Camera Video	3
6	Exhause Fa	1
7	Kitchen Set	1
8	Kursi Besi/Metal	9
9	Kursi Fiber Glas/Plastik	31
10	Lemari Besi/Metal	1
11	Lemari Es	1
12	Lemari Kayu	4
13	Meja Kerja Kayu	5
14	Meja Rapat	1
15	Nakas	6
16	Notebook	3
17	Pc Unit	6
18	Printer	7
19	Rak Kayu	1
20	Scanner	1
21	Televisi	1
Total		**96**

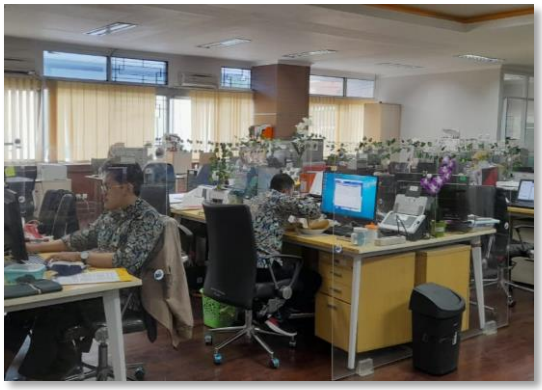

Gambar 3.6

Lantai 2 Wing 1
(Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Perencanaan Program dan Keuangan)

Tabel 3.13
Rekap Daftar Barang, Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 wing 1

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Ac Sentral-Cassette	1
2	Cubikal	1
3	Focusing Screen/ Layar LCD Proyektor	1
4	Kursi Fiber Glas/ Plastik	25
5	Lcd Proyektor/ Infocus	1
6	Meja Rapat	1
7	Nakas	1
8	White Board	1
Total		**32**

Gambar 3.7

Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 1

Tabel 3.14
Rekap Daftar Barang Ruangan
Lantai 2 Wing 2
(Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)

No.	Nama Barang	Jumlah
1	AC Sentral-Cassette	6
2	AC Split	2
3	AC Split	1
4	Air Cleaner	2
5	Alat Penghancur Kertas	2
6	Camera Digital	1
7	Dispenser	1
8	Exhause Fan	1
9	Filing Cabinet/Metal	2

No.	Nama Barang	Jumlah
10	Kitchen Set	1
11	Kursi Besi/Metal	3
12	Kursi Fiber Glas/Plastik	16
13	Lampu Blitz Kamera	1
14	Lemari Besi/Metal	4
15	Lemari Es	2
16	Lemari Kayu	5
17	Lensa Camera	2
18	Meja Kerja Kayu	5
19	Meja Rapat	1
20	Meja Resepsionis	2
21	Meja Resepsionis/Meja Kaca Kotak	1
22	Meubelair Lainnya	12
23	Nakas	5
24	Notebook	1
25	Pc Unit	6
26	Printer	4
27	Rak Kayu	1
28	Scanner	2
29	Tablet Pc	1
30	Televisi	4
31	White Board Electronic	1
Total		**98**

Gambar 3.8
Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2

Tabel 3.15
Rekap Daftar Barang di Ruang Rapat Lantai 2 Wing2

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	AC Sentral-Cassette	2
2	Air Cleaner	1
3	Camera Conference	1
4	Cubikal	1
5	Dispenser	1
6	Focusing Screen/Layar Lcd Proyektor	1
7	Kursi Fiber Glas/Plastik	30
8	Lcd Proyektor/Infocus	1
9	Meja Rapat	1
10	Pc Unit	1
11	Televisi	2
	Grand Total	**42**

Gambar 3.9

Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2

Tabel 3.16
Rekap Daftar Barang Ruangan
Lantai 2 Wing 3 (Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum)

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	AC Sentral-Cassette	5
2	AC Split	3
3	Acces Control System	4
4	Air Cleaner	1
5	Alat Penghancur Kertas	2
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2
7	Camera Digital	4
8	CCTV	4
9	Cubikal	21
10	Cubikal/Satpam	2
11	Electrik Thermometer/Samping Satpam	2
12	Exhause Fan	1
13	Filing Cabinet	2
14	Finger Printer Time And Attandance Acs	2
15	Kitchen Set	1
16	Kursi Besi/Metal	9
17	Kursi Besi/Metal (Swab)	8
18	Kursi Fiber Glas/Plastik	36
19	Lemari Besi/Metal	5
20	Lemari Es	1
21	Lemari Kayu	5
22	Lensa Camera	3
23	Locker	2
24	Meja Kerja Kayu	30
25	Meja Komputer	2
26	Meja Komputer/P3k	1
27	Meja Makan Kayu	1
28	Meja Makan Kayu (Swab)	2
29	Meja Resepsionis/Satpam	2
30	Mesin Barcode	8
31	Meubelair Lainnya/Sofa	1
32	Nakas	3
33	Notebook	20
34	Pc Unit	27
35	Pintu Elektrik	6
36	Printer	14
37	Rak Kayu	1
38	Scanner	5
39	Softboard/Samping Lift Belakang	1
40	Televisi	5
41	Unit Remote Control	4
42	Wirelss	1
Total		**259**

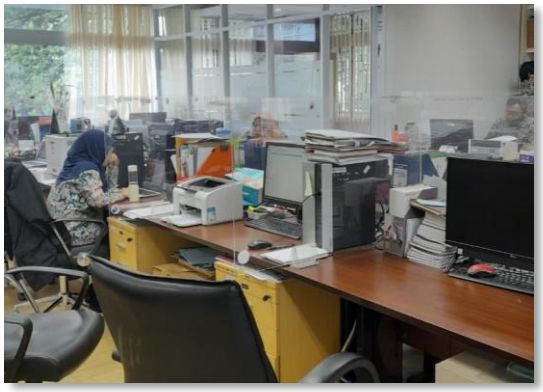

Gambar 3.10
Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum
Lantai 2 Wing 3

Tabel 3.17
Rekap Daftar Barang di Ruang Rapat 1
Lantai 2 Wing 3

No.	Nama Barang	Jumlah
1	AC Sentral-Cassette	2
2	Cubikal	1
3	Focusing Screen/Layar Lcd Proyektor	1
4	Kursi Fiber Glas/Plastik	48
5	Meja Rapat	1
6	Mic Conference	1
7	Nakas	1
8	Televisi	1
Total		**56**

Gambar 3.11

Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3

Tabel 3.18

Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 2, Lantai 2 Wing3

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	AC Sentral-Cassette	1
2	Air Cleaner	1
3	Cubikal	1
4	Focusing Screen/Layar Lcd Proyektor	1
5	Kursi Fiber Glas/Plastik	22
6	Lcd Proyektor/Infocus	1
7	Meja Rapat	1
8	Nakas	1
9	White Board	1
Total		**30**

Gambar 3.12
Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3

Tabel 3.19

Rekap Daftar Barang Ruang Rapat 3, Lantai 2 Wing 3

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	AC Sentral-Cassette	1
2	Focusing Screen/Layar Lcd Proyektor	1
3	Kipas Angin	2
4	Kursi Besi/Metal	2
5	Mesin Jilid	2
6	Rak Besi	20
Grand Total		**28**

Gambar 3.13
Ruang Rapat 3 Lantai 2 Wing 3
(Dimanfaatkan Menjadi Ruang Arsip Pegawai)

Tabel 3.20

Rekap Daftar Barang Ruang Atrium, Mushola dan Laktasi

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	AC Split	1
2	Acces Control System	8
3	CCTV	5
4	Cubikal/Satpam	4
5	Electrik Thermometer/Samping Satpam	4
6	Finger Printer Time And Attandance Acs	4
7	Kursi Besi/Metal	2
8	Kursi Besi/Metal (Swab)	8
9	Kursi Fiber Glas/Plastik	8
10	Lemari Es	1
11	Lemari Kayu	4
12	Locker	3

No.	Nama Barang	Jumlah (Buah)
13	Meja Makan Kayu (Swab)	2
14	Meja Resepsionis/Satpam	4
15	Mesin Barcode	14
16	Pintu Elektrik	10
17	Softboard/Samping Lift Belakang	1
18	Televisi	5
19	Wirelss	1
Total		**89**

Gambar 3.14
Atrium, Mushola & Laktasi Lantai 2 Gedung A1

Catatan:

Rincian sarana dan prasarana tertera dalam ***Lampiran 4*** *pada Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.*

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan lelang Barang Milik Negara secara daring (online) melalui laman *www.lelang.go.id* berupa Lelang Kendaraan Operasional (KDO) di tahun 2022 sebanyak 8 kendaraan roda 4 (empat) dan 2 kendaraan roda 2 (dua) pada tanggal 21 September 2022 Adapun Daftar Barang Milik Negara yang dilelang tersebut tertera pada Lampiran 1 Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022.

C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022

Anggaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni Bagian Anggaran (BA) 033. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang yang tercantum dalam Renstra DJPI 2020 - 2024, yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaran Pembiayaan.

Pada awal Tahun Anggaran 2022 yang terbit pada tanggal 17 November 2021 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp83.802.133.000,00 *(delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)*, dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).* Sepanjang Tahun Anggaran 2022 terjadi 3 kali revisi yang mempengaruhi perubahan anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu pada Revisi DIPA ke 5, 6 dan 8.

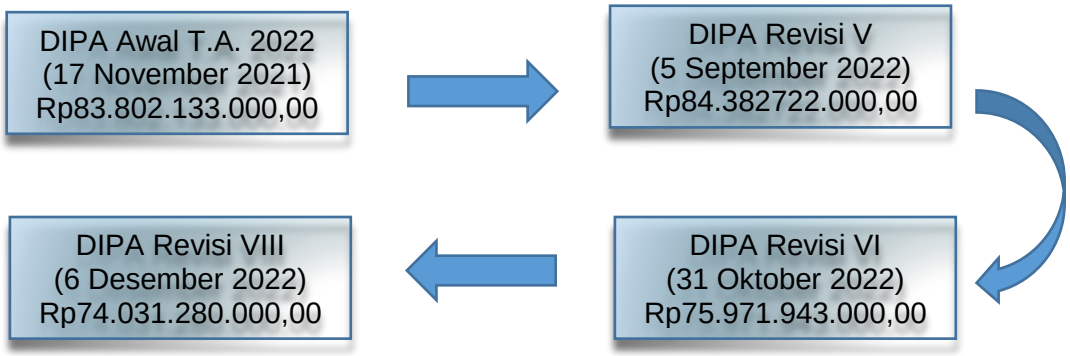

Gambar 3.15
Alur Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sepanjang Tahun Anggaran 2022

Rincian Revisi DIPA sepanjang Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, DIPA Revisi 5 terbit tanggal 5 September 2022 disebabkan oleh adanya Penambahan Anggaran untuk memfasilitasi Likuidasi BLU PPDPP dan pergeseran anggaran antar KRO, dimana terdapat tambahan paket kegiatan baru yaitu: Penatausahaan dan pengelolaan BMN eks PPDPP, Penataan Arsip PPDPP, Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP, Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU serta Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP. Adapun total pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp84.382722.000,00 *(delapan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah),* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp79.312.882.000,00 *(tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);*
2. Kedua, DIPA Revisi 6 yang terbit tanggal 31 Oktober 2022 disebabkan oleh adanya penambahan anggaran untuk memfasilitasi paket kegiatan baru yaitu Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *(Creative Infrastructure Financing (CreatIFF)*: Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan serta adanya pergeseran anggaran antar KRO dan Pergeseran *Automatic Adjustment* Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PI. Adapun total pagu anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp75.971.943.000,00 *(tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp70.799.902.000,00 *(tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah);*
3. Ketiga, DIPA 8 yang terbit tanggal 6 Desember 2022 yang disebabkan oleh adanya pengurangan pagu RO Layanan Perkantoran (4194.EBA.994) pada paket pekerjaan pembayaran gaji dan tunjangan serta pergeseran anggaran antar KRO. Adapun total pagu untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp74.031.280.000,00 *(tujuh puluh empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar

Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*

Catatan:

Rincian DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 tertera dalam ***Lampiran 3*** *pada Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pencapaian kinerja tahun 2022 ini, merupakan umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan 21 (dua puluh satu) komponen (output kegiatan), yaitu :

1) Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi
2) Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi
3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai
4) Jumlah Laporan Plaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip
5) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan
6) Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum
7) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama
8) Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
9) Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
10) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan

11) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN
12) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat
13) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi
14) Jumlah Laporan Keuangan
15) Jumlah Laporan Kinerja
16) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
17) Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran
18) Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
19) Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
20) Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan
21) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 4.1
Capaian Kinerja TA. 2022
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
Sesuai Cascading Renstra DJPI Tahun Anggaran 2020-2024

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	**15%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%)	**10%**	Tata Kelola TNDE dan Arsip	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	**100%**	1	2	200%	**16,9%**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%)	**10%**	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	**50%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	**100%**	1	2	200%	
				Kerumahtanggaan	**50%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	**100%**	2	3	150%	
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	**15%**	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	**100%**	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	**100%**	1	1	100%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	**15%**	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	**100%**	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	**100%**	1	1	100%	
		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	**15%**	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	**100%**	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	**100%**	1	1	100%	
		Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	**15%**	Gaji dan Tunjangan DJPI	**100%**	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	**100%**	1	1	100%	
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan	**10%**	Opersionalisasi Kantor DJPI	**100%**	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	**100%**	1	1	100%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
		dengan target (10%)									
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)	**10%**	Opersionalisasi Kantor Direktorat	**100%**	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	**20%**	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	**20%**	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	**20%**	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	**20%**	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	**20%**	1	1	100%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	**15%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%)	**30%**	Advokasi Hukum	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	**100%**	2	2	100%	**15,0%**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	**20%**	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	**100%**	1	1	100%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	**50%**	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	**100%**	3	1 2	100%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	**10%**	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)	**25%**	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	**100%**	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	**100%**	1	1	100%	**10,0%**
		Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)	**25%**	Manajemen Transformasi Organisasi	**100%**	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	**100%**	2	2	100%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)	**50%**	Pengelolaan Pegawai	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	**100%**	3	3	100%	
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	**10%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%)	**50%**	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	**50%**	Jumlah Laporan Monev DJPI	**100%**	1	1	100%	**17,5%**
				Laporan Keuangan Eselon I	**50%**	Jumlah Laporan Keuangan	**100%**	1	4	400%	

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingankan dengan target (50%)	**50%**	Laporan Kinerja Unit Eselon II	**100,00%**	Jumlah Laporan Kinerja	**100%**	1	1	100%	
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	**15%**	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	**50%**	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	**100%**	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	**100%**	3	3	100%	**15%**
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	**10%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	**50%**	Strategi Komunikasi	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	**100%**	2	2	100%	**10,0%**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	**50%**	Publikasi	**100%**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	**100%**	2	2	100%	

Pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	71,54	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
SK. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	75,00	84,4
IKK.Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,90
IKK Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	17,5
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR sebesar 71,54% serta mendukung Sasaran Kegiatan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target sebesar 75% yang terbagi dalam 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dimana realisasi mencapai 84,4% karena adanya tambahan paket kegiatan pada IKK 1 dan IKK 4 dengan rincian sebagai berikut:

1) IKK 1, Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dimana Capaian Kinerja pada IKK 1 yaitu sebesar 16,9% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15%, hal ini disebabkan oleh adanya tambahan 4 paket kegiatan baru yang menambah output dan meningkatkan capaian kinerja keseluruhan di IKK 1. Paket Kegiatan yang terdapat pada IKK 1 yaitu:
   - Penatausahaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta Arsip Aktif dan Inaktif Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan;
   - Peningkatan Layanan Kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran;
   - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
   - Pelaksanaan Renovasi;
   - Pembayaran gaji dan tunjangan;
   - Administrasi PPK;
   - Operasional Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (SSB-BUM);
   - Operasionalisasi Satuan kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Operasional Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Operasional kegiatan perkantoran dan pimpinan;
   - Pengadaan Pakaian Dinas pegawai/satpam/sopir;

- Perbaikan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
- Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10;
- Langganan Daya dan Jasa;
- Pengadaan Jasa *Cleaning Service;*
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PSSPP;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPSDA;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP.

Adapun tambahan sebanyak 4 Paket Kegiatan Baru pada IKK 1 yaitu sebagai berikut:

- Penatausahaan dan pengelolaan BMN eks PPDPP;
- Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (*Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF)) : Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan
- Penataan Arsip PPDPP;
- Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP.

2) IKK 2, Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan capaian kinerja 15,00%. Paket Kegiatan yang terdapat pada IKK 2 yaitu:
   - Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Pembinaan Kerjasama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022;
   - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022;
   - Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan Produk Hukum Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.
3) IKK 3, Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 10,00%. Paket Kegiatan yang terdapat pada IKK 3 yaitu:
   - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   - Penyelenggaraan Administrasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;

- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrutur PU dan Perumahan.

4) IKK 4, Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dimana Capaian Kinerja pada IKK 4 yaitu sebesar 17,5% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15% hal ini disebabkan oleh adanya tambahan 2 paket kegiatan baru yang menambah output dan meningkatkan capaian kinerja keseluruhan di IKK 4. Paket Kegiatan yang terdapat pada IKK 4 yaitu:
   - Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2022;
   - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2022;
   - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Setditjen PI TA.2022;
   - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

   Adapun tambahan sebanyak 3 Paket Kegiatan Baru pada IKK 4 adalah sebagai berikut:
   - Penyusunan Laporan Manajemen Risiko;
   - Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP;
   - Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP.

5) IKK 5, Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur sebesar 15,00%. Paket Kegiatan yang terdapat pada IKK 5 yaitu:
   - Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA.2023;
   - Penyusunan Pengelolaan Administrasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022;
   - Pembinaan Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

6) IKK 6, Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik sebesar 10,00%. Paket Kegiatan yang terdapat pada IKK 6 yaitu:
   - Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022;
   - Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022;
   - Dokumentasi Pimpinan dan Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2022.

B. Perbandingan Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2021

- Alokasi DIPA awal Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal yaitu sebesar Rp67.094.305.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), terdapat 5 (lima) kali perubahan total pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2021 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 8 tanggal 2 November 2021 yang disebabkan oleh adanya adanya penambahan pagu dari Direktorat PPISDA yang dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI dengan pagu anggaran sebesar Rp71.341.555.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar 63,35% dari target sebesar 63,35% sehingga pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR kinerjanya mencapai 100%;
- Realisasi Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp66.168.509.000,00 (enam puluh enam milyar serratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan progress keuangan sebesar keuangan 94,25% dan fisik 100% (status *ie*-Monitoring Online pada tanggal 10 Januari 2021);
- Pelaksanaan cara bekerja belum kembali normal akibat masih adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di sepanjang bulan Juni sampai dengan September sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Beberapa kegiatan yang belum kembali normal diantaranya adalah pelaksanaan rapat, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis/ pelatihan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka secara langsung beralih menjadi pertemuan virtual online melalui video conference;
- Refocusing dan *Realokasi* Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di sepanjang Tahun Anggaran 2021:

- Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2022 tanggal 12 Januari 2020 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 yang menginstruksikan kepada seluruh elemen Pemerintahan dalam mengatasi dampak Pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan adanya Perubahan Pagu Anggaran di Lingkungan DJPI termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- *Refocusing* dan Realokasi Anggaran yang bersumber dari Belanja Barang dan Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2022 menyebabkan terjadinya perubahan rencana kegiatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

b. Tahun Anggaran 2022

- Alokasi DIPA awal Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp83.802.133.000,00 *(delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)* dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah),* selama Tahun Anggaran 2022 terdapat 3 (tiga) kali perubahan dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 8 tanggal 6 Desember 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp74.031.280.000,00 *(tujuh puluh empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)* dimana dari pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),* Revisi DIPA tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan pagu Rincian Output (RO) Layanan Perkantoran pada paket pekerjaan pembayaran gaji dan tunjangan;
- Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bulan Desember 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja T.A. 2022 adalah 84.40%. Terdapat 2 IKK yang memiliki capaian diatas target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
  - IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

(capaian 16.90% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15%) yang disebabkan oleh adanya tambahan 4 paket kegiatan baru yang menambah output dan meningkatkan capaian kinerja keseluruhan di IKK 1. Adapun tambahan Paket Kegiatan Baru pada IKK 1 yaitu: Penatausahaan dan pengelolaan BMN eks PPDPP, Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (*Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF)) : Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan, Penataan Arsip PPDPP serta Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP;

- IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (capaian 17.50% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15%). Penambahan paket kegiatan baru pada kedua IKK tersebut memberikan dampak berupa penambahan bobot pada capaian setiap IKK sehingga meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara keseluruhan. Adapun tambahan 2 Paket Kegiatan Baru pada IKK 4 yaitu: Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP (paket kegiatan baru) serta Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP (paket kegiatan baru).

- Realisasi Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp67.939.194.000,00 *(enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)* dari pagu setditjen sebesar Rp68.781.137.000,00 00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau* dengan progres keuangan sebesar keuangan 98,78% dan fisik 99,06% (status ie-Monitoring Online pada tanggal 17 januari 2023).

C. Realisasi Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki total anggaran awal sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)*, terdapat 3 (ltiga) kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2022 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 8 tanggal 6 Desember dengan pagu anggaran sebesar Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)*.

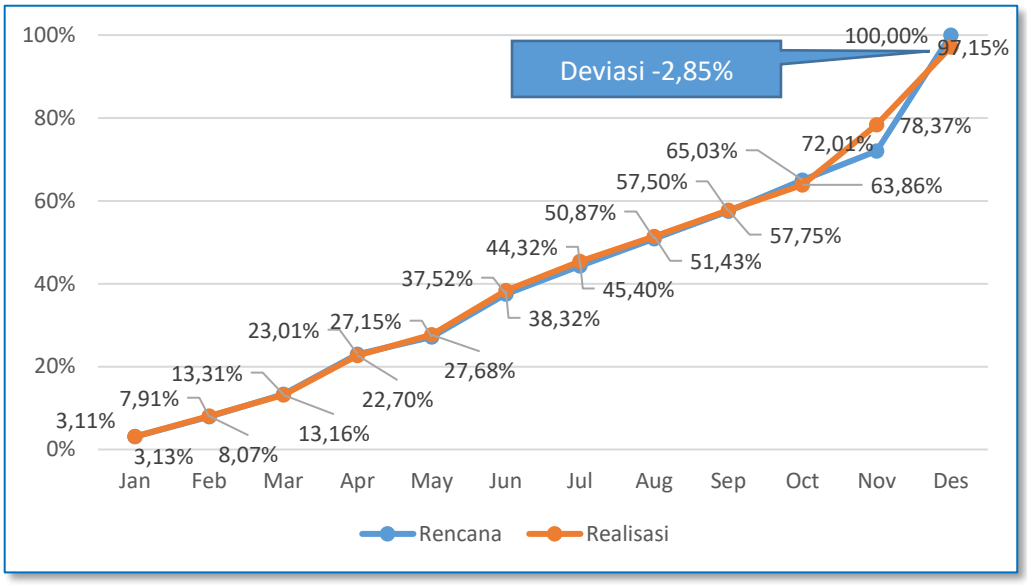

Gambar 4.1
Grafik Kurva S Realisasi Keuangan
(status ie-Monitoring Online pada tanggal 17 januari 2023)

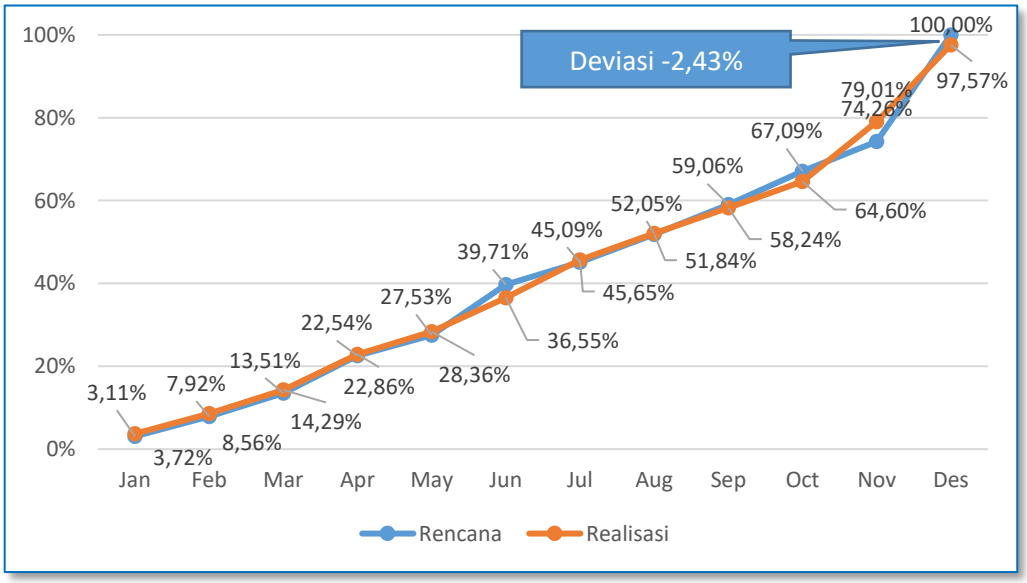

Gambar 4.2
Grafik Kurva S Realisasi Fisik
(status ie-Monitoring Online pada tanggal 17 januari 2023)

Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk SekretariatDirektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu realisasi Keuangan sebesar Rp67.339.194.000,00 *(enam puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)* dari pagu sebesar Rp68.781.137.000,00 00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau* dengan progres keuangan sebesar 98,78% (deviasi sebesar -1,22) dan progress fisik 99,06% (deviasi sebesar -0,94) (status ie-Monitoring Online pada tanggal 17 januari 2023).

Realisasi anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sumber : ie-Monitoring Online tanggal 17 Januari 2023

No.	Kegiatan/ IKK	Pagu (Rp1000)	Realisasi (Rp1000)	Capaian
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	61.340.387	60.720.414	98,99
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.014.070	973.970	96,05
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.325.000	1.318.147	99,48
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.313.628	1.226.574	93,37
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.653.537	1.653.248	99,98
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	2.134.515	2.046.841	95,89
	Total	68.781.137	67.939.194	98,78

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Anggaran untuk per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Selama Tahun Anggara 2022, IKK (1) sebesar 98,99%, IKK (2) sebesar 96,05%, IKK (3) sebesar 99,48%, IKK (4) sebesar 93,37 IKK (5) sebesar 99,98% dan IKK (6) adalah sebesar 95,89%.

Sementara untuk Realisasi anggaran Per Komponen yang ada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran Per-Komponen
Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sumber : ie-Monitoring Online tanggal 17 Januari 2023

IKK	Komponen	Pagu (Rp1000)	Realisasi (Rp1000)	Capaian
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	327.448	326.554	99,73
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	658.273	658.094	99,97
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	889.822	865.878	97,31
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	612.457	601.807	98,26
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	2.404.208	2.398.400	99,76
	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	742.979	724.084	97,46
	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	34.205.420	33.814.763	98,86
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	21.499.780	21.330.834	99,21
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	126.000	122.071	96,88
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	123.870	117.041	94,49
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	764.200	734.858	96,16

IKK	Komponen	Pagu (Rp1000)	Realisasi (Rp1000)	Capaian
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	302.049	297.020	98,34
	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	442.951	442.682	99,94
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	580.000	578.445	99,73
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Monev DJPI	254.919	254.840	99,97
	Jumlah Laporan Keuangan	845.696	758.794	89,72
	Jumlah Laporan Kinerja	213.013	212.940	99,97
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	548.440	548.436	100,00
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	1.105.097	1.104.812	99,97
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	804.768	796.602	98,99
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	1.329.747	1.250.239	94,02
Total		68.781.137	67.939.194	98,78

D. Kinerja Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR, serta mendukung Sasaran Kegiatan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target sebesar 75% yang terbagi dalam 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Tahun Anggaran 2022 mendapat tambahan 7 Paket Kegiatan baru sehingga menambah capaian kinerja menjadi 84,4%, melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020 -2022. Adapun Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Laporan Manajemen Risiko

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung penyenggraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melaksanakan penyelenggaraan Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di kementerian PUPR.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

Mengingat pentingnya peran Manajemen Risiko tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkomitmen untuk menyelenggarakan Manajemen Risiko secara sistematis, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian dari tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di Lingkungan kerjanya masing-masing. Adapun Ruang Lingkup Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu: Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Kepegawaian dan Umum.

Kondisi Penerapan Manajemen Risiko di Setditjen

a. Adanya pembentukan tim sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 01/KPTS/Dp/2022 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
b. Pada Tahun 2022 terdapat 8 Pernyataan Risiko UPR T2 (Unit Pemilik Risiko Tingkat 2) Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti dalam table berikut:

Tabel 4.5
Pernyataan dan Kategori Risiko

No	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko
1	Ketidaksesuaian Standar Ukuran Gedung Perkantoran	Risiko Layanan
2	Tidak Terpenuhinya Kualitas Infrastruktur Layanan Internet di DJPI.	Risiko Layanan
3	Penuntasan Tindak Lanjut Auditor Eksternal dan Internal yang berlarut-larut.	Risiko Reputasi
4	Keterlambatan Penyelesaian Proses Perjanjian Kerja Sama.	Risiko Layanan
5	Terkendalanya Pejabat Fungsional Dalam Mengumpulkan Angka Kredit.	Risiko Layanan
6	Terhambatnya Proses Penataan Arsip Eks Kemenpera	Risiko Layanan
7	Kurang Lengkapnya Data Dukung Administrasi pada Evaluasi Manajemen Risiko	Risiko Kinerja
8	Terhambatnya Proses Penanganan Pengaduan	Risiko Reputasi

a. Atas profil risiko tersebut progress mitigasi risiko sampai dengan triwulan IV seperti dalam table berikut:

Tabel 4.6
Nilai Risiko

No	Pernyataan Risiko	Nila Risiko Setelah Pengendalian Eksisting	Nilai Risiko Aktual s.d Triwulan IV
1	Ketidaksesuaian Standar Ukuran Gedung Perkantoran	25	25
2	Tidak Terpenuhinya Kualitas Infrastruktur Layanan Internet di DJPI.	24	11
3	Penuntasan Tindak Lanjut Auditor Eksternal dan Internal yang berlarut-larut.	23	6
4	Keterlambatan Penyelesaian Proses Perjanjian Kerja Sama.	23	1
5	Terkendalanya Pejabat Fungsional Dalam Mengumpulkan Angka Kredit.	22	2

No	Pernyataan Risiko	Nila Risiko Setelah Pengendalian Eksisting	Nilai Risiko Aktual s.d Triwulan IV
6	Terhambatnya Proses Penataan Arsip Eks Kemenpera	22	2
7	Kurang Lengkapnya Data Dukung Administrasi pada Evaluasi Manajemen Risiko	19	2
8	Terhambatnya Proses Penanganan Pengaduan	13	6

Masih terdapat 2 pernyataan risiko yang masih memiliki nilai di atas garis toleransi (>10)

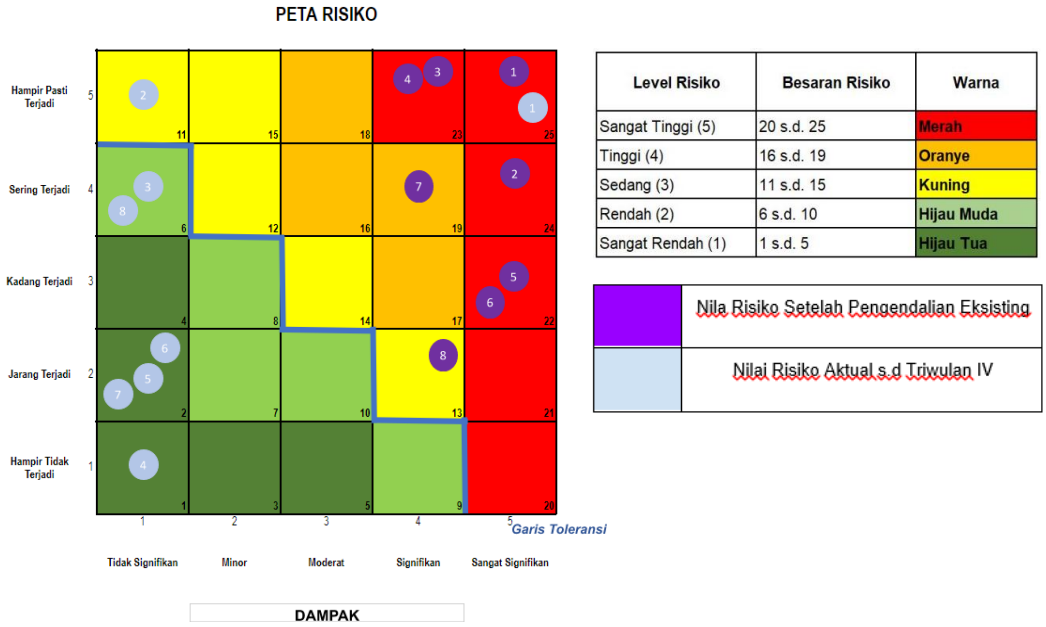

Gambar 4.3
Grafik Peta Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022

b. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut terkait Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- Beberapa kendala yang terjadi sebagai berikut:
  - Profil Risiko belum seluruhnya menggambarkan risiko strategis karena belum mempertimbangkan sasaran program dan sasaran kegiatan pada Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam proses penyusunannya;
  - Data dukung pelaksanaan inovasi pengendalian belum berupa dokumen formal sehingga tidak dapat dilampirkan sebagai bukti pelaksanaan inovasi pengendalian;

- Pemahaman Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum merata sehingga terdapat kesulitan pada proses penyusunan profil risiko.

- Rencana Tindak Lanjut Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Setditjen
  - Pelaksanaan perumusan lingkup, konteks, dan kriteria bersama dengan Direktorat PSSPP sebagai tahap awal proses penyusunan profil risiko.
  - Penyusunan *Loss Event Database* (LED) untuk memetakan masalah yang pernah terjadi di lingkungan Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu rujukan identifikasi risiko;
  - Berkoordinasi dengan pemilik kegiatan terkait data dukung pelaksanaan inovasi pengendalian yang belum sesuai;
  - Berkoordinasi dengan Subdirektorat Kepatuhan Intern Dit.PSSPP, Biro Keuangan, dan Inspektorat Jenderal dalam seluruh proses penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

- Adapun 2 pernyataan risiko yang masih memiliki nilai resiko tinggi (di atas garis toleransi/ batas resiko yang bisa diterima) akan dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:
  - Ketidaksesuaian Standar Ukuran Gedung Perkantoran, akan ditindaklanjuti dengan:
    - Permintaan bukti dukung atas inovasi pengendalian yang dilakukan di triwulan IV;
    - Risiko masuk ke dalam dokumen profil risiko 2023 karena inovasi pengendalian masih berlanjut.
  - Keterlambatan Penyelesaian Proses Perjanjian Kerja Sama, akan ditindaklanjuti dengan:
    - Pembahasan dengan pemilik kegiatan terkait inovasi pengendalian yang tidak dapat dilakukan.

2) Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP

Sesuai amanat pasal 43 ayat 2 PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Tabungan Perumahan Rakyat bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) termasuk salah satu sumber Dana Tapera. Oleh karena itu, pada 1 November 2021, pengelolaan FLPP telah beralih dari Satker PPDPP (BA.999.03.984532) ke BP Tapera. Dengan demikian maka Satuan Kerja PPDPP sebagai satker PPDPP pada BA 033.16.631021 yang bertugas meyalurkan FLPP, dilikuidasi. Mekanisme

pengalihan dana FLPP tersebut, mengacu pada PMK Nomor 111 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan dari PPDPP kepada badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Penarikan Kembali Dana FLPP. Selanjutnya, untuk memastikan layanan tetap berjalan, pemerintah menegaskan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana FLPP pada PPDPP kepada BP TAPERA. Dalam Keputusan ini, disebutkan pengalihan fungsi ini diikuti dengan pengalihan sistem tata kelola pegawai profesional/non aparatur sipil negara dan seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud (teknologi).

Sebagai kelanjutan dari dilikuidasi-nya Satker PPDPP BA.999.03.984532, maka Satuan Kerja Pendukung Operasional Penyaluran FLPP pada BA.033.16.631021 juga dilakukan llikuidasi pada TA. 2022. Dimana likuidasi dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/KMK.05/2022 tentang Pencabutan Status Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Proses Likuidasi Satker PPDPP terkait Barang Milik Negara (BMN):

a. Tanggal 24 November 2021, telah dilakukan serah terima aset tetap kondisi baik dan rusak ringan dari Satker BLU PPDPP BA.033.16.631021 kepada Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan BA.033.16.631003 sesuai BAST BMN Nomor 1172/BA/Pg.KPA/2021 – Nomor 168/BAST/SATKER-PI/2021 yang meliputi 1102 NUP dengan catatan:
   - Nilai perolehan Rp18.488.523.485,00
   - Nilai penyusutan Rp11.410.900.932,00
   - Nilai buku Rp7.077.622.553,00.
b. Tanggal 2 Desember 2021, telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan BP Tapera Nomor 10/PKS/Dp/2021 – Nomor 2/PKS/BPTPR/I/12/2021 tentang Operasionalisasi Sementara Barang Milik Negara (BMN) Aset Utama Pendukung Langsung Layanan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan BMN Lainnya yang meliputi 1102 NUP dengan catatan:
   - Nilai perolehan Rp18.488.523.485,00
   - Nilai penyusutan Rp11.410.900.932,00
   - Nilai buku Rp7.077.622.553,00.
c. Tanggal 8 Juni 2022, telah dilakukan serah terima aset tidak berwujud (BAST ATB) berupa Hak Cipta atas Aplikasi SiKasep dan lain-lain senilai

Rp2.850.000,00 sesuai BAST Nomor 1182/BA/Pg.KPA/2022 – No.37/BAST/SATKER-PI/2022;

d. Pada tahun 2022, telah dilakukan 4 kali lelang terhadap keseluruhan aset lain lain senilai Rp4.454.651.235,00 yang meliputi aset tetap kondisi rusak berat Rp1.599.354.535,00 dan aset tetap renovasi Rp2.855.857.200,00.

Terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Likuidasi BLU-PPDPP sebagai berikut:

a. Penyelesaian LHP BPK 38A/HP/XVI/05/2012 terhambat karena sudah terlalu lama (>10 tahun) dan kesadaran pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan penyelesaian berupa setoran ke rekening kas negara sangat kurang;
b. Penyelesaian LHP BPK Nomor 21/HP/XVI/01/2013 terhambat karena sudah terlalu lama (>10 tahun), kesulitan melacak keberadaan konsultan dimaksud dan karena kurangnya dokumen berupa invoice sebagai bukti bayar Pph21;
c. Penyelesaian LHP BPK Nomor 43/HP/XVI/05/2014 no reff. X.12.2.a, terhambat karena sudah terlalu lama, sehingga rekomendasi BPK sudah tidak relevan;
d. Tingginya penyelesaian secara jumlah rekomendasi (82,4%) tidak dibarengi dengan penyelesaian temuan yang bersifat nominal (8,9%). Hal ini berarti sebagian besar penyelesaian temuan, hanya pada temuan yang bersifat administrasi.

Tindak Lanjut penyelesaian temuan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK pada Satker PPDPP BA.033.16 dan BA.999.03 dimana total LHP sebanyak 13 dan total rekomendasi sebanyak 68.

a. Penyelesaian LHP Berdasar Jumlah Rekomendasi

Tabel 4.7

Prosentase Penyelesaian LHP Berdasarkan Jumlah Rekomendasi

No.	Status Penyelesaian	Rekomendasi	Prosentase Penyelesaian
1	Sudah Sesuai	56	82,4%
2	Belum Sesuai	6	8,8%
3	Belum Ditindaklanjuti	6	8,8%
Jumlah		68	100,0%

b. Penyelesaian LHP Berdasarkan Nominal Temuan

Tabel 4.8
Prosentase Penyelesaian LHP Berdasarkan Nominal Temuan

No.	Status	Nominal	Prosentase Penyelesaian
1	Telah Ditindaklanjuti	760.644.745,52	8,9%
2	Sedang dan Belum Ditindaklanjuti	7.785.014.710,00	91,1%
Jumlah		8.545.659.455,52	100,0%

Terdapat kendala dalam penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) terkait Likuidasi BLU-PPDPP yaitu sulitnya dilakukan pemetaan ulang atas dokumen penyelesaian LHA Nomor 032 oleh personel eks PPDPP yang saat ini sudah tidak bekerja di Instansi yang sama.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) terkait temuan Inspektorat Jenderal pada Satker PPDPP BA.033.16 dan BA.999.03 dimana total LHA sebanyak 3 dan total rekomendasi sebanyak 29.

a. Penyelesaian LHA Berdasar Jumlah Rekomendasi

Tabel 4.9
Prosentase Penyelesaian LHA Berdasarkan Jumlah Rekomendasi

No.	Status Penyelesaian	Rekomendasi	Prosentase Penyelesaian
1	Telah Ditindaklanjuti	1	3,4%
2	Belum Ditindaklanjuti	28	96,6%
Jumlah		29	100,0%

a. Penyelesaian LHA Berdasar Nominal Temuan

Tabel 4.10
Prosebtase Penyelesaian LHA Berdasarkan Nominal Temuan

No.	Status Penyelesaian	Rekomendasi	Prosentase Penyelesaian
1	Telah Ditindaklanjuti	894.085.000,00	20,6%
2	Belum Ditindaklanjuti	3.442.945.885,00	79,4%
Jumlah		29	4.337.030.885,00

Catatan :

Penyelesaian atas LHA Itjen pada satker PPDPP telah dinyatakan tuntas sebagian sesuai surat Itjen Nomor PW.0202-Ij/1484 tanggal 17 september 2021 (terlampir) yaitu senilai Rp894.085.000,00 dengan setoran ke rekening negara.

3) Infrastruktur Kreatif *(Creative Infrastructure Financing (CreatIFF):* Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan salah satu roda penggerak perekonomian yang perlu terus ditingkatkan demi mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional, yaitu membangun Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur. Dalam memenuhi amanat tersebut tidak terlepas dari kebutuhan dana yang besar, sementara sumber pendanaan APBN sampai dengan tahun 2024 belum dapat mencukupi.

Salah satu strategi penyelesaian *funding gap* pembiayaan infrastruktur, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) sebagai unit yang akan bertugas untuk menangani bidang pembiayaan infrastruktur dengan mencari inovasi pembiayaan selain APBN, seperti KPBU dan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 4.4

Gap Funding Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR

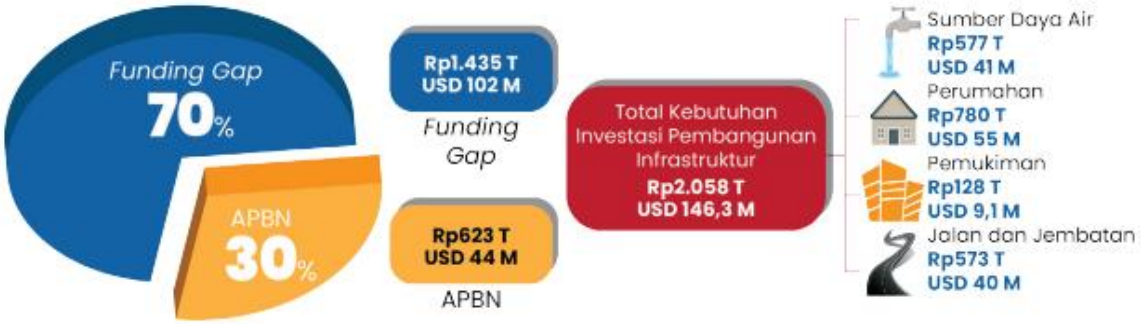

Selaras dengan fokus dan agenda utama Presidensi G20 Indonesia 2022 *"Recover Together, Recover Stronger",* Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap penerapan prinsip keberlanjutan *(sustainability)* dan ketahanan *(resilience)* dalam pembangunan infrastruktur dan investasi, serta menegaskan komitmen dan kebijakan dalam rangka mendukung upaya pengendalian perubahan iklim global melalui target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 untuk kemudian mencapai *net zero emissions* pada tahun 2060.

Dalam mendukung pemenuhan target penyediaan infrastruktur dan menjawab tantangan *funding gap* infrastruktur, serta mendukung agenda Presidensi G20 tersebut, maka diperlukan partisipasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang lebih luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR menginisiasi kegiatan Pembiayaan Infrastruktur Kreatif atau *Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF) yang mengusung tema "Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan".

Maksud dan tujuan kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) diantaranya:

a. Memperkenalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur bidang PUPR
b. Meningkatkan partisipasi para stakeholder dalam pembiayaan infrastruktur PUPR dan perumahan
c. Menyebarluaskan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian PUPR yang menangani bidang pembiayaan infrastruktur dan perumahan dengan pembiayaan kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu meningkatnya partisipasi dan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan para *Stakeholders* dalam rangka pemenuhan *funding gap* pembiayaan infrastruktur bidang PUPR, dimana penerima manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, BUMN/D Dalam Negeri/ Luar Negeri, Badan Usaha, Investor, Pengembang, Generasi Muda Kementerian PUPR, akademisi dan masyarakat umum di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun ruang lingkup kegiatan ini yaitu meliputi: pelaksanaan konferensi pers, pelaksanaan kompetisi *call for policy brief*, pelaksanaan webinar series sekotr sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan serta pelaksanaan hari puncak CreatIFF.

Kegiatan CreatIFF (*Creative Infrastructure Financing* / Pembiayaan Infrastruktur Kreatif) Tahun 2022, dengan tema "Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan" terlaksana dengan lancar dan baik. Sehingga dapat mencapai tujuan sebagaiman tersebut di atas, hal tersebut, dapat dilihat dari terus meningkatnya peserta kegiatan webinar series dan secara total, terdapat 270 peserta yang datang secara *luring* di Auditorium Kementerian PUPR pada Hari Puncak CreatIFF serta siaran kegiatan CreatIFF yang telah berhasil ditonton

sebanyak 28,445 kali oleh 9,074 user CNBC Indonesia dari berbagai medium. Selain itu dilihat dari kinerja publisitas, kegiatan ini cukup banyak menjangkau masyarakat pengguna media sosial dari berbagai *platform*.

4) Paket Kegiatan lain yang ditambahkan di Tahun Anggaran 2022

Selain 3 Paket Kegiatan di atas terdapat pula penambahan 4 Paket Kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk memfasilitasi adanya Likuidasi Badan Layanan Umum Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP). Adapun 4 Paket Kegiatan tersebut yaitu:

- Penatausahaan dan pengelolaan BMN eks PPDPP;
- Penataan Arsip PPDPP;
- Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP.
- Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal sepanjang Tahun Anggaran 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan Kegiatan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.11

Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun Anggaran 2022

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
1	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan: • Penyemprotan disinfektan di semua ruangan unit kerja	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
	• Pelaksanaan Test Swab Antigen dan PCR Test • Pemberian penambahan daya tahan tubuh dengan vitamin secara berkala	
2	Pemeliharaan dan perawatan sarana kantor DJPI secara rutin	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
3	Piket rutin Satuan Pengamanan (Sabtu dan Minggu) di Gedung DJPI	
4	Rapat Pembahasan Perpanjangan Waktu KAK Reviu Cost of Fund Atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2022 di 1O1 Dharmawangsa	
5	Rapat Pemutakhiran data eHRM di lingkungan Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 18 Mei 2022 di Balai Irigasi Bekasi	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
6	FGD Penatausahaan Aset Utama Pendukung Layanan (AUPL) Tak Berwujud Non Barang Milik Negara tanggal 19 Mei 2022 di 1O1 Dharmawangsa	
7	Penyelenggaraan *assesment* pegawai non ASN berupa psikotes di lingkungan DJPI tanggal 19-20 Mei 2022 di RR DJPI lt 9	
8	Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pelaksanaan Anggaran Triwulan 2 TA. 2022 di RR Setditjen pada tanggal 10 Juni 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
9	Sharing Session Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Pendampingan Pengisian Capaian Output (CO) di Hotel Sotis pada tanggal 16 Juni 2022	
10	Rapat Pengelolaan kearsipan dan implementasi tata naskah dinas di lingkungan DJPI di Hotel Aston Bogor pada tanggal 22 Juni 2022	
11	Rekonsiliasi Pra Reviu Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Semester I TA.2022 di lingkungan DJPI di Hotel Horison Ciledug pada tanggal 13 Juli 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
12	Permohonan pendapat hukum (*legal opinion)* atas pembayaran *Cost of Fund* atas dana talangan FLPP Tahun 2019 di Hotel The 1O1 Darmawangsa, pada tanggal 18 Juli 2022	
13	FGD Penyiapan Sistem Pemantauan Penanganan Pelayanan Informasi DJPI di Hotel Margo, Depok pada tanggal 22 Juli 2022	
14	Meliput kegiatan Akad Kredit Massal KPR Bersubsidi di Perumahan BSS Bukit indah Kapuk, Mares Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
15	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai tahun 2022 berdasarkan permen PAN RB No.6 tahun 2022 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung pada tanggal 26-27 Juli 2022	
16	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK bagi Pegawai Non PNS di Lingkungan DJPI tanggal 1-3 Agustus 2022 di RR Lt.9 DJPI	
17	Pembahasan Reviu Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2022 di Hotel Veranda Jakarta	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
18	FGD Optimalisasi Konten Media Sosial Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 5-6 Agustus 2022 di Hotel Vega	
19	Rapat Koordinasi Penerimaan Pengembalian Aset BMN dari BP.TAPERA Dan Penyiapan Data Dukung RKBMN TA 2024 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 15 Agustus 2022	
20	Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Menteri PUPR tentang Pembubaran Tata Kelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Hotel Tuscany Boutique Tangerang Selatan pada tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
21	*Exit Meeting Reviu Cost of Fund* atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 di Hotel Horison Ultimate Riss Malioboro Yogyakarta dan *Zoom Meeting* tanggal 19 Agustus 2022	
22	Rapat Pembahasan Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur di Hotel Royal Dharmo-Jogyakarta pada tanggal 23 s/d 26 Agustus 2022	
23	Rapat Tindak Lanjut Penyusunan dan Penajaman RKA K/L Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2023 di Ruang Rapat 1, DJPI, tanggal 2 September 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
24	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Mingguan Periode Bulan September DJPI 2022 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1 DJPI pada tanggal tanggal 2 September	
25	Rapat persiapan penyusunan peta lintas fungsi pengelolaan kerja sama dan pembiayaan infrastruktur (PUPR-08) di Balai Irigasi Bekasi pada tanggal 5 September 2022	
26	Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Penutup Satker BLU PPDPP BA.033.16.631021 di Hotel Tuscany pada tanggal 7 September 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
27	Pendampingan Proses Pedataan Pegawai Non ASN di ingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9 dan Media Zoom Jl. Raden Patah I No.1`Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal : 20 September 2022	
28	Evaluasi RB dan SAKIP oleh Kementerian PAN RB di Ruang Rapat Pusdatin tanggal 3 Oktober 2022	
29	Kegiatan *Press Conference* dalam rangka *Road to* CreatIFF 2022 yang mengusung tema Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan di Media Center, Kementerian PUPR tanggal 4 Oktober 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
30	Pendampingan dan Reviu Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 Hotel Grand Savero Bogor tanggal 17-19 Oktober 2022	
31	Acara NGOPI (Ngobrol Bareng Dirjen PI) bersama Media di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung A1 DJPI tanggal 21 Oktober 2022	
32	Penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai tahun 2022 melalui e-Kinerja di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Cirebon tanggal 27-28 Oktober 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
33	Peningkatan layanan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Bandung tanggal 3-5 November 2022	
34	Acara Puncak Creative Infrastructure Financing (CreatiFF) Day 2022 di Auditorium PUPR Jakarta tanggal 1 Desember 2022	
35	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Prambahan Gedung A1 Desember tanggal 7 Desember 2022	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
36	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat Setditjen PI tanggal 13 Desember 2022	

D. Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Sebelumnya (2020)

Tabel 4.12
Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan Kinerja	- Menambahkan ukuran atau parameter keberhasilan untuk tujuan/hasil program dan praktik praktik terbaik yang telah dicapai di dalam Renstra; - Menerapkan reward and punishment pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja.	• Setditjen PI TA. 2022 menyelenggarakan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPI secara menyeluruh yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan manajemen risiko pada kegiatan di Unit Organisasi. Dimana kegiatan ini menjadi salah satu tambahan Capaian Kinerja lainnya di Setditjen PI. • Penerapan Reward tunjangan kinerja 100 % untuk PNS yang hadir dan mengisi absen secara penuh dalam sebulan serta punishment (2 % x jumlah hari efektif dalam sebulan) bagi yang tidak melakukan absen kehadiran dan (2 % x jumlah
Pengukuran Kinerja	- Sistem aplikasi pemantauan kinerja yang digunakan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaam kinerja unit kerja; - Perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap indikator kinerja	

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Pelaporan Kinerja	- Informasi yang ada pada laporan kinerja ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi; - Menambahkan perbandingan capaian kinerja dengan instansi setara; - Menambahkan Analisa Manfaat, Analisa Keberhasilan dan Kegagalan apabila ada	hari efektif dalam sebulan) untuk yang tidak mengisi absen pulang; • Sistem aplikasi pemantauan kinerja sudah menggunakan aplikasi online berupa : ie-Monitoring Online, Simpanse, SAKTI, SIMAK, Google Drive serta One Drive • Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra DJPI berlaku selama 5 Tahun Anggaran; • Beberapa Informasi yang ada pada laporan kinerja 2021 sudah ditindaklanjuti dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi di tahun 2022 diantaranya adalah: menambah anggaran Belanja Modal untuk mengakomodir kebutuhan belanja fasilitas/perlengkapan perkantoran dan renovasi gedung walaupun masih belum optimal, penambahan anggaran belanja pegawai (CPNS dan perpindahan 2 PNS Dari PPDPP), Telah Diusulkan ke BKN mengenai kenaikan pangkat Jabatan Fungsional di Setditjen sebanyak 4 rang dengan rincian 2 orang yang memenuhi syarat. • Setditjen PI bersama PPDPP mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR sebesar 63,35% serta Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 100% • Perbaikan berdasarkan rekomendasi Implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2021 dilakukan pada pelaksanaan kegiatan TA. 2022 • Capaian kinerja output di tahun anggaran 2021 sebesar 100% dan
Evaluasi Kinerja	- Hasil rekomendasi belum seluruhnya ditindaklanjuti dan belum ada penjelasan terkait kendala Jika belum dapat ditindaklanjuti	
Capaian Kinerja	- Capaian kinerja output dan outcome perlu ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya - Melakukan koordinasi secara terpadu dengan unit kerja terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal) maupun dari pihak eksternal K/L untuk mencapai sasaran kinerja	

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		tahun anggaran 2022 sebesar 97,57% (per 4 Januari 2023) • Koordinasi secara terpadu dengan unit kerja lain di lingkukan DJPI selalu dilakukan secara berkala dalam beberapa kegiatan antara lain dalam kegiatan: Penyusunan Prognosis, Penyusunan Capaian Output serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI

E. Efisiensi dan Efektivitas

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan efektif dan efisien walaupun ada beberapa hal sebagai berikut:

1) Terdapat Perubahan Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pada awal tahun anggaran 2022 Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp83.802.133.000,00 *(delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)* dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)*. Sepanjang Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kali perubahan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi DIPA Revisi 5 tanggal 5 September 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp84.382.722.000,00 *(delapan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)* dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp79.312.882.000,00 *(tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)* perubahan pagu tersebut disebabkan oleh adanya penambahan anggaran untuk mengakomodasi beberapa paket kegiatan baru yaitu sebagai berikut:
  - Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP,

- Penataan Arsip PPDPP;
- Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP;
- Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP;
- Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP;
- Pelaksanaan Renovasi.

- Alokasi DIPA Revisi 6 tanggal 31 Oktober 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp75.971.493.000,00 *(tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)* dimana dari total anggaran tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp70.799.902.000,00 *(tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)* perubahan pagu tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut:
  - Adanya penambahan anggaran untuk mengakomodasi Paket Kegiatan baru yaitu Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (Creative Infrastructure Financing (CreatIFF)) Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan;
  - Optimasi Anggaran untuk beberapa Paket Kegiatan;
  - Pergeseran *Automatic Adjustment* Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PI;
- Alokasi DIPA Revisi 8 tanggal 6 Desember 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar Rp74.031.280.000,00 *(tujuh puluh empat milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)* dimana dari total pagu tersebut terdapat pagu anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)*, perubahan pagu tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan pagu Rincian Output (RO) Layanan Perkantoran pada paket pekerjaan pembayaran gaji dan tunjangan.

2) Terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Revisi DIPA mengakibatkan adanya perubahan Perjanjian Kinerja selama tahun 2022 sebagaimana kronolologi di bawah:

- **Pertama**, PK awal pada bulan Januari 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun berdasarkan DIPA awal yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp78.802.133.000,00 *(tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)*.

- **Kedua**, PK revisi pertama pada bulan September 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya penambahan anggaran untuk mengakomodasi beberapa paket kegiatan baru yaitu: Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP, Penataan Arsip PPDPP, Operasional Satuan Kerja BLU PPDPP, Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker BA.033.16.631021 Satker BLU PPDPP, Fasilitasi Audit dan Reviu terhadap Satuan Kerja BLU PPDPP serta Pelaksanaan Renovasi. Jumlah Pagu Anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp79.312.882.000,00 *(tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)*
- **Ketiga**, PK revisi kedua pada bulan Oktober 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena ada beberapa hal yaitu: untuk mengakomodasi Paket Kegiatan baru yaitu Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (Creative Infrastructure Financing (CreatIFF)) Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan, Optimasi Anggaran untuk beberapa Paket Kegiatan serta Pergeseran *Automatic Adjustment* Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PI. Jumlah Pagu Anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp70.799.902.000,00 *(tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)*
- **Keempat**, PK revisi ketiga pada bulan Desember 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, disusun karena adanya adanya pengurangan pagu pada Rincian Output (RO) Layanan Perkantoran pada paket pekerjaan pembayaran gaji dan tunjangan. Jumlah Pagu Anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp68.781.137.000,00 *(enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).*

3) Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022

Perumusan,pelaksanaan dan pemantauan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan produk hukum sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan sesuai tugas masing-masing Unit Kerja. Produk hukum yang dirancang dan dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan sesuai tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan Komunikasi Publik agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan sebagai bentuk tanggungjawab Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka menyusun sebuah kebijakan terkait pembiayaan infastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertujuan untuk: melakukan pembinaan produk hukum bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melakukan pendampingan penerapan produk hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta menjaring masukan atas pelaksanaan, Pembinaan dan Pendampingan Produk Hukum Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.

Adapun Produk Hukum Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun sepanjang TA. 2022 telah ditetapkan/ diundangkan adalah sebanyak 9 Peraturan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Produk Hukum Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022

NO.	NO. PERATURAN	JUDUL	DIUNDANGKAN/ DITETAPKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN			
1	Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Tapera yang Mewakili unsur Komisioner	28 Oktober 2022
PERATURAN PRESIDEN			
1	Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan	2 Desember 2022
PERATURAN MENTERI			

NO.	NO. PERATURAN	JUDUL	DIUNDANGKAN/ DITETAPKAN
1	Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2022	Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	26 Agustus 2022
KEPUTUSAN MENTERI			
1	Kepmen PUPR Nomor 18/KPTS/M/2022	Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	11 Januari 2022.
2	Keputusan Menteri PUPR Nomor 189/KPTS/M/2022	Mandat Sebagaian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan Proyek KPBU	2 Maret 2022
3	Keputusan Menteri PUPR Nomor 668/KPTS/M/2022	Sekretariat Komite Tabungan Perumahan Rakyat	29 Juni 2022
4	Keputusan Menteri PUPR Nomor 748/KPTS/M/2022	Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam	22 Juli 2022
5	Keputusan Menteri PUPR Nomor 749/KPTS/M/2022	Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam	22 Juli 2022
6	keputusan Menteri PUPR Nomor 849/KPTS/M/2022	Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam	3 Agustus 2022

Selain dari Produk Hukum yang telah ditetapkan/ dilegalisasi di atas, masih banyak Produk Hukum Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 yang masih dalam proses revisi dan akan dilanjutkan di Tahun Anggaran berikutnya.

4) Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan perumusan kebijakan dan program di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melakukan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan umum dan perumahan, serta bantuan kemudahan pembiayaan perumahan.

Kegiatan Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bermaksud untuk memberikan layanan Informasi kepada masyarakat dan mitra kerja terkait kebijakan maupun program bidang

pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada publik baik internal dan eksternal dengan tujuan yaitu: menjadi sarana untuk menyampaikan informasi melalui kegiatan kehumasan maupun media mengenai program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada masyarakat melalui, memastikan pemerataan informasi bidang pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan dengan menyusun strategi komunikasi dan melakukan penyebarluasan informasi yang telah disiapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap publikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Adapun layanan informasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2022 yaitu menerima dan menjawab pengaduan masyarakat mengenai status aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, Program KPR FLPP, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan permohonan informasi terkait kuota bantuan subsidi. Pengaduan masyarakat yang masuk ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPI sepanjang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) Ke PPID
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022

No.	Media	Jumlah Permohonan	Dipenuhi	Ditolak	Dalam Proses
1	Email	92	53	0	19
2	Medsos	116	89	0	27
3	SPAN Lapor	57	56	0	1
	Total	265	198	0	47

Total permohonan Layanan Informasi pengaduan masyarakat dan mitra kerja ke PPID selama Tahun Anggaran 2022 melalui Email sebanyak 265 aduan, sebanyak 198 aduan telah selesai (tuntas) dan 47 aduan masih dalam proses (berlanjut).

Adapun Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) Ke PPID Tahun Anggaran 2022 secara rinci tercantum dalam table berikut:

Tabel 4.15
Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022
Melalui e-Mail

NO.	Bulan	Permohonan	Status			Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	
1	Januari	4	3	0	1	SBUM, Pengaduan mengenai kondisi rumah subsidi, verifikasi sikasep, permasalahan Aplikasi Sikumbang
2	Februari	13	13	0	0	Verifikasi Sikasep, SBUM, Aplikasi Sikumbang
3	Maret	16	14	0	2	Verifikasi Sikasep, BP2BT, SBUM
4	April	7	7	0	0	Aplikasi Sikasep, Duplikasi Data, SSB, SBUM
5	Mei	4	3	0	1	SK Manfaat, Aplikasi Sikasep, SSB, SBUM, FLPP, BP Tapera
6	Juni	8	4	0	4	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan permohonan informasi terkait kuota bantuan subsidi
7	Juli	10	6	0	4	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, permasalahan rumah subsidi, dan Tapera.
8	Agustus	7	3	0	4	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan informasi terkait aplikasi Sireng.
9	September	3	0	0	3	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan informasi terkait aplikasi Sireng.
10	Oktober	8	5	0	3	Aplikasi Sikasep, SSB, SBUM, BP2BT, KPR FLPP
11	November	7	2	0	5	SBUM, BP2BT, SSB

NO.	Bulan	Permohonan	Status			Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	
12	Desember	5	0	0	5	Aplikasi Sikasep, SSB, SBUM
Total		92	53	0	19	

Tabel 4.16
Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022
Melalui Media Sosial (Instagram)

No.	Bulan	Permohonan	Status			Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	
1	Januari	21	21	0	0	Program KPR FLPP, SBUM, Batasan Harga Jual Tahun 2022, Fasum Rumah Subsidi, Perluasan Bangunan Rumah Subsidi, Subsidi Jendala UMKM (Program Kemenkeu), Aplikasi SiKasep, BP2BT, Pengajuan Proposal Bantuan Dana
2	Februari	7	7	0	0	Aplikasi SiKasep, Informasi Rumah Subsidi, SBUM, KPBU
3	Maret	22	15	0	7	Aplikasi SiKasep, Surat Pemberitahuan terkait Rumah Subsidi, SBUM, SK Rumah Subsidi, BP2BT, Status Keterhunian (Ditjen Perumahan)
4	April	11	2	0	9	Aplikasi Sikasep, KPR FLPP, BP2BT, SSB
5	Mei	2	1	0	1	BP2BT, SP3K
6	Juni	6	3	0	3	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan permohonan informasi terkait kuota bantuan subsidi
7	Juli	4	4	0	0	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, permasalahan rumah subsidi, dan Tapera

No.	Bulan	Permohonan	Status			Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	
8	Agustus	20	20	0	0	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan informasi terkait aplikasi Sireng.
9	September	23	16	0	7	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan informasi terkait aplikasi Sireng.
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
Total		116	89	0	27	

Tabel 4.17
Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke PPID
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2022
Melalui SPAN Lapor

NO.	Bulan	Permohonan	Status			Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	
1	Januari	5	5	0	0	SBUM, Pengembang Bangkrut, Informasi KPR Rumah Bersubsidi, Program Rumah Subsidi, Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Subsidi
2	Februari	6	6	0	0	Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Subsidi, SBUM, Pengembang Nakal
3	Maret	8	8	0	0	Pengembang Nakal, Program Rumah Subsidi, Aplikasi SiKasep, Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Subsidi, SBUM
4	April	6	6	0		Pengajuan Rumah Subsidi, Permasalahan Rumah Subsidi, BP2BT, Kenakalan Pengembang Perumahan Subsidi, Fasilitas dan Prasarana Rumah Subsidi, SBUM
5	Mei	4	4	0	0	Kenakalan Pengembang Perumahan Subsidi,

NO.	Bulan	Permohonan	Status			Alasan / Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Proses	
						Permasalahan Rumah Subsidi
6	Juni	5	5	0	0	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan permohonan informasi terkait kuota bantuan subsidi
7	Juli	4	4	0	0	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, permasalahan rumah subsidi, dan Tapera
8	Agustus	3	3	0	0	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan informasi terkait aplikasi Sireng
9	September	5	5	0	0	Aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, SK Manfaat Penerima BP2BT, kenakalan pengembang dan informasi terkait aplikasi Sireng
10	Oktober	8	8	0	0	Permasalahan Fasilatas dana Prasarana Umum, Developer Bermasalah, Informasi Mengenai Program Subsidi Rumah KPR, Permasalahan Rumah Subsidi
11	November	2	2	0	0	Permasalaha Rumah Subsidi, IMB
12	Desember	1	0	0	1	Sikumbang
Total		57	56	0	1	

5) Usulan Kenaikan Pangkat PNS Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Tahun Anggaran 2022

Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pemutakhiran Data Kepegawaian diharapkan bahwa proses administrasi pegawai pada saat penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian ASN untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu kegiatan pada paket kegiatan ini adalah berupa pengusulan kenaikan pangkat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Tahun Anggaran 2022 telah menyampaikan usulan kenaikan pangkat melalui Aplikasi Bravo PUPR terhadap beberapa PNS ke Badan kepegawaian Nasional sebanyak 33 orang, dimana dari sejumlah itu terdapat PNS yang sudah memenuhi syarat dan dikirim

datanya yaitu sebanyak 13, sedangkan yang belum memenuhi syarat sebanyak 20 orang. Rincian usulan kenaikan pangkat PNS DJPI tertera pada Tabel berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Tahun Anggaran 2022
Tanggal 1 April 2022

NO	Unit Kerja	Diusulkan	Tidak memenuhi Syarat	Kirim ke BKN
1	Setditjen	4	2	2
2	Dit. PSSPP	3	1	2
3	Dit. PPISDA	2	1	1
4	Dit. PPIJJ	5	2	3
5	Dit. PPIP	4	1	3
6	Dit. PPP	4	2	2
TOTAL		22	9	13

Tabel 4.19
Rekapitulasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Tahun Anggaran 2022
Tanggal 1 Oktober 2022

NO	Unit Kerja	Diusulkan	Tidak memenuhi Syarat	Kirim ke BKN
1	Setditjen	5	0	5
2	Dit. PSSPP	1	0	1
3	Dit. PPISDA	1	0	1
4	Dit. PPIJJ	0	0	0
5	Dit. PPIP	1	0	1
6	Dit. PPP	3	0	3
TOTAL		11	0	11

4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana,

Penataan Sistem manajemen ASN,Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Bagian Kepegawaian dan Umum ditugaskan untuk memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun dalam Road Map Refomasi Birokrasi. Dengan terfasilitasinya kegiatan tersebut, diharapkan Reformasi Birokrasi dapat diimplementasikan dan terinternalisasi di setiap unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.

Adapun beberapa poin yang dihasilkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama Tahun Anggaran 2022 diantaranya yaitu:

a. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi dan Rencana Kerja Pokja RB tahun 2022 yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi DJPI;
b. Penyampaian bukti dukung pelaksanaan RB secara elektronik melalui aplikasi rb.pu.go.id.;
c. Hasil Penilaian Mandiri Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur adalah sebesar 35,34 dari 36,30 (97,35%);
d. Pembangunan Zona Integritas di DJPI dimulai dengan dilakukannya pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
e. Sosialisasi *Core Value* ASN Ber-AKHLAK untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi.

5) Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan penataan organisasi beserta tugas dan fungsinya dengan mengikuti dinamisasi pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang ada makin menuntut adanya organisasi yang lebih efisien dan efektif dengan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga output dan outcome yang ditetapkan dapat terlaksanaan dengan optimal dan dengan tata cara sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu maka di instansi pemerintah dituntut untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Hal tersebut perlu diupayakan melalui penguatan kelembagaan organisasi, antara lain dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja, pemantauan dan evaluasi organisasi dan tata kerja, proses bisnis, uraian tugas, pelaksanaan koordinasi dalam menjalankan tugas antar struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Formasi Kebutuhan Pegawai

Tabel 4.20

Output Formasi Kebutuhan Pegawai

No.	Sub Kegiatan	Output
1	Pemetaan Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Peta Jabatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang dijabarkan sampai level sub koordinator
2	Penyusunan formasi kebutuhan JF Analis Pengelolaan Keuangan dan Pranata Keuangan APBN	Pengusulan formasi kebutuhan JF Analis Pengelolaan Keuangan dan Pranata Keuangan APBN sebanyak 36 formasi
3	Penyusunan formasi kebutuhan JF Arsiparis	Pengusulan formasi kebutuhan JF Arsiparis sebanyak 35 formasi kepada Biro Umum
4	Penyusunan formasi kebutuhan JF Penata Kelola Perumahan	Pengusulan formasi kebutuhan JF Penata Kelola Perumahan sebanyak 3 formasi kepada Ditjen Perumahan

b. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tabel 4.21

Output Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

No.	Sub Kegiatan	Output
1	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dokumen analisis jabatan yang mencakup 40 dari 52 JFT dan 13 dari 18 Jabatan Pelaksana serta analisis beban kerja yang mencakup 46 dari 52 JFT dan 13 dari 18 Jabatan Pelaksana. Pengisian analisis jabatan dan analisis beban kerja DJPI pada e-Formasi Kemen PANRB https://formasi.menpan.go.id/

c. Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tabel 4.22
Output Proses Bisnis DJPI

No.	Sub Kegiatan	Output
1	Persiapan penyusunan peta lintas fungsi Pengelolaan Kerja Sama dan Pembiayaan Infrastruktur	Konsep peta proses dan sub proses dari internal DJPI sebagai bahan pembahasan bersama BKO
2	Penyusunan peta lintas fungsi Pengelolaan Kerja Sama dan Pembiayaan Infrastruktur (PUPR-08) bersama BKO sebanyak 5 kali	Peta proses, sub proses dan lintas fungsi Pengelolaan Kerja Sama dan Pembiayaan Infrastruktur (PUPR-08) yang terintegrasi ke dalam proses bisnis Kementerian PUPR

d. Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tabel 4.23
Output Identifikasi Judul SOP

No.	Sub Kegiatan	Output
1	Penyelarasan SOP dengan proses bisnis lintas fungsi Pengelolaan Kerja Sama dan Pembiayaan Infrastruktur (PUPR-08)	Identifikasi sebanyak 31 Judul SOP yang merupakan turunan peta lintas fungsi Pengelolaan Kerja Sama dan Pembiayaan Infrastruktur

e. Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tabel 4.24
Output Kegiatan Uji Beban Terkait JF API

No.	Sub Kegiatan	Output
1	Uji beban kerja JF API tingkat sedang di Surabaya, Jawa Timur	Data beban kerja dan norma waktu JF API di wilayah dengan proyek KPBU tingkat
2	Uji beban JF API tingkat rendah di D.I.Yogyakarta	Data beban kerja dan norma waktu JF API di wilayah dengan proyek KPBU tingkat
3	Penyusunan hasil validasi uji beban dan penyusunan	Berita Acara Validasi Uji Beban Kerja JF API
4	Harmonisasi, penetapan dan pengundangan Rapermen	Berita Acara Harmonisasi, Rapermen PANRB tentang JF API

F. Prestasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sepanjang Tahun Anggaran 2022

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan Peringkat Nilai Hasil pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022 Kementerian PUPR tahun 2022 berdasarkan Surat sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR Nomor : UM202-55/1032 (*Salinan Surat Tercantum di Lampiran 1 laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*)
2) Lomba Seni Budaya, Olah Raga dan Festival Merdeka dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR, sebagai:
   - Juara 1 Lomba Ketangkasan Bela Negara Lempika

Gambar 4.5
Juara 1 Lomba Ketangkasan Bela Negara Lempika dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

- Juara 1 Bulu Tangkis 3 on 3

Gambar 4.6
Juara 1 Bulu Tangkis 3 on 3 dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

- Juara Umum ke-3 PUPR; Juara 2 Beregu; Juara 3 Tunggal Putra

Gambar 4.7
Juara Umum ke-3 PUPR; Juara 2 Beregu; Juara 3 Tunggal Putra dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

3) Perlombaan dalam Rangka Hari Bakti PUPR ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR, sebagai:

- Juara 3 (kategori tenis meja beregu) dan Juara 1 dan 2 (kategori tenis meja tunggal putra)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

SEBAGAI

JUARA III

LOMBA TENIS MEJA KATEGORI BEREGU CAMPURAN

PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-77

Jakarta, 2 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

Gambar 4.8
Juara 3 Kategori Beregu Campuran dalam Rangka Hari Bakti PUPR ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

PATRIA

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

SEBAGAI

JUARA I

LOMBA TENIS MEJA KATEGORI PERORANGAN TUNGGAL PUTRA

PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-77

Jakarta, 2 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

Gambar 4.9
Juara 1 Kategori Perorangan Tunggal Putra dalam Rangka Hari Bakti PUPR ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

RAHAJU SUTJIPTA

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

SEBAGAI

JUARA II

LOMBA TENIS MEJA KATEGORI PERORANGAN TUNGGAL PUTRA

PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-77

Jakarta, 2 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

Gambar 4.10
Juara 2 Kategori Perorangan Putra dalam Rangka Hari Bakti PUPR ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

- Juara 3 Kategori Pamong Lomba Cerdas Cermat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

SEBAGAI

JUARA III

LOMBA CERDAS CERMAT KATEGORI PAMONG

PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-77

Jakarta, 2 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

Gambar 4.11
Juara 3 Kategori Pamong Lomba Cerdas Cermat
dalam Rangka Hari Bakti PUPR ke 77 di Lingkungan Kementerian PUPR

4) Kejuaran Antar Kementerian, *Smash On Drugs* BNN 19-20 Desember 2022 di Balai Diklat BNN, Lido Sukabumi:

- Juara 3 Tennis Meja Beregu Campuran

Gambar 4.12
Juara 3 Kejuaran Antar Kementerian, *Smash On Drugs* BNN di Balai Diklat BNN, Lido Sukabumi 19-20 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2022 dengan baik meliputi capaian administrasi dan penyelesaian fisik, seperti terlihat dalam capaian kinerja indikator kegiatan (*output* kegiatan) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.

Dari pembahasan yang sudah dituangkan dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi capaian kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama Tahun 2022. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

5.2. Permasalahan

1) Pelaksanaan Bela Pengadaan melalui platform DIGIPay belum dapat dilaksanakan di tahun 2022 dikarenakan Sistem DIGIPay Kementerian Keuangan yang dijalankan oleh masing-masing Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah mengalami masalah sehingga belum dapat digunakan;
2) Nilai realisasi keuangan untuk paket Kegiatan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko di akhir TA 2022 adalah 74,82%, rendahnya nilai realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: terdapat beberapa rencana kegiatan yang semula akan diselenggarakan di luar kantor, tetapi menjadi diseleggarakan di dalam kantor, selain itu adanya penyatuan/penggabungan pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi satu yang dikarenakan adanya Narasumber yang sama. Terkait dengan hal tersebut maka perlu untuk dilakukan reviu secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, hal ini sebagai antisipasi akan adanya potensi sisa anggaran di akhir tahun sehingga dapat dilakukan revisi dan realokasi untuk kebutuhan kegiatan yang lain. Langkah ini juga merupakan salah satu upaya yang baik dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekejaan Umum dan Perumahan dalam efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap mengutamakan tercapainya output kegiatan;
3) Beberapa hal terkait penatausahaan Barang Milik Negara dari BLU PPDPP sebagai berikut:
   - Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) karena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada KPKNL Jakarta 3 setelah permohonan ijin prinsip KDO karena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) disetujui oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;

- Dalam proses menunggu persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR (Pengguna Barang) terkait Surat usulan lelang terhadap Barang Milik Negara berupa peralatan kantor sebanyak 142 unit yang telah disampaikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada pada tanggal 22 November 2022.

4) Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait pelatihan selama 20 JPL/tahun per pegawai sesuai PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017, dimana untuk Pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan masih mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya tugas dan proyek pekerjaan yang harus dituntaskan dan di sisi lain pimpinan memberikan arahan agar para pegawai lebih mengutamakan menyelesaikan tugas sehari-hari di kantor.
5) Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan DUPAK yang disebabkan oleh adanya beberapa Pejabat Fungsional yang masih mengalami kesulitan dalam pengumpulan angka kredit karena adanya ketidaksesuaian antara tugas sehari-hari dengan jabatan fungsional yang diemban dimana hal ini berpengaruh terhadap kenaikan pangkat Jabatan Fungsional nya;
6) Diperlukan upaya secara optimal dalam mengatasi beban kerja yang ada di 6 (enam) Unit Kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7) Sekretariat Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum memiliki *tools* (form monitoring dan evaluasi penerapan SOP) sampai dengan saat ini sehingga belum dapat diukur sejauh mana penerapan SOP dilakasnakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
8) Belum adanya internalisasi terkait Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Jafung API) karena Instansi Pembina (Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) masih perlu menyusun beberapa hal berikut:
   - Informasi faktor jabatan untuk penentuan nilai dan kelas jabatan fungsional;
   - Pengusulan dan penetapan tunjangan jabatan fungsional;
   - Penyusunan dan Penetapan Pedoman Formasi oleh Instansi Pembina untuk Instansi Pemerintah.
9) Terdapat kendala dalam pengelolaan Arsip Eks PPDP dan Arsip Eks Kemenpera, dimana untuk Arsip Eks PPDP yang terlaksana baru arsip dari tahun 2010 - 2015 dan Arsip Eks Kemenpera sampai dengan saat masih tersisa 48 *box* yang belum tertata.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang ditugaskan dalam pngelolaan arsip;

10) Terdapat penambahan beberapa kegiatan diluar rencana yang telah ditentukan di awal tahun pada paket kegiatan Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 yang berakibat pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 3 kali menjadi hanya 1 kali sehingga merubah rencana penarikan yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan baru yang muncul di pertengahan tahun tersebut yaitu: NGOPI (Ngobrol Bareng Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) *Press Conference* dalam rangka *Road to* CreatIFF 2022.

5.2. Tindak Lanjut

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti disebutkan di atas maka diperlukan tindak lanjut sebagai langkah perbaikan di kemudian hari. Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Memanfaatkan Bela Pengadaan melalui platform DIGIPay secara maksimal di tahun 2023 sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Keuangan terkait optimalisasi DIGIPay di tahun 2023;
2) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik sesuai kebutuhan dengan menjadikan pelaksanaan anggaran pada Paket Kegiatan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko di tahun 2022 sebagai bahan evaluasi untuk tahun selanjutnya;
3) Langkah-langkah yang perlu dilakukan percepatan dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:
   - Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait Surat Permohonan persetujuan penghapusan BMN berupa KDO karena TGR;
   - Melakukan koordinasi dengan Biro PBMN (Pengelolaan Barang Milik Negara) trkait hasil koreksi yang telah dilakukan serta menyiapkan *flow chart* proses lelang 142 unit BMN.
4) Pejabat Fungsional harus meningkatkan kompetensi terkait jabatan yang melekat dengan cara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Seminar dan sebagainya serta didukung oleh pimpinan dalam penempatan kerja di unit kerja yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya agar dapat mengumpulkan angka kredit sesuai persyaratan sehingga dapat melakukan peta karir jabatan dengan baik;
5) Melakukan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang akurat sesuai dengan beban kerja yang nyata yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai;
6) Perlunya melakukan evaluasi dalam penataan Organisasi/Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi;

7) Perlunya perencanaan dalam penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai sebagai upaya efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di Lingkungan Setditjen PI untuk pengadaan ASN yang sesuai dengan beban kerja organisasi, tugas dan fungsi serta pengembangan karier Pegawai;
8) Melakukan evaluasi kelembagaan berdasar indikator penguatan kelembagaan melalui penyusunan naskah akademik dan usulan perubahan organisasi ke Badan Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (BKO);
9) Harus dibuat *tools* (form monitoring dan evaluasi penerapan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)
10) Beberapa hal yang perlu dilakukan terkait belum adanya internalisasi terkait Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Jafung API):
    - Melaksanakan sosialisasi PermenPAN-RB No. 44 tahun 2022 tentang Jafung API serta Pedoman Perhitungan Foemasi;
    - Melakukan penyusunan Juklak dan Juknis Jafung API;
    - Melaksanakan inpassing/ penyesuian ke dalam Jafung API;
    - Melaksanakan pembuatan Sistem Informasi Jafung API.
11) Beberapa hal yang perlu dilakukan tidak lanjut dalam pengelolaan Arsip Eks PPDP dan Arsip Eks Kemenpera yaitu sebagai berikut:
    - Menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang ditugaskan dalam pengelolaan arsip;
    - Menugaskan kepada para pelaksana tugas kearsipan ke Gedung Kintaka-Citeureup untuk melakukan penataan arsip.
12) Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran yang dapat mengantisipasi adanya kegiatan yang muncul di pertengahan tahun agar tersedia anggarannya;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tahun Anggaran

2022

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

BUKU LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2019

LAMPIRAN 1

1) Dokumen Perjanjan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2022

a. Dokumen Perjanjian Kinerja yang terbit pada awal bulan Januari tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp78.802.133.000,00

JAKARTA, JANUARI 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

b. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 yang terbit pada bulan Oktober 2022

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp79.312.882.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

c. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 yang terbit pada bulan November 2022

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp70.799.902.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

d. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 yang terbit pada bulan Desember 2022

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp68.781.137.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**SUDIRO ROI SANTOSO**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR: 04 /BA/Ps /2022

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 1 Gedung A1 telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022, Rapat pembahasan dimaksud untuk menghasilkan kesepakatan mengenai capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		Capaian
		Rp1.000,00	Rp1.000,00	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	3.625.438	3.537.916	100	98%	100%	99%	99%
2	Bagian Kepegawaian dan Umum	6.301.914	6.234.870	100	99%	100%	100%	100%
3	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	3.148.585	3.020.811	100	96%	100%	97%	97%
4	Layanan Perkantoran	55.705.200	55.145.597	100	99%	100%	100%	100%
TOTAL		**68.781.137**	**67.939.194**	**100%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**

2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	16,9%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	17,5%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 31 Desember 2022

Yang Menyepakati,

Kepala Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Dessy Nina Wulandari	Anggoro Widyastika	Bambang Adhityo, SE

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sudiro Roi Santoso

2) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022

a. Dokumen DIPA Setditjen PI Awal yang terbit pada bulan Januari tahun 2022

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0839-0078-7800-0940

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	42,00	Rumah Tangga	1.770.000.000
Rincian Output	:	01 QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	42.00	Rumah Tangga	1.770.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			156.107.841.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			83.802.133.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan	79.352.133.000
Rincian Output	:	01 EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	550.000.000
		02 EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	850.000.000
		03 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	2.200.000.000
		04 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	800.000.000
		05 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	900.000.000
		06 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	250.000.000
		07 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	73.802.133.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0839-0078-7800-0940

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang	600.000.000
Rincian Output	:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen	2.850.000.000
Rincian Output	:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	1.650.000.000
		02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Dokumen	700.000.000
		03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	500.000.000

b. DIPA Setditjen PI Revisi ke-5 yang terbit pada tanggal 5 September 2022

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7446-3601-6734-3717

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	13.672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	13672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			228.365.885.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			84.382.722.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan	79.032.798.000
Rincian Output	: 01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	718.573.000
	02	EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	973.379.000
	03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	2.200.000.000
	04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	800.000.000
	05	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	974.372.000
	06	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1,00	Layanan	126.621.000
	07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	73.239.853.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7446-3601-6734-3717

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,00	Unit	1.450.000.000
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	1.000.000.000
	02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang	600.000.000
Rincian Output	: 01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen	3.299.924.000
Rincian Output	: 01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,00	Dokumen	1.650.000.000
	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,00	Dokumen	700.000.000
	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2,00	Dokumen	949.924.000

c. DIPA Setditjen PI Revisi ke-6 yang terbit pada tanggal 31 Oktober 2022

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9355-5399-0014-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	13.672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	13672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000

Program	: 033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	216.163.265.000
Kegiatan	: 4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	75.971.493.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP	
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP	

Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan	68.664.684.000
Rincian Output	: 01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	658.273.000
	02	EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	888.070.000
	03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	2.134.515.000
	04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	725.000.000
	05	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.237.270.000
	06	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	126.000.000
	07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	62.895.556.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9355-5399-0014-6900

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,00	Unit	3.759.644.000
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	2.894.208.000
	02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	865.436.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang	580.000.000
Rincian Output	: 01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	580.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen	2.967.165.000
Rincian Output	: 01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	1.618.084.000
	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Dokumen	467.932.000
	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	881.149.000

d. DIPA Setditjen PI Revisi ke-8 yang terbit pada tanggal 6 Desember 2022

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		13.672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Rincian Output	:	01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	13672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				208.484.308.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				74.031.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7,00	Layanan	66.724.471.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	658.273.000
		02	EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	888.070.000
		03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	2.134.515.000
		04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	725.000.000
		05	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	1.237.270.000
		06	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1,00	Layanan	126.000.000
		07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	60.955.343.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		3,00	Unit	3.759.644.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	3.016.665.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	742.979.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		260,00	Orang	580.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	580.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Dokumen	2.967.165.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,00	Dokumen	1.618.084.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,00	Dokumen	467.932.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2,00	Dokumen	881.149.000

3) Daftar Sarana dan Prasarana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

Tabel Rekap Barang BMN di Gedung A1

No.	Nama Barang	Jumlah
1	A.C. Sentral	21
2	A.C. Split	16
3	Acces Control System	3
4	Access Point	3
5	Air Cleaner	9
6	Alat Penghancur Kertas	8
7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2
8	Camera Adaptor	1
9	Camera Conference	7
10	Camera Digital	9
11	Camera Video	2
12	CCTV - Camera Control Television System	3
13	Cubikal	79
14	Dispenser	2
15	Electrik Thermometer	2
16	Exhause Fan	3
17	Filing Cabinet Besi	4
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6
19	Handy Cam	1
20	Handy Talky (HT)	16
21	Kipas Angin	2
22	Kitchen Set	3
23	Kursi Besi/Metal	108
24	Kursi Fiber Glas/Plastik	234
25	Kursi Kayu	4
26	Lampu Blitz Kamera	1
27	Lap Top	3
28	LCD Projector/Infocus	9
29	Lemari Besi/Metal	23
30	Lemari Es	6
31	Lemari Kayu	19
32	Lensa Kamera	7
33	Meja Kerja Kayu	92
34	Meja Komputer	1
35	Meja Makan Kayu	14
36	Meja Rapat	29
37	Meja Resepsionis	4
38	Mesin Barcode	4
39	Mesin Jilid	2
40	Meubelair Lainnya	19

No.	Nama Barang	Jumlah
41	Mic Conference	1
42	Monitor	2
43	Nakas	21
44	Network Cable Tester	1
45	Note Book	40
46	Oven Listrik	1
47	P.C Unit	58
48	Peralatan Jaringan Lainnya	2
49	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41
51	Rak Besi	20
52	Rak Kayu	2
53	Router	2
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15
55	Softboard	1
56	Sound System	1
57	Switch	1
58	Tablet PC	9
59	Televisi	16
60	Tripod Camera	2
61	Unit Remote Control	5
62	Voice Recorder	1
63	White Board	6
64	White Board Electronic	2
65	Wireless	1
	Total	1034

Tabel Rekap Barang BMN di Gedung A2

No.	Nama Barang	Jumlah
1	A.C. Split	17
2	Acces Control System	2
3	Access Point	7
4	Air Cleaner	1
5	Alat Penghancur Kertas	10
6	Camera Conference	1
7	Camera Digital	6
8	CCTV - Camera Control Television System	3
9	Cubikal	47
10	Filing Cabinet Besi	13
11	Firewall	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
13	Handy Talky (HT)	4
14	Kursi Besi/Metal	55
15	Kursi Fiber Glas/Plastik	122
16	Laci Box	2

No.	Nama Barang	Jumlah
17	Laser Pointer	6
18	Lemari Besi/Metal	34
19	Meja Kerja Kayu	64
20	Meja Rapat	3
21	Meubelair Lainnya	3
22	Mini Komputer	5
23	Monitor	2
24	Nakas	5
25	Note Book	22
26	P.C Unit	39
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36
28	Rak Besi	126
29	Rak Kayu	1
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	21
31	Server	1
32	Switch	1
33	Tablet PC	8
34	Televisi	6
35	Unit Power Supply	1
36	Voice Recorder	9
	Total	685

Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 2

Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lantai 2 Wing 1

Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3

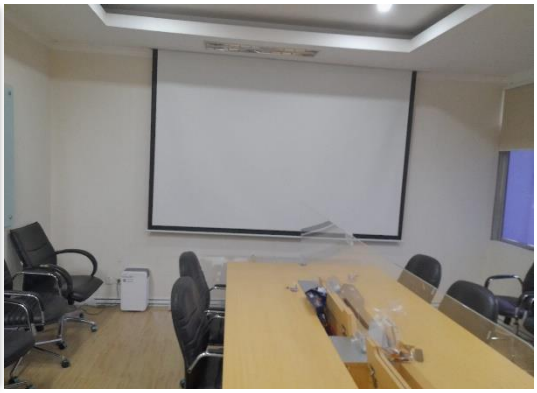

Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3

Pojok Informasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Loby Gedung A1 Lantai 1

Atrium Lantai 2

Ruang rapat Lantai 9

Lapangan Gateball Lantai 9

Ruang Laktasi Lantai 2

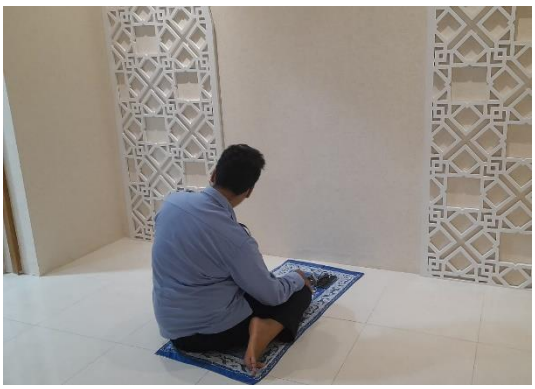

Mushola
di Gedung A1 dan A2

Toilet di Gedung A1

Table *Time Line* Proses Pelaksanaan Lelang Kendaraan Operasional Kantor (KDO)
Berupa (8 Kendaraan Roda Empat dan 2 Kendaraan Roda Dua)
Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun Anggaran 2022

No.	Proses	Tanggal
1	Persiapan Awal : ND 40/ND/Ps.1/2022 dan ND 41/ND/Ps/2022 (Melengkapi Checklist)	9-10 Februari 2022
2	SK Panitia Penghapusan : 113/KPTS/SATKER-PI/2022	2 Maret 2022
3	Rapat Kordinasi Nilai Limit : BA 17/BA/SATKER-PI/2022	6 April 2022
4	Surat KaSatker ke Sesditjen : UM.01.02.-SATKER-PI/212 (Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan melalui penjualan)	27 April 2022
5	Surat Ses Ditjen ke Sekjen Permohanan Persetujuan berupa Izin Prinsip PS.0501-Ps/367	10 Mei 2022
6	Izin Prinsip Sekjen a.n Menteri PUPR (Pengguna Barang) hal Izin Prinsip Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Satuan Kerja Pembiayaan Ifrastruktur PU dan Perumahan Nomor PS.0401-Mn/1175	28 Juni 2022
7	Permohonan Persetujuan Pengelola Barang/Kemenkeu Surat Kasatker Nomor UM.01.02-SATKER-PI/172 Hal Permohonan Persetujuan Pemindahdatangan/Penjualan KDO Surat Kuasa Pengguna Barang	30 Juni 2022
8	Persetujuan Pengelola Barang/Kemenkeu Terkait Pemindahtanganan KDO Surat Nomor S-138/MK.6/KNL.0703._2022	13 Juli 2022
9	Surat Permohonan Lelang Nomor UM.01.02/SATKER-PI/407/2022	20 Juli 2022
10	Upload Dokumen Permohonan Lelang pada website lelang.go.id	20 Juli 2022
11	E Tiket Lelang	20 Juli 2022
12	Penetapan Jadwal Lelang KPKNL Jakarta III Surat S-1332/KNL.0703/2022 Penetapan Jadwal Lelang	22 Agustus 2022
13	Penetapan Pemenang Lelang	21 September 2022
14	Serah Terima BAST 10 Kendaraan Dinas Operasional	22 Sept - 28 Sept 2022
15	Risalah Lelang Nomor 592/72/2022	29-Sep-22
16	SK Penghapusan Daftar BMN dan Penghapusan BMN dari SAKTI 542/KPTS/SATKER-PI/2022	7 Oktober 2022

Lelang Kendaraan Operasional Kantor (KDO) Berupa (8 Kendaraan Roda Empat dan 2 Kendaraan Roda Dua)
Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022
Tanggal 21 September 2022

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Taksiran Nilai Limit Terendah (Rp.)	Total Nilai Jual dan Bea Lelang (Rp.)
1	3020101003	1	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1431 SQO	2011	148.200.000	58.000.000	83.000.031,00
2	3020101003	2	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1406 SQO	2011	148.200.000	56.000.000	80.466.779,00
3	3020101003	3	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1427 SQO	2011	148.200.000	52.000.000	87.730.200,00
4	3020101003	4	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1407 SQO	2011	148.200.000	55.000.000	80.488.199,00
5	3020101003	5	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B 1410 SQO	2011	148.200.000	56.000.000	82.869.227,00
6	3020101003	6	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1408 SQO	2011	148.200.000	56.000.000	87.730.200,00
7	3020101003	7	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1409 SQO	2011	148.200.000	50.000.000	86.200.200,00
8	3020101003	8	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3 G/ MT B.1428 SQO	2011	148.200.000	56.000.000	80.027.159,00
9	3020104001	1	Sepeda Motor	Honda NC110AIC.AT B 6520 SQW	2011	14.400.000	3.500.000	5.507.988,00
10	3020104001	2	Sepeda Motor	Honda NC110AIC.AT B 6539 SQW	2011	14.400.000	3.800.000	6.731.999,00
	Total					**1.214.400.000**	**446.300.000**	**680.751.982,00**

Salinan Surat sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR Nomor : UM202-55/1032 tentang Peringkat Nilai Hasil pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022 Kementerian PUPR Tahun 2022 untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : UM0202-Sj/1032 Jakarta, 21 Desember 2022
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) buku
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian PUPR Tahun 2022

Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal,
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal,
3. Para Sekretaris Badan,
4. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Di Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Internal
   a. Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Dasar pelaksanaan Pengawasan Kearsipan tahun 2016 s.d tahun 2019 oleh Arsip Nasional RI (ANRI)
   b. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Dasar pelaksanaan Pengawasan Kearsipan tahun 2020 s.d sekarang oleh Tim Eksternal ANRI dan Tim Kearsipan Internal Kementerian PUPR.
2. Pengelolaan kearsipan yang menjadi obyek penilaian meliputi unsur :
   a. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, meliputi : Tata Naskah Dinas; Klasifikasi Arsip; Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; Jadwal Retensi Arsip (JRA); Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif; Pedoman Pengolahan Arsip Inaktif; Pedoman Penyusutan Arsip; Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
   b. Program Kearsipan;
   c. Pengolahan Arsip Inaktif;
   d. Penyusutan Arsip;
   e. SDM Kearsipan;
   f. Kelembagaan; dan
   g. Prasarana dan Sarana Kearsipan.
3. Hasil pengawasan pengelolaan kearsipan Kementerian PUPR
   a. Tahun 2019 nilai **83,75 (Memuaskan)**. Tahun 2020 nilai **90,89 (Sangat Memuaskan)**.Tahun 2021 nilai **82,85 (Memuaskan)**. Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2022 masih menunggu pengumuman dari ANRI.
   b. Terdapat penurunan nilai mulai Tahun 2021 yang antara lain disebabkan adanya perubahan sistem penilaian yaitu dengan ditambahkannya hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian PUPR (bobot 40%), hasil pengawasan eksternal ANRI (bobot 60%), dan aspek reform yang berpengaruh terhadap hasil akhir nilai pengawasan kearsipan.

c. Nilai...

-2-

   c. Nilai pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada kementerian/lembaga. Mulai tahun 2019, nilai hasil pengawasan kearsipan sudah menjadi salah satu indeks penilaian Reformasi Birokrasi.
   d. Dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal ke Unit Kerja, Tim Pengawas menggunakan instrumen pengawasan dari ANRI yang berlaku untuk seluruh K/L.
4. Kementerian PUPR pada tahun 2022, sesuai dengan SK Menteri PUPR Nomor 437/KPTS/M/2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian PUPR telah melakukan Pengawasan Kearsipan Internal di Kementerian PUPR dengan obyek pengawasan sebanyak 40 Unit Kerja yang berlokasi di Kantor Pusat Pattimura dan Raden Patah serta unit kerja di Pasar Jumat. Hasil penilaian Pengawasan Kearsipan Internal berupa Laporan Audit Kearsipan Internal Kementerian PUPR Tahun 2022, sebagaimana terlampir.
5. Beberapa catatan atas hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022, antara lain:
   a. Unit Kerja belum taat terhadap peraturan kearsipan, mulai dari penciptaan arsip hingga penyusutan.
   b. Unit Kerja belum rutin memberkaskan arsip aktif; lebih banyak fokus di arsip inaktif.
   c. Unit Kerja belum rutin melakukan penyusutan arsip, terutama pemindahan arsip dari Unit Kerja ke Sekretariat Unit Organisasi.
   d. Belum terpenuhinya jumlah ideal sumber daya manusia kearsipan.
   e. Kompetensi sumber daya manusia kearsipan masih terbatas, termasuk banyaknya petugas pengolah arsip yang belum pernah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan.
   f. Belum terpenuhinya standar minimal sarana kearsipan yang sesuai dengan ketentuan.
6. Diharapkan tiap-tiap unit kerja dapat memperbaiki kekurangan dan/atau melengkapi dengan lebih baik lagi pengolahan kearsipan di unit kerjanya. Hasil audit kearsipan internal tahun 2022, akan dilakukan monitoring pada tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196810211996031001

Tembusan:
1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Kepala Arsip Nasional RI.
3. Kepala Biro Umum Kementerian PUPR.

- 3 -

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : UM0202-$5/1052
Tanggal: 21 Desember 2022

Peringkat Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Obyek Pengawasan	Nilai	Kategori
1.	Biro Umum	91,90	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Biro Keuangan	89,65	A (Memuaskan)
3.	Sekretariat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	86,93	A (Memuaskan)
4.	Sekretariat Ditjen Perumahan	85,74	A (Memuaskan)
5.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	84,09	A (Memuaskan)
6.	Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air	83,47	A (Memuaskan)
7.	Direktorat Air Minum	81,80	A (Memuaskan)
8.	Direktorat Sanitasi	71,23	BB (Sangat Baik)
9.	Sekretariat Ditjen Bina Marga	69,96	B (Baik)
10.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	69,05	B (Baik)
11.	Direktorat Irigasi dan Rawa	68,40	B (Baik)
12.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	68,24	B (Baik)
13.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	67,95	B (Baik)
14.	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	62,12	B (Baik)

LAMPIRAN 2

4) Foto Dokumentasi Kegiatan Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022

A. Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Mercure Tangerang BSD City tanggal, 16-17 Maret 2022

Pembagian Tugas dan Penyusunan Rencana Kerja Tim RB
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Ruang Rapat Lantai 9 Tanggal 1 April 2022

Sosialisasi Core Value BerAHKLAK
di Amanuba Hotel & Resort Rancamaya Bogor tanggal 8 April 2022

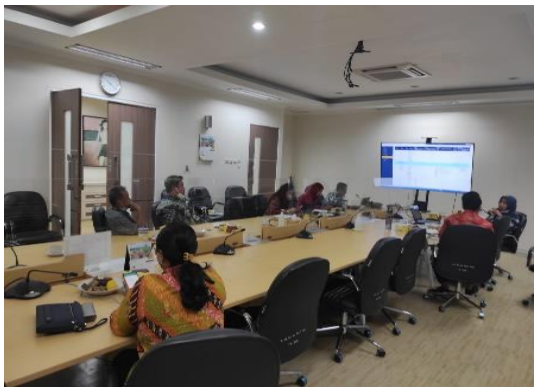

Lanjutan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2022
di Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3, tanggal 10 Juni 2022

Rapat Koordinasi Pengajuan Pelaksanan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di Ruang Rapat Lantai 9 tanggal 10 Juni 2022

Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK Bagi PNS, Non PNS dan KI
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Lantai 9 tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 2022

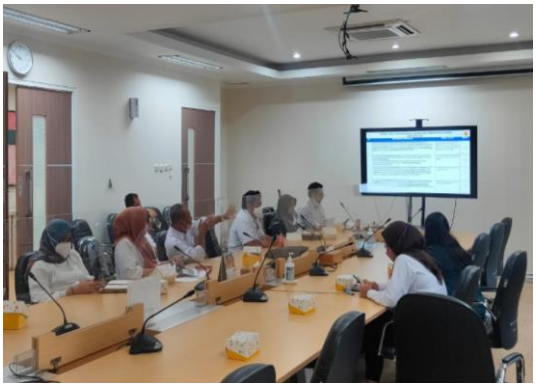

Persiapan Penialaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur PU dan Perumahan
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 1 September 2022

Rapat Pelaksanaan Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2022
Di Lingkungan Kementerian PUPR
di Ruang Rapat Pusdatin Kementerian PUPR tanggal 3 Oktober 2022

Rapat Penyelarasan Standar Operasional Prosedur dengan Peta Proses Bisnis Lintas Fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, tanggal 19-20 Oktober 2022

- Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

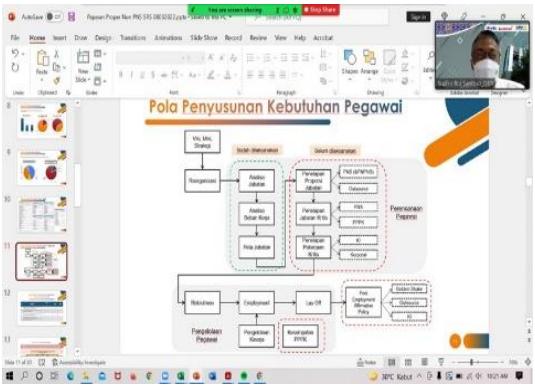

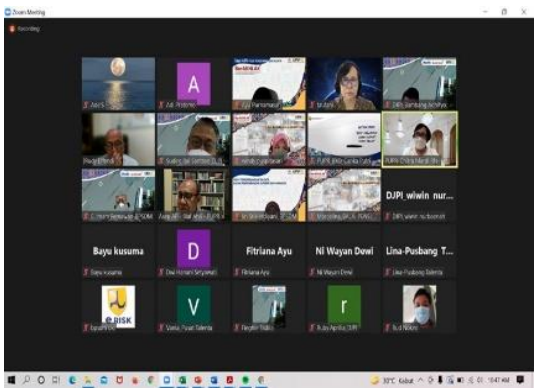

Rapat Pembahasan Strategi Penataan Manajemen Pegawai Non ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Via Zoom Meeting tanggal 8 Maret 2022

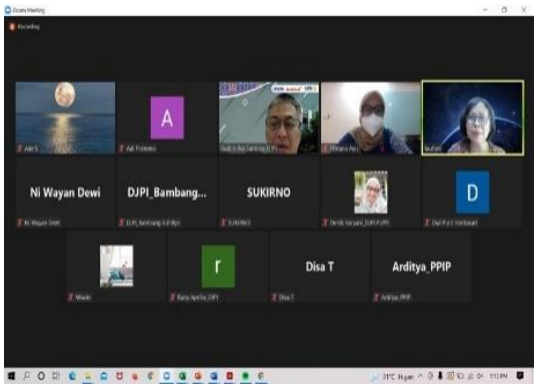

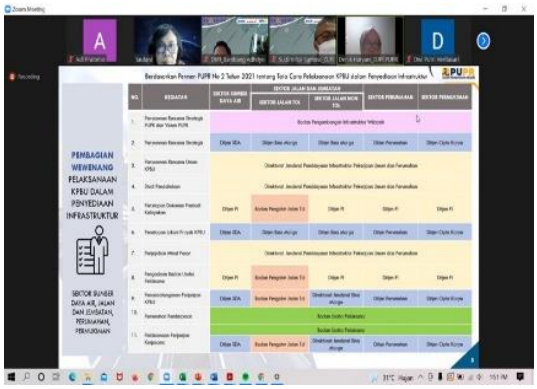

Koordinasi Penataan Manajemen Pegawai Non ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Via Zoom Meeting tanggal 11 Maret 2022

Workshop Pengelolaan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka Kebijakan Pengembangan SDM di Kementerian PUPR dan Penatausahaan Jafung di Kementerian PUPR
di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air tanggal 16 Maret 2022

Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (JF API)
di Ruang Rapat 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
tanggal 25 Maret 2022

Pelaksanaan uji beban Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Grand Mercure Yogyakarta, tanggal 5 April 2022

Pelaksanaan uji beban Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Tingkat Sedang
di Hotel Ciputra World Surabaya tanggal 22 April 2022

Rapat Persiapan Evaluasi Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
di Ruang Rapat 1 tanggal Selasa 9 Agustus 2022

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur di Hotel Royal Darmo Malioboro-Yogyakarta tanggal 23 – 26 Agustus 2022

Validasi data Pegawai Non PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Ruang Rapat Lantai 9 tanggal 31 Agustus 2022

Pendampingan Proses Pedataan Pegawai Non ASN di ingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Ruang Rapat Lantai 9 dan Media Zoom tanggal 20 September 2022

Persiapan Penyusunan Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Kerjasama dan Pembiayaan Infrastruktur (PUPR-08)
di Balai Teknik Irigasi tanggal 5 September 2022

2) Layanan Umum

- Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Mengikuti Aneka perlombaan di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77
di Kementerian PUPR tanggal 28 Juli s/d tanggal 15 Agustus 2022

- Peningkatan Layanan Kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Piket Rutin Satuan Pengamanan
di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Penyemprotan Disinfektan di Seluruh Ruangan
di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

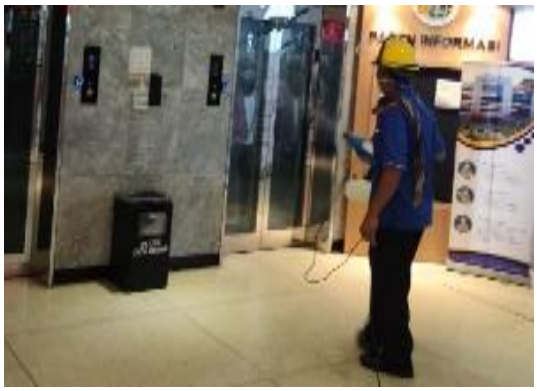

Pelaksanaan *fogging* anti nyamuk DBD dan penyemprotan anti rayap di Gedung A1 dan A2
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pelaksanaan Swab Antigen DJPI setiap hari
di Atrium Lantai 2 Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pelaksanaan Swab Antigen DJPI Sebelum Dilaksanakan Vaksin Dosis 3
di Atrium Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
tanggal 27 Januari 2022

Pelaksanaan Tes PCR
di Atrium Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pemberian Vitamin penambah daya tahan tubuh, masker dan *handsanitizer* secara berkala

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Kantor
di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Mengikuti Tournamen Adhyaksa Open TA 2022
di Bandung tanggal 27 Juni - 1 juli 2022

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pimpinan
di Bandung tanggal 27 Juni - 1 juli 2022

- Penatausahaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta Arsip Aktif dan Inaktif Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Pengelolaan dan Penatausahaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas elektronik (TNDE) Serta Arsip Aktif dan Inaktif Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Aston Bogor, 22 Juni 2022

Penataan Aktif dan Inaktif DJPI dan pengiriman arsip di Gedung Kintaka

- Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (Creative Infrastructure Financing (CreatIFF)) : Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan;

Kegiatan Webinar 1
Road to Creative Infrastructure Financing
("CreatIFF") 2022 sektor Sumber Daya Air
di Studi CNBC pada tanggal 6 Oktober 2022

Kegiatan *Webinar 2*
Road to Creative Infrastructure Financing (“CreatIFF”) 2022 sektor Jalan dan Jembatan tanggal 20 Oktober 2022

Kegiatan *Webinar 3*
Road to Creative Infrastructure Financing (“CreatIFF”) 2022 sektor Pemukiman tanggal 3 November 2022

Kegiatan *Webinar 4*
Road to Creative Infrastructure Financing (“CreatIFF”) 2022 sektor Perumahan tanggal 23 November 2022

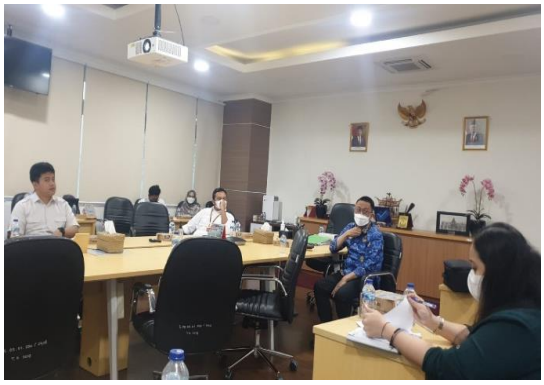

Rapat Persiapan Hari Puncak Kegiatan CreatIFF, tanggal10 November 2022

Kegiatan Hari Puncak
Road to Creative Infrastructure Financing (“CreatIFF”) 2022 sektor Perumahan tanggal 1 Desember 2022

Acara Penyerahan Hadiah Kepada Para Pemenang Call For Policy Brief CreatIFF 2022 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 5 Desember 2022

- Penataan Arsip PPDPP.

Penataan Arsip eks PPDPP
di Gudang Arsip Cilandak

3) Layanan Manajemen SDM

- Penyelenggaraan Administrasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;

Sosialisasi Pengisian SKP dalam rangka Kenaikan Pangkat Pegawai
di Ruang Rapat 1 DJPI tanggal 26 Januari 2022

Pelantikan Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI
di RR 1 DJPI dan secara daring pada tanggal 28 Januari 2022

Workshop Pengelolaan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka Pengembangan SDM PUPR dan Digitalisasi Urusan Kepegawaian di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Tanggal 16 Maret 202

- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrutur PU dan Perumahan

Optimalisasi dan evaluasi kinerja pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Bimbingan Teknis Competency Based Interview/ CBI) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahandi Ruang Rapat Lantai 9 tanggal 25-26 April 2022

Bimbingan Teknis Competency Based Interview di Lingkungan DJPI di Ruang Rapat Lantai 9 tanggal 25-26 Mei 2022

Pemuktahiran Data e-HRM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam Rangka Penigkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Balai Teknik Irigasi tanggal 18 Mei 2022

Penyelenggaraan Assesment Pegawai Non ASN Berupa Psikotes di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Pengelolaan Pegawai Non ASN yang Humanis dan berbasis Kompetensi di Lantai 9 Gedua A1 tanggal 18 Mei 2022

Kegiatan Penyusunan SKP Berdasrkan Permen PANRB No. 6 Tahun 2022
di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung
tanggal 26-27 Juli 2022

Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2022 melalui E-Kinerja
di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
: 27-28 Oktober 2022

Pelaksanaan Validasi Data WL LHKPN dan Penyusunan Konsep SE LHKPN
di Hotel Ibis Style Yogyakarta, tanggal : 16-19 November 202

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022 Melalui E-Kinerja
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 22 November 2022

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah III Jakarta
tanggal 28 November s/d 21 Desember 2022

4) Layanan Sarana Internal

- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

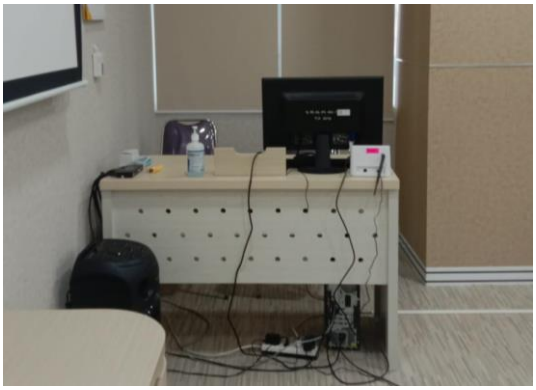

Peralatan Fasilitas Perkantoran
di Gedung A2 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
di Gedung A2 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

5) Layanan Prasarana Internal

- Pelaksanaan Renovasi

Proses Pelaksanaan Renovasi Toilet Pria
di Lantai 2 Gedung A2
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Toilet Setelah Direnovasi
di Lantai 2 Gedung A2
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

LAMPIRAN 3

B. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

1) Layanan Hukum

- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

Rapat Rancangan Peraturan Menteri PUPR
di Hotel Salak Heritage, Bogor, tanggal 20 Juni 2022

- Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan Produk Hukum Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

2) Layanan Hubungan Masyarakat

- Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

Kegiatan Wawancara Bersama Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Kontrsuksi dalam pemenuhan kebutuhan materi berita yang akan dimuat dalam Majalah VFM edisi II Tahun 2022 pada Rubrik Profesi di Ruang Kerja Direktur Kelembagaandan Sumber Daya Konstruksi tanggal 11 Juli 2022

- Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

Menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kebumen
di Ruang Pojok Informasi DJPI Loby Lantai 1 Gedung A1 tanggal 27 Januari 2022

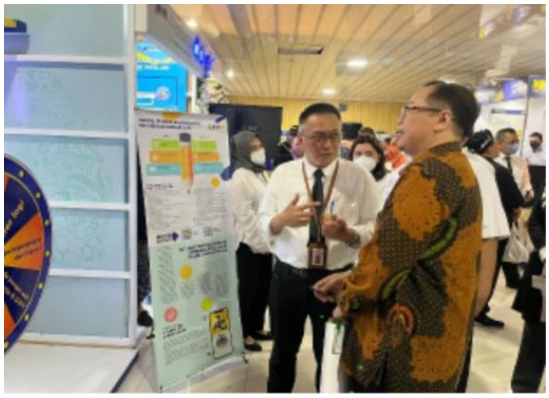

Pameran Sistem Pengelolaan Non ASN (SIPENA)
di Bandung tanggal 6 s/d 8 Juni 2022

Acara FGD Penyiapan Sistem Pemantauan Penanganan Pelayanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembiayaan InfrastrukturPekerjaan Umum dan Perumahan
di Hotel Margo, Depok tanggal 22 Juli 2022

- Dokumentasi Pimpinan dan Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII di Palembang tanggal 20 Maret 2022

Kegiatan Direktur PPISDA dalam Kunjungan Lapangan ke Bendungan Tugu di Trenggalek tanggal 20 Maret 2022

Acara Pembahasan Permasalahan dan Solusi Pembiayaan Pembangunan Perumahan di Daerah yang diselenggarakan oleh DPP REI di Hotel Sulthan Jakarta tanggal 19 April 2022

Kegiatan Penghargaan TOP BUMD *Awards* 2022 di Jakarta tanggal 20 April 2022

Rapat Pembahasan Bersama Prospektif Lenders Terkait *Bankability* PerjanjianKPBU SPAM Regional Karian-Serpong di BSD tanggal 20 April 2022

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Umum KPBU Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Swissbell Hotel BSD, tanggal 20 April 2022

Kegiatan Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) yaitu acara FGD Percepatan *Pilot Project Green & Affordable Housing* tanggal 21 April 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam acara penyerahan kunci rumah secara simbolis bertempat di lokasi perumahan Gandus Land, Kota Palembang tanggal 22 April 2022

Kegiatan Silaturahmi dan Halal bi Halal terbatas keluarga besar Kementerian PUPR tanggal 10 Mei 2022

Market Consultation Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bintang Bano yang diselenggarakan oleh Direktorat PPISDA secara luring dan daring di Hotel Grand Sahid Jaya tanggal 23 Mei 2022

Kegiatan Dirjen dalam Audiensi dengan Walikota Semarang, di Semarang tanggal 1 Juni 2022

Kegiatan Pameran *Megabuild* Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, tanggal 16-19 Juni 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam acara Kunjungan Audiensi dari DPP Pengembang Indonesia di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2 tanggal 21 Juni 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam acara Rapat Kerja Daerah DPD Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) di Hotel Discovery Ancol tanggal 22 Juni 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam acara BTN *One-Stop Housing Solution* di Palembang tanggal 25 Juni 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam Acara Akad Kredit Massal 5.476 KPR Sejahtera FLPP yang diselenggarakan oleh BNI di Museum Kereta Api, Ambarawa, Semarang tanggal 28 Juni 2022

Kegiatan Uji Coba *Commisioning* unit pertama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Surakarta tanggal 6 Juli 2022

Kegiatan KTT Sekuritisasi 2022 Membuka Peran Sekuritisasi dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan di Hotel Borobudur Jakarta tanggal 7 Juli 2022

Kegiatan Audiensi Pembahasan SPAM Regional IR. H. Djuanda/ Jatiluhur II sisi Hilir Kabupaten Bekasi di Hotel Santika Primer Bandara Palembang tanggal 12 Juli 2022

Kegiatan Indonesia *Infrastructure Roundtable* (IRR) *Equitable Risk Allocation* di Hotel Marriot Jogjakarta tanggal 20 Juli 2022

Kegiatan Akad Kredit Massal KPR Bersubsidi di Perumahan BSS Bukit Indah Kapuk, Maros Sulawesi Selatan tanggal 23 Juli 2022

Acara Pembukaan pertandingan tenis meja pada Porseni Kementerin PUPR dalam rangka Hut RI ke-77 di Gedung Kementerian PUPR tanggal 2 Agustus 2022

Kegiatan Dirjen dalam menerima tamu KPK Diskusi Tata Kelola Pengusahaan Jalan Tol di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2 tanggal 2 Agustus 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan pada acara Permohonan Pertemuan dengan EDGE Manager Global – *International Finance Corporation* di Hotel Sheraton Jakarta tanggal 4 Agustus 2022

Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan pada acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung tanggal 8 Agustus 2022

Meliput dan mendokumentasikan acara Ekonomi Pulih, Pembangunan Bangkit yang dilaksanakan oleh Koran Tempo lewat *live streaming* Youtube tanggal 15 Agustus 2022

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Menteri PUPR tentang Pembubaran Tata Kelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Hotel Tuscany Boutique Tangerang Selatan tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022

Acara Kunjungan Ziarah dan Tabur bunga di Makam Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta tanggal 25 Agustus 2022

Acara Malam Puncak Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2022 di Ruang Auditorium Kementerian PUPR tanggal 25 Agustus 2022

Workshop Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Melalui Sinergi Pembinaan Sektor, Korporasi dan Fiskal tanggal 25 Agustus 2022

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI di ruang Sidang Komisi V Komplek Senayan dan juga melaui *daring* tanggal 1 September 2022

Kick Off Meeting Penjajakan Kerja Sama Pembiayaan Pengembangan dan Penyediaan Hunian Terjangkau di Kawasan Berorientasi Transit MRT di Jakarta tanggal 5 September 2022

Market Sounding proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua segmen Mamberamo-Elelim di Wyndham di Hotel Casablanca Jakarta tanggal 6 September 2022

Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah Untuk Mendukung SDGs diselenggarakan di Jakara tanggal 7 September 2022

Kegiatan Forum Investasi 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, NTT tanggal 9 September 2022

Acara *Kick Off Meeting* penyusunan studi dan persiapan mekanisme penerapan *Land Value Capture* (LVC) untuk mendukung pembangunan proyek Infrastruktur di Indonesia di Hotel Pullman Jakarta tanggal 19 September 2022

Acara Market Consultation untuk Proyek Proyek KPBU Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Mamberamo – Elelim di Jakarta tanggal 20 September 2022

Acara Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa Tenggara Barat di Jakarta tanggal 22 September 2022

Kegiatan *Press Conference* dalam rangka *Road to* CreatIFF 2022 di Media Center, Kementerian PUPR tanggal 4 Oktober 2022

Peliputan dan pendokumentasian Kegiatan *Showcasing Business Deal* dan Talkshow Pembiayaan Syariah KPBU Di Gedung JCC Senayan tanggal 7 Oktober 2022.

Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan *Bundling* di Jakarta tanggal 14 Oktober 2022

Acara NGOPI (Ngobrol Bareng Dirjen PI) bersama Media di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung A1 DJPI tanggal 21 Oktober 2022

Acara peninjauan proyek SPAM Kota Pekanbaru di Jalan Kayu Mas, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. pada 2 November 2022

Meliput dan mendokumentasikan acara HIMPERRA X TRIBUN Property Expo 2022 di Mall SKA Kota Pekanbaru tanggal 2 November 2022

Meliput dan mendokumentasikan acara Seremonial Akad Perdana KPR untuk Gojek di Solo, Jawa Tengah tanggal 8 November 2022

Acara Launching ESG Framework and Manual: Journey to ESG Implementation for Infrastructure Financing in Indonesia di Bali.
tanggal 12 November 2022

Acara Seminar Nasional Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO)
di Hotel ICE BSD, Tangsel
tanggal 18 November 2022

Acara *Water Credit Forum* dengan tema “Dari Layak Menjadi Aman: Transisi Menuju Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan”
di Jakarta tanggal 22 November 2022

Acara Pembukaan Pertandingan Tenis Meja pada Hari Bakti PUPR ke – 77 Tahun ”Sigap Membangun Negeri” di Pendopo Kementerian PUPR
tanggal 28 November 2022 di

Acara puncak Creative Infrastructure Financing (CreatiFF) Day 2022
di Ruang Auditorium PUPR Jakarta
tanggal 1 Desember 2022

Acara Penyerahan Hadiah Kepada Para Pemenang Call For Policy Brief CreatIFF 2022
di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktu Pekerjaan Umum dan Perumahan
tanggal 5 Desember 2022

Acara Special Dialog CNBC bertema “Air untuk Kesejahteraan Bersama: Menuju The 10th World Water Forum 2024” di studio CNBC, Trans Media tanggal 6 Desember

Acara Seminar Economic & Property Outlook 2023 dengan tema “Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat di Tengah Meningkatnya Risiko Ketidakpastian Ekonomi Global” di Jakarta tanggal 7 Desember 2022

.

Acara Market Sounding Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 40MW Pada Bendungan Tiga Dihaji Sumatera Selatan” di JW Marriott Hotel, Jakarta tanggal 8 Desember 2022

Acara Dirjen PI dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional REI Tahun 2022 dengan tema “Momentum Bangkitnya Industri Properti Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 13 Desember 2022

3) Layanan Bantuan Hukum

- Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sosialisasi Ketentuan Lebar Kavling Rumah Umum Tapak
yang difasilitasi Program Pembiayaan Perumahan,
di Hotel Mercure Serpong, tanggal 7 Juli 2022

- Pembinaan Kerjasama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kerjasama BP2BT Tahun 2022 antara
BPD Jateng dan BPR Boyolali, di Vega Hotel Gading Serpong, tanggal 26 Juli 2022

LAMPIRAN 4

C. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

1) Layanan BMN

- Penatausahaan Dan Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan

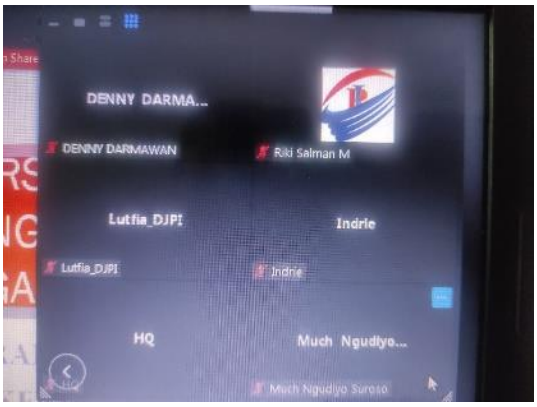

Rapat Koordinasi Persiapan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2022 Zoom meeting, tanggal 7 Februari 2022

Rapat Koordinasi Awal Penghapusan dan Lelang/Penjualan Barang Milik Negara di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 8 Maret 2022

Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional Sementara BMN Aset Utama Pendukung Layanan FLPP dan BMN Lainnya di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 9 Maret 2022

Pelaksanaan Aanwijzing Cek Fisik Kendaraan Dinas Operaional Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Gedung BP Tapera, tanggal 6 September 2022

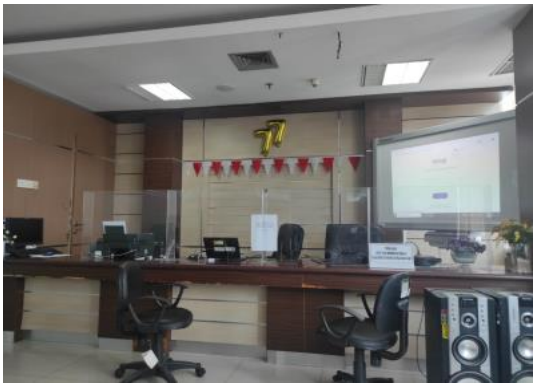

Pelaksanaan Penetapan Pemenang Lelang Kendaraan Dinas Operasional Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Ruangan Lelang Gedung KPKNL Jakarta III, tanggal 21 september 2022

Pelaksanaan Serah Terima BMN yang dilelang dari Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada Pemenang Lelang di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, tanggal 22-30 September 2022

Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang Milik Negara dan Sosialisasi Barcode System BMN di Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3, tanggal 25 Oktober 2022

Inventarisasi Barang Milik Negara Satker PI yang masih digunakan atau dioperasionalkan oleh BP Tapera sebanyak 942 NUP
di Gedung BP Tapera, tanggal 10-14 Oktober 2022

- Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Eks PPDPP

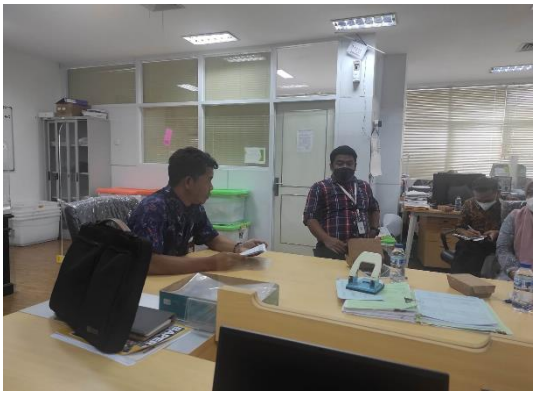

Rapat Koordinasi Pengangkutan Barang Milik Negara (BMN) yang akan Dikembalikan oleh BP Tapera di Ruang Rapat Sarker DJPI Gedung A2 lantai 2, tanggal 30 September 2022

Pengangkutan Barang Milik Negara (BMN) yang dikembalikan dari BP Tapera ke DJPI di BP Tapera ke DJPI, tanggal 1 Oktober 2023

Pendampingan dan Reviu Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 di Bogor, tanggal 17 - 19 oktober 2022

Rapat Tertib Fisik dan Penentuan Nilai Limit Barang Milik Negara berupa Peralatan Kantor Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 di Ruang Rapat 2 lantai 2 wing 3, tanggal 9 November 2022, 2022

Rapat Koordinasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,
di Ruang Rapat 2 lantai 2 wing 3, tanggal 10 November 2022

Rapat Koordinasi Cek Fisik dan Penentuan Limit Penjualan Barang Milik Negara berupa Peralatan Kantor Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 2 Gedung A1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 21 November 2022,

Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang milik Negara
dan Sosialisasi Barcode System BMN
di Ruang Rapat 1 tanggal 29 November 2022

2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA.2023

Rapat Pemuktahiran Rancangan Awal Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023
Ruang Rapat 1 DJPI, tanggal 4 Januari 2022

Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat Setditjen, tanggal 31 Mei, 2 & 3 Juni 2022

Rapat Persiapan, Penelitian, Reviu dan Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran DJPI TA. 2023
di Ruang Rapat 1 DJPI, tanggal 22 Juli 2022

Rapat Tindak Lanjut Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2023 di Ruang Rapat 1 DJPI, 9 Agustus 2022

Penelitian dan Reviu Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran DJPI Pagu Anggaran TA. 2023 di Gedung SDA, Kementerian PUPR, 25-27 Juli 2022

Rapat Persiapan Penelitian, Reviu, dan Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJPI TA. 2023 di Ruang Rapat 1 DJPI, 30 September 2022

Penelitian dan Reviu Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran DJPI
Pagu Alokasi Anggaran TA. 2023 di Hotel Atria, Gading Serpong, 11-15 Oktober 2022

Rapat Penyusunan Tanggapan Catatan Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 19 Oktober 2022

- Penyusunan Pengelolaan Administrasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022

Rapat Pembahasan Skema Fasilitasi Tenaga Kontrak Individual
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 10 Januari 2022

Rapat Koordinasi Penyusunan KAK Reviu Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 19 Januari 2022

Rapat Pembahasan Usulan Revisi Anggaran
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 24 Januari 2022

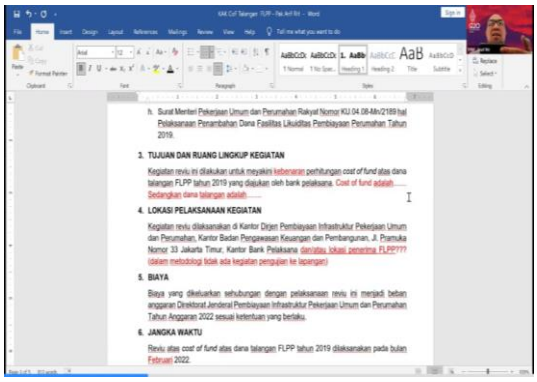

Rapat koordinasi lanjutan penyusunan KAK Reviu Cost of Fund atas dana talangan FLPP Tahun 2019
Via *Zoom Meeting* tanggal 7 Februari 2022

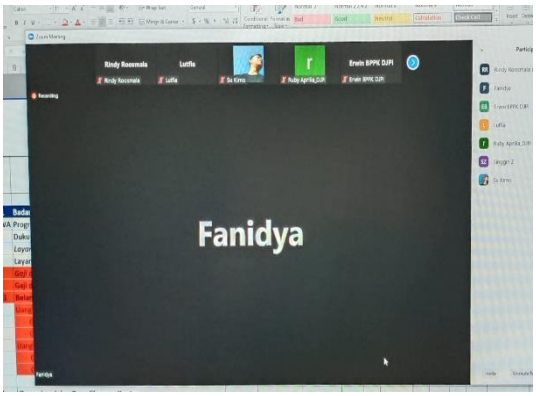

Rapat pembahasan RAB
Masa Transisi BLU-PPDPP
Via *Zoom Meeting* tanggal 23 Februari 2022

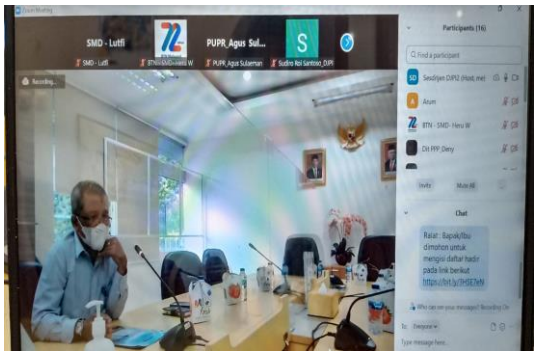

Entry Meeting BPKP terkait CoF atas dana talangan FLPP tahun 2019
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 dan via Zoom Meeting tanggal 8 Maret 2022

Sosialisasi Implementasi 16 Segmen CoA Aplikasi Sakti dan Pembahasan Rencana Revisi Anggaran TA 2022 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 dan via Zoom Meeting tanggal 9 Maret 2022

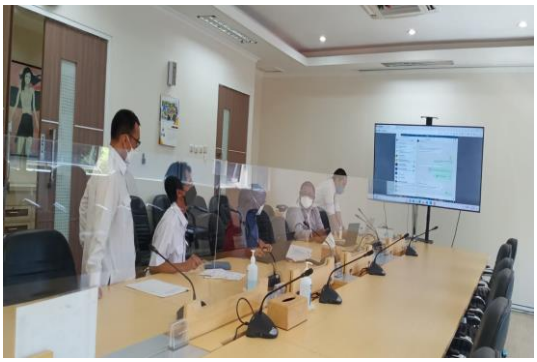

Pendampingan Penyampaian SPT PPh Pasal 21 Tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 21-22 Maret 2022

Rapat Pembahasan Revisi Anggaran (Revisi DIPA Ke-3) di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing *tanggal* 6 April 2022

Rapat Penerapan Chart of Accounts (CoA) dalam aplikasi SAKTI dan pemanfaatan KKP
di Balai Pengembangan Kompe*tensi* PUPR Wilayah III Jakarta tanggal 18-19 April 2022

Pembahasan Pemanfaatan KKP dan Virtual Account, Perbaikan RDP pada Halaman III DIPA untuk triwulan III dan Reviu Target Bela Pengadaan TA 2022 di Hotel Sotis tanggal 21 Juni 2022

Pembahasan SOP Bela Pengadaan serta Pembahasan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II dan III di Qubika Boutique Hotel, tanggal 7-8 Juli 2022

Pembahasan Bantuan Realisasi di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 12 Juli 2022

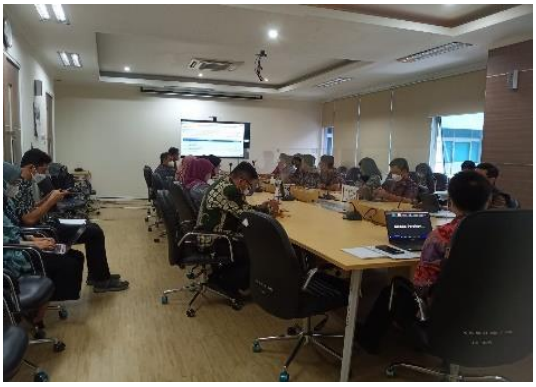

Rapat Pembahasan Optimasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 22 Juli 2022

Pembahasan Exercise Rencana Penambahan Target dan Anggaran BP2BT Tahun 2022
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 27 Juli 2022

Rapat Identifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 23 September 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2 tanggal 20 Oktober 2022

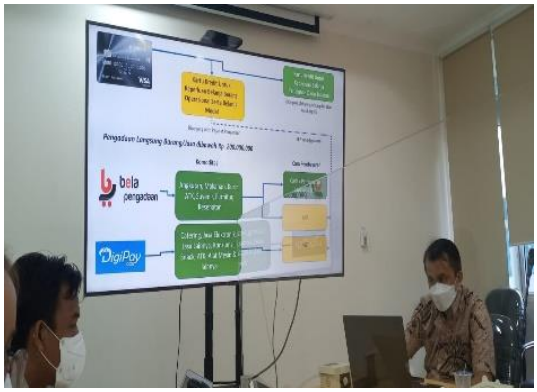

Rapat Internalisasi Digipay dan CMS pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 11 November 2022

Rapat Internalisasi Digipay dan CMS pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Veranda Jakarta
tanggal 14 November 2022

Rekonsiliasi Perbaikan Revisi POK dan Internalisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2022 di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera tanggal 15 November 2022

Rapat Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Sistem Informasi Pemantauan Layanan Satuan Kerja di Hotel Atria Serpong Tangerang tanggal 23 November 2022

Rapat Pendampingan Proses Belanja Pengadaan Barang/Jasa melalui Digipay di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI tanggal 30 November 2022

Rapat Pembahasan Excercise Automatic Adjusment TA 2023 DJPI
di Ruang Rapat 1 Lnatai 2 Wing 3 DJPI tanggal 19 Desember 2022

- Pembinaan Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sosialisasi Bela (Belanja Langsung Pengadaan via *Zoom Meeting*
tanggal 1 Maret 2022

Pembahasan Detail Bela (Belanja Langsung) Pengadaan
di Hotel Novotel Bogor tanggal 16-17 Maret 202

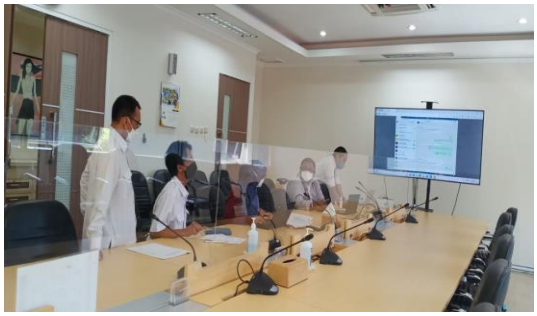

Pendampingan Penyampaian SPT PPh Pasal 21 Tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 21-22 Maret 2022

Rapat Koordinasi Dokumen Kelengkapan Bela Pengadaan di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 dan via *Zoom Meeting* tanggal 22 April 2022

Pembahasan Perpanjangan Waktu *Reviu Cost of Fund* Atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019
di Hotel The 1O1 Darmawangsa Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2022

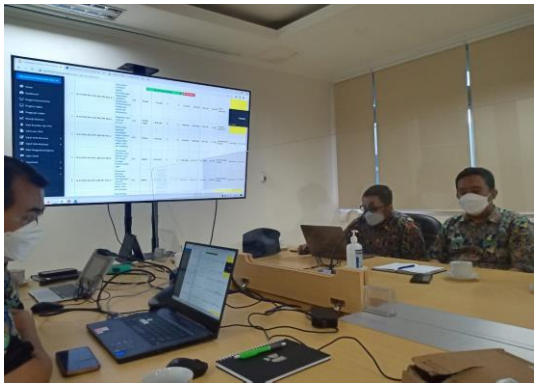

Pembahasan Automatic Adjusment Tahap II
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI tanggal 25 Mei 2022

Rapat Pembahasan Lanjutan Hasil Reviu *Cost of Fund* atas Dana Tlangan FLPP Tahun 2019
di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung A1 tanggal 3 Juni 2022

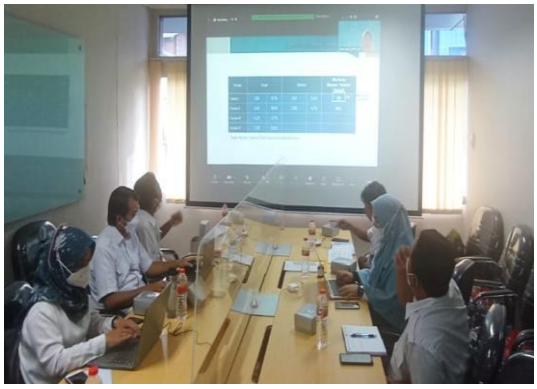

Rapat Pra Pembahasan *Reviu Cost of Fund* atas Dana Talanagan FLPP tahun 2019
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 15 Juni 2022

Rapat Pembahasan Permohonan Pendapat hukum (legal opinion) atas pembayaran CoF atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 di Hotel The 1O1 Darmawangsa, tanggal 18 Juli 2022

Pembahasan Reviu Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019
Hotel Veranda Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2022

Pembahasan Final Reviu Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 11 Agustus 2022

Exit Meeting Reviu Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019
di Hotel Horison Ultimate Riss Malioboro Yogyakarta dan Zoom Meeting
tanggal 19 Agustus 2022

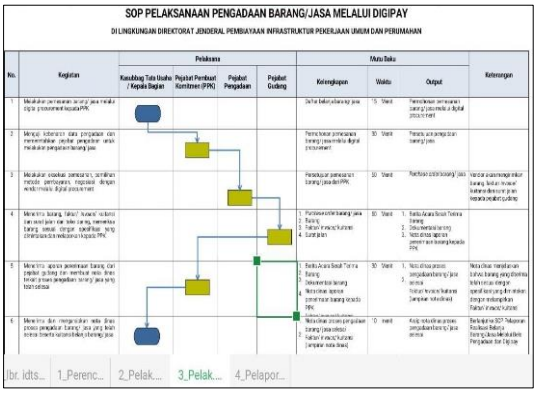

Pembahasan penyusunan SOP Belanja Bela
Pengadaan dan Perhitungan Estimasi Optimasi &
DIPA di Novotel Bogor
tanggal 9 - 11 September 2022

Rapat Internalisasi Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pendampingan Penyusunan Kerangka
Acuan Kerja (Term of Reference) di Hotel Neo Green Savana Sentul City
tanggal 12 s.d. 14 September 2022

Rapat Pembahasan Hasil Kunjungan Lapangan terkait CoF atas dana talangan FLPP Tahun 2019 di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 12 Oktober 2022

Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Lapangan Terkait Reviu CoF atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 12 Oktober 2022

3) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2022

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Anggaran DJPI TA.2022 di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung A1 DJPI pada Tanggal 12 Januari 2022

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan BP2BT dan Paket Kegiatan Kontraktual di Lingkungan DJPI TA. 2022 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1 pada Tanggal 25 Januari 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 10 Maret 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022 tanggal 14 April 2022

Rapat Koordinasi Pembahasan IKPA Triwulan 1 dan 2 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 2 W 2 tanggal 31 Mei 2022

Rapat Pembahasan Optimalisasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bulan Juni 2022 di Ruang Rapat Setditjen pada tanggal 3 Juni 2022

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2 Mingguan periode bulan Juli 2022 Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 pada tanggal 19 Juli 2022

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2 Mingguan dan Koordinasi Capaian Output di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 3 Agustus 2022

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2 Mingguan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 12 Agustus 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Mingguan periode bulan Agustus 2022 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 23 Agustus 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Mingguan Periode Bulan September Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1, tanggal 2 September 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Mingguan (setelah Optimasi) di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1, tanggal 27 September 2022

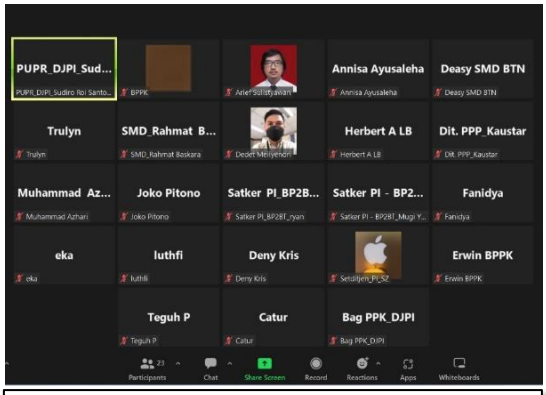

Rapat Pembahasan BP2BT dengan Bank BTN di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1, tanggal 14 Oktober 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1 tanggal 21 Oktober 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Pasca Revisi DIPA Ke-6, di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung A1 tanggal 11 November 2022

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bulan Desember di Ruang Rapat Prambahan Gedung A1 tanggal 7 Desember 2022

- Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Setditjen PI TA.2022

Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 13 Desember 2022

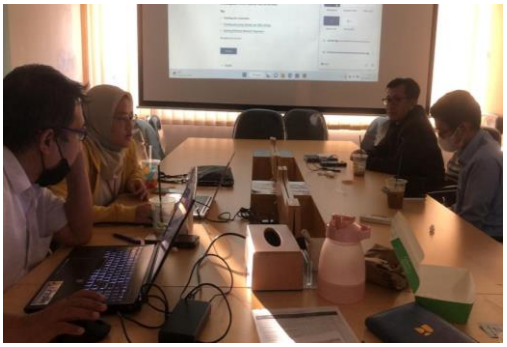

Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 28 Desember 2022

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perhitungan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 30 Desember 2022

4) Layanan Manajemen Keuangan

- Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Koordinasi Tindak Lanjut Penyelsaian LHP BPK No.38A/LHP/XVI/05/2012 dan LHA Itjen No.1/5/11/5/2018/032 di Ruang Rapat Dirjen Lantai 2 Wing 2 tanggal 5 Januari 2022

Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 18 Januari 2022

Koordinasi Tindak Lanjut Penyelsaian LHP BPK No.38A/LHP/XVI/05/2012
di Ruang Rapat. Lantai 9, tanggal 17 Januari 2022

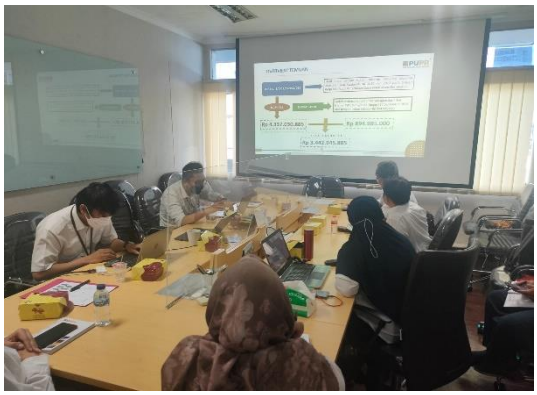

Pembahasan Tindak Lanjut LHA itjen pada satker LHA ITJEN pada SATKER BLU PPDPP
di Ruang Rapat.setditjen Lantai 2 wing 1
tanggal 14 Maret 2022

Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Penyelsaian (LHP) dan LHA Satker Subsidi
di Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 wing 1,
tanggal 22 Maret 2022

Pembahasan Tindak Lanjut Konsep Temuan Pemeriksa BPK RI pada
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2021
di Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3,
tanggal 23 Maret 2022

Rapat Konfirmasi TL LHP dan LHA Satker Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahandi
Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1,
tanggal 4 April 2022

Pembahsan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Nomor 2/LHP/XVII/01/2021 dan 25.B/LHP/XVII/09/2020di Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3, tanggal 12 April 2022

Pelaksanaan Stock Opname Persediaan SATKER BLU PPDPP
di Gedung BLU PPDPP, tanggal 25 April 2022

Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian LHP dan LHA
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2
tanggal 25 April 2022

Rapat Penyusunan Matrik A PIPK TA. 2022
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 3
tanggal 13 Mei 2022

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelsaian TGR PT. Nippon Koei.CO.LTd
di Ruang Rapat Lantai 2 wing 1 tanggal 24 Mei 2022

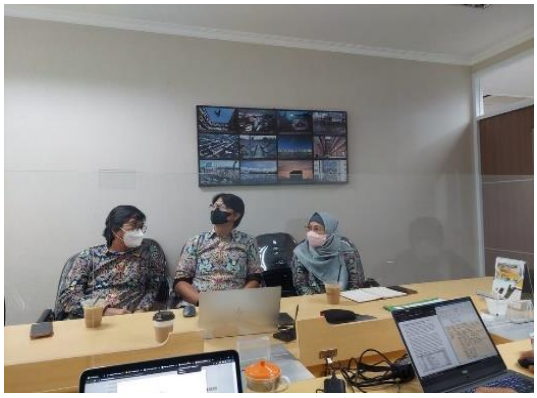

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan TA. 2021
di Ruang Rapat Lantai 2 wing 1 tanggal 25 Mei 2022

Pembahasan Pemetaan Pengendalian PIPK Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 2 Juni 2022

Rapat Pembahasan TL Rekomendasi LHP BPK RI atas Rekomendasi dengan Status Belum Selesai
di Ruang Rapat Lantai 2 wing 1, tanggal 6 Juni 2022

Koordinasi Penyusunan Laporan Likuidasi Satker BLU PPDP
di Ruang Rapat 1, Lt. 2 Wing 3, tanggal 23 Juni 2022

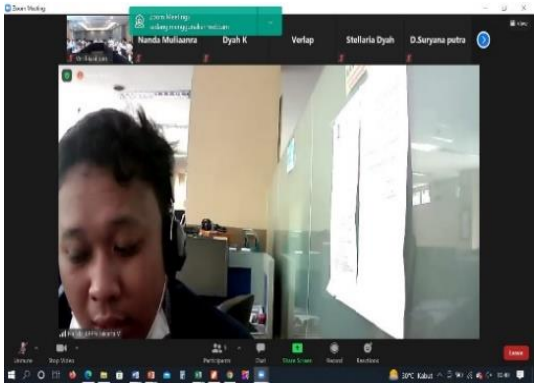

Pendampingan Migrasi Data Keuangan dan Konsinyasi Migrasi Saldo Awal dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SAKTI di Avenzel Hotel and Convention, tanggal 30 Juni 2022

Rapat Koordinasi TL Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 13/LHP/XVII/05/2021
di Whiz Prime Hotel Padjajaran Bogor tanggal 4-5 Juli 2022

Rapat Pembahasan Tuntutan Kerugian PT Indokoei International Nippon Koei Co LTD
di Hotel Horison Bhuava Ciawi Bogor, tanggal 7 Juli 2022

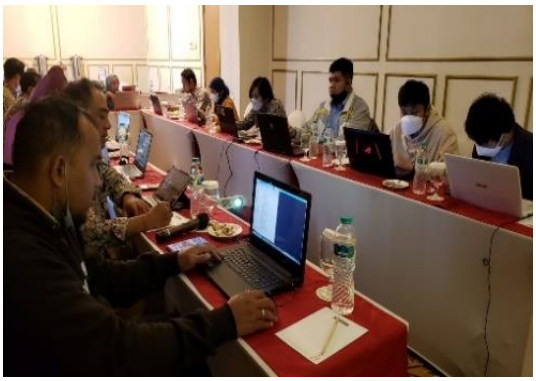

Koordinasi TLRHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR dan Laporan Keuangan BA BUN TA 2021 pada Direktorat jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Horison Ciledug tanggal 13 Juli 2022

Koordinasi TLRHP BPK RI atas LK Kementerian PUPR dan LK BA BUN TA 2021 pada DJPI Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2, tanggal 26 Juli 2022

Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemerikasaan (TL RHP) pada Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan BA 999.07 di Ruang Rapat 1,Lantai 2 Wing 3, tanggal 1 Agustus2022

Koordinasi Lanjutan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemerikasaan (TLRHP) 2022
di Ruang Rapat Lt. 2 Wing 1, tanggal 02 Agustus 2022

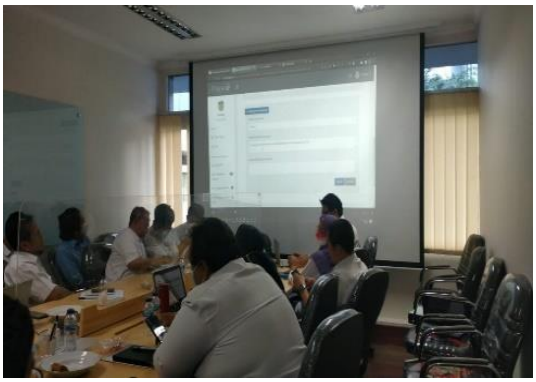

Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemerikasaan (TLRHP) BPK RI 2022
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, tanggal 4 Agustus 2022

Konsultasi atas Kendala Penerapan Aplikasi SAKTI
pada Modul Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan
di Ruang Direktorat SITP, Kemenkeu tanggal 19 Agustus 2022

Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (LHA) Inpektorat Jenderal 2016 dan 2017di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 2, tanggal 29 Agustus 2022

Koordinasi Tim Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (TL LHA) oleh Inpektorat Jenderal pada BLU PPDPP di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1, tanggal 2 September 2022

Rapat Justifikasi TL 180 Debitur Belum Siap Huni di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1, tanggal 22 September 2022

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Triwulan III Tahun 2022
di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Ditjen Cipta Karya,
tanggal 20-21 Oktober 2022,

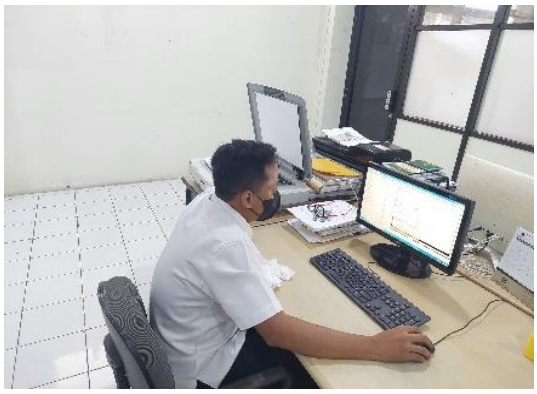

Peminjaman Arsip Satker BLU PPDPP di Gedung Arsip Modern Bina Marga Lantai 3
di Gedung Arsip Modern Bina Marga Lantai 3, tanggal 27 Oktober 2022

Rapat Koordinasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi PT. Nippon Indokoei Co.Ltd.
dan Kunjungan Lapangan
di Ruang Rapat Lantai 9,Gedung A1 tanggal 16 November 2022

Rapat Pembahasan Pemetaan Pengendalian PIPK DJPI BA.999.07.987252 TA.2022 dan Koordinasi penyelesaian LHP BPK dan LHA Itjen.
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 21 November 2022

Rapat Koordinasi Penatakelolaan Aset Lancar dan Aset Tetap Lainnya
di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang
tanggal 23 November 2022

Kunjungan ke KPPN V dalam rangka konsultasi atas kendala penerapan aplikasi pada Modul Aset Tetap di Kantor KPPN Jakarta V
tanggal 2 Desember 2022

Entry Meeting BPK RI pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 2, Lt. 2 Wing 3, tanggal 6 Desember 2022

Rapat Konfirmasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 38A/HP/XVI/05/2012, *Via Zoom Meeting* tanggal 19 Desember 2022

- Penyusunan Laporan Manajemen Risiko

Rapat Penyusunan Profil Risiko UPR-T2 Setditjen DJPI
di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 17 Januari 2022

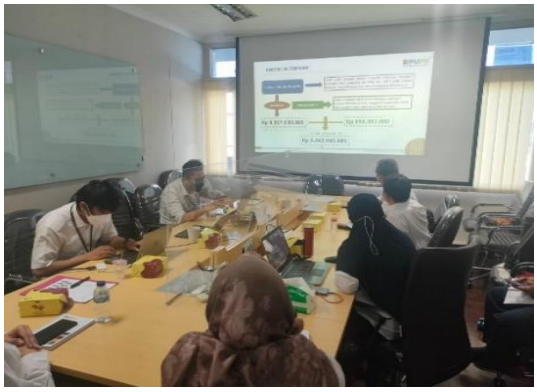

Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko UPR T2 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triwulan I Tahun 2022
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1, tanggal 8 April 2022

Penyusunan Usulan Profil Risiko Tingkat Kementerian di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 2, tanggal 17 Mei 2022

Koordinasi Penyusunan Usulan Pernyataan Risiko Tingkat Kementerian TA.2022
di Ruang Rapat1,Lantai 2 Wing 3, tanggal 19 Mei 2022

Pemantauan Penerapan
Manajemen Risiko UPR T2 Sekretariat Direktorat
Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Triwulan II Tahun 2022
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1
tanggal 28 Juni 2022

Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur PU dan Perumahan
pada Triwulan II TA. 2022
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1
tanggal 14 Juli 2022

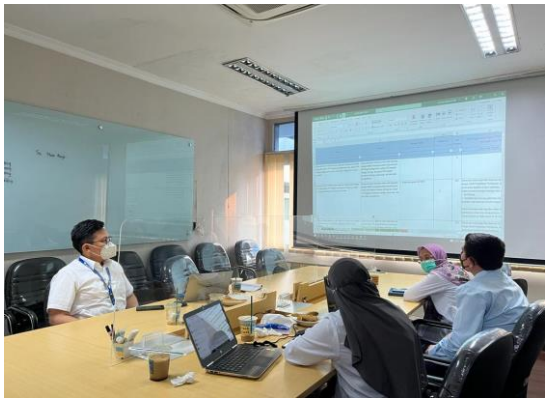

Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1, tanggal 18 Juli 2022

Konfirmasi Penilaian Mandiri Maturitas Tahun 2022 di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 18 Juli 2022

Koordinasi Pelaksanaan Pra Penilaian Mandiri (PPM) Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Savero Bogor, tanggal 28-29 Juli 2022

Rapat Pemantauan Pelaksanaan Respon Manajemen Risiko di Lingkungan Setditjen Triwulan III TA.2022 di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 10 Oktober 2022

Rapat Koordinasi Penerapan Manajemen Risiko UPR T1 DJPI dan
UPR Kementerian Triwulan III TA.2022
di Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3, 26 Oktober 2022

Rapat Sinergi Implementasi Manajemen Risiko Dalam Kaitannya dengan
Pencapaian Sasaran Program Organisasi
di Balai Teknik Irigasi, Bekasi Jabar tanggal 01 November 2022

Rapat Koordinasi Penerapan Manajemen Risiko Permukiman dan
Jalan Jembatan Triwulan III TA.2022
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 16 November 2022

Rapat Koordinasi Rencana Strategis dan Keterkaitannya dengan Manajemen Risiko
di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang tanggal 23 November 2022

Rapat Pengelolaan Loss Event Databasepada Manajemen Risiko
di Ruang Rapat lantai 9 Gedung A1 tanggal 5-7 Desember 2022

Rapat Perumusan Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria
di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 23 Desember 2022

- Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi pada Satker Ba.033.16.631021 Satker BLU PPDPP

Koordinasi dan Konsolidasi Penyusuanan Laporan Keuangan Penutup SATKER BLU PPDPP BA.033.16.631021 di Hotel Tuscany Boutique tanggal 7 September 2022

Koordinasi Pelaksanaan Likuidasi BLU PPDPP
di Ruang Rapat Lantai 9 Geduang A1 tanggal 12 September 2022

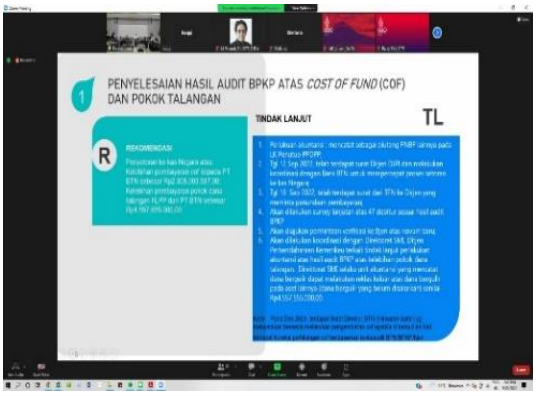

Rapat Koordinasi dalam rangka Likuidasi Satker BLU PPDPP BA.033.16.631021
di Ruang Rapat Lantai 9 Geduang A1 tanggal 29 September 2022

Kunjungan ke KPPN Jakarta II dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Negara dalam rangka Proses penyelesaian Likuidasi satker BLU PPDPP dan Saldo Tidak Normal pada BA.999.07.987252 di Gedung KPPN Jakarta II dan Dit. SITP tanggal 17 Oktober 2022

Kunjungan ke KPPN Jakarta II dalam rangka Proses Penyelesaian dalam Rangka Likuidasi Satker BLU PPDPP terkait Koreksi Penerimaan Negara di Gedung KPPN Jakarta II dan Dit. SITP tanggal 25 Oktober 2022

Kunjungan ke KPPN Jakarta II dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Negara dalam rangka Proses penyelesaian Likuidasi satker BLU PPDPP terkait perbaikan pengesahan SP3 BLU pada Satker BLU PPDPP di Gedung KPPN Jakarta II dan Dit. SITP tanggal 31 Oktober 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan